

**EVALUASI PROGRAM “BERSERI” SEBAGAI
UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN *GREEN CITY***

(Studi di Kota Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

IMROATUL MUFIDAH

115030107111092



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

EVALUASI PROGRAM “BERSERI” SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN *GREEN CITY*

(Studi di Kota Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

IMROATUL MUFIDAH

115030107111092



Dosen Pembimbing :

1. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
2. Mochamad Chazienul Ulum S.Sos, MPA

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Program “Berseri” Sebagai Upaya Untuk
Mewujudkan *Green City* (Studi Pada Kota Mojokerto)

Disusun oleh : Imroatul Mufida

NIM : 115030107111092

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 10 Juli 2015

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

all



Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

Mochamad Chazienul S.Sos, MPA
NIP.19740614 200501 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 06 Agustus 2015

Jam : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Imroatul Mufida

Judul : Evaluasi Program “Berseri” Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan *Green City* (Studi Pada Kota Mojokerto)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Ainal Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota



Mochamad Chazienul S.Sos, MPA
NIP. 19740614 200501 1 001

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 23 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Juli 2015



Nama : Imroatul Mufida

NIM : 115030107111092

RINGKASAN

Imroatul Mufida, 2015. **Evaluasi Program “Berseri” Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan *Green City*** (Studi di Kota Mojokerto). Dosen Pembimbing : Ainul Hayat, S.Pd, M.Si, dan Mochamad Chazienul Ulum S.Sos, MPA, 176 Halaman.

Program Berseri di Kota Mojokerto merupakan pertanggungjawaban sosial yang dilaksanakan Pemerintah Kota Mojokerto yang didorong dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim, Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*). Penelitian ini membahas mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Mojokerto dan diharapkan dengan adanya Program Berseri dapat mempercepat pencapaian Kota Mojokerto sebagai kota hijau (*green city*).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah evaluasi implementasi Program “Berseri” yang meliputi *input*, *process*, *output* dan *outcome*. Pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Berseri dilaksanakan pada awal tahun 2013. Program Berseri dilaksanakan karena dorongan dari masyarakat dengan adanya berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Mojokerto seperti halnya pembuangan sampah tidak pada tempatnya, banyaknya sampah liar yang mengotori keindahan kota, kondisi kota yang panas karena kurangnya penanaman pohon serta kurangnya kepedulian dari masyarakat dengan masalah terkait. Proses pelaksanaan Program Berseri di Kota Mojokerto sudah cukup efektif dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Kota Mojokerto yang Bersih, Asri dan Lestari. Namun dalam implementasi Program Berseri masih minim adanya bank sampah di setiap kelurahan yang mengakibatkan penumpukan sampah. Program ini juga masih belum dilaksanakan diseluruh kelurahan-kelurahan di Kota Mojokerto sehingga menyebabkan implementasi kampung Berseri masih belum merata serta masih belum adanya peraturan khusus dan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar peraturan tentang kelestarian lingkungan.

Penulis memberikan rekomendasi yaitu pemerintah segera mengadakan Program Berseri di seluruh kelurahan di Kota Mojokerto agar sikap peduli terhadap lingkungan bisa merata di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga pemerintah Kota Mojokerto menetapkan peraturan khusus mengenai kelestarian lingkungan dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Program Berseri, *Green City*.

SUMMARY

Imroatul Mufida, 2015. **Evaluation of Program “Berseri” as Effort for Achieving Green City** (Studies Mojokerto City). Advisor : Ainul Hayat, S.Pd, M.Si, and Co. Advisor : Mochamad Chazienul Ulum S.Sos, MPA, 176 pages.

“Berseri” Program in Mojokerto is the Government's social responsibility Mojokerto which is driven by the *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup* No. 19 Tahun 2012 on *Program Kampung Iklim*, *Peraturan Gubernur* No. 69 of 2011 on East Java Program Towards Go Green Province. This study discusses about environmental problems that occur in Mojokerto and expected by the “Berseri” Program can accelerate the achievement of Mojokerto as a green city.

This research is descriptive research with qualitative method. The focus of research “Berseri” Program which include input, process, output dan outcome. The collection of data was obtained by observations, interviews and documentations. Data analysis is Miles, Huberman and Saldana interactive model.

Results of the research showed that the implementation of the “Berseri” Program implemented in early 2013. “Berseri” Program implemented because of the encouragement of the people with a variety of environmental’s matter that occurred in Mojokerto as well as throw away garbage is not in place, the amount of garbage littering the wild beauty of the city, conditions heat due to the lack of tree planting as well as lack of awareness of the public with related problems. Implementation of “Berseri” Program in Mojokerto is effectively with the cooperation between the government and the people to work together to realize Mojokerto *Bersih, Asri* and, *Lestari*. However, in the implementation of the “Berseri” Program still minimal presence of *bank sampah* which resulted in the accumulation of garbage. The program is also still not been implemented throughout the sub-village in Mojokerto, causing implementation “Berseri” village is still uneven and still the lack of regulations and sanctions to people who violate the regulations on environmental sustainability.

Furthermore, the author provide some recommendations that government immediately organize “Berseri” Program in each village in Mojokerto that a caring attitude towards the environment can be distributed throughout community. In addition, the government also establish special rules regarding the preservation of the environment and impose sanctions on people who violate these rules.

Keywords : Implementation, “Berseri” Program, Green City.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur kepada Yang Maha Pencipta (Al Khaliq), Yang Maha Pemberi Manfaat (An Nafi'), Allah Subhanahu WaTa'ala. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Tak henti-hentinya aku mengucapkan syukur pada-Mu ya Rabb, Serta shalawat dan salam selalu terlimpahkan untuk idolaku Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia.

Kupersembahkan karya ini, untuk Ayah dan Ibu (Bapak H. Mustofa dan Ibu Lilik Sumiati) serta dari Ibu dan Ayah mertuaku (Ibu Suryati dan Bapak Hariyanto) yang selalu memberikan inspirasi untuk menguatkan diri, senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi dan menemani disetiap langkahku, yang senantiasa memanjatkan doa kepada putri kecilmu ini dalam setiap sujud. Terimakasih untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepadaku. Untuk kalian yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu menasehatiku untuk menjadi pribadi lebih baik. Terima Kasih Ayah... Terima Kasih Ibu...

Terima kasih untuk Suamiku tercinta Risky Hari Prasetyo, ST yang telah menjadi motivator terbesarku, selalu ada saat aku membutuhkanmu, selalu jadi suami siap siaga saat masa senang, susah, sedih, masa-masa sulit sekarang yang sudah kita lalui bertiga dengan si kecil. Terima kasih untuk calon putra/putriku di dalam perut ini, terima kasih ya nak sudah selalu mendukung ibu dan saling mendoakan dengan cara kita masing-masing. I Love You and See You Soon, Son!

Untuk kakakku (Mas Hanafi) dan adik-adikku (Adek Indah Lila Rosida, Adek Muhammad Dzikri, Adek Danum Surya Saputra dan Adek Vanny Anisa Anggraeni), tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna dalam hidup yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini. Maaf belum bisa menjadi panutan yang baik, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.

Buat sahabat-sahabatku Dinda Artha Wulandari, S.AP, Septinia Eka Silviana S.AP, Aline Sherly S.AP dan Nike Vicky S.AP terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, traktiran, ojekan, pengalaman hidup, cinta dan kasih sayang yang kalian berikan selama masa kuliah kita, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan dan kenangan kita selama ini. Terima kasih banyak atas pelajaran hidup yang sudah saling kita bagi, semoga keakraban diantara kita selalu terjaga sampai kapanpun kita kelak. Keep in touch, guys!

Buat Bapak Ainul Hayat, S.Pd, Msi dan Bapak Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, MPA selaku dosen pembimbing Tugas Akhir saya, terima kasih banyak pak, saya sudah buanyaak dibantu selama ini, sudah banyak dinasehati, sudah banyak diajari, saya tidak akan pernah lupa atas bantuan dan kesabaran lebih dari bapak. Terima kasih juga untuk seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi atas didikan dan pengalaman yang sangat berharga selama saya menempuh masa perkuliahan. Terima kasih untuk semua staff akademik yang sudah banyak membantu kami selama masa perkuliahan.

Teman-teman angkatan 2010, 2011, 2012, 2013 terima kasih banyak atas bantuan dan kerja sama nya selama ini.

Terima kasih juga untuk "Sem", kucingku yang paling lucu, terima kasih sudah selalu menemani saat mengerjakan skripsi dan memberikan hiburan saat pikiran penat. Thanks Dude, You're so helpful.

Semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan dan menjadi kebanggaan untuk semuanya. Jika hidup bisa kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan terima kasih... Your dreams today, can be your future. Keep Fight!

Salam terhangat dan semangat dalam berkarya dariku semoga untuk selanjutnya selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT... Aamiin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia serta Hidayah-Nya serta tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu yang berjudul **“Evaluasi Program “Berseri” Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Green City** (Studi di Kota Mojokerto)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis mengambil tema dalam penyusunan skripsi ini mengenai evaluasi program Pemerintah Kota Mojokerto dalam melaksanakan Program “Berseri”. Evaluasi ini dilaksanakan Pemerintah Kota Mojokerto guna memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

Sejak awal hingga akhir, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan fasilitas untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Mochamad Chazienul Ulum S.Sos, MPA selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, ilmu, masukan, dukungan, nasihat serta memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih sempurna.
6. Segenap dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya, yang telah membimbing, membina, memberikan bekal ilmu pengetahuan, dan mental kepribadian serta menularkan kajian keilmuannya kepada penulis dalam proses perkuliahan ataupun diluar perkuliahan selama 4 tahun. Dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah membantu dalam penyediaan layanan dalam perkuliahan.
7. Bapak H. Mustofa dan Ibu Hj. Lilik Sumiati selaku kedua orang tua dan Bapak Hariyanto dan Ibu Suryati selaku Bapak dan Ibu mertua penulis yang telah memberikan dukungan penuh dengan segenap kasih-sayang, kesabaran, bantuan doa maupun motivasi yang tiada henti, moral serta materiil, Muhammad Syahrudin Hanafi selaku kakak kandung, Adek Indah Lila Rosida, Adek Muhammad Dzikri, Adek Danum Surya dan Adek

Vanny Anisa Anggraeni selaku adik yang senantiasa memberikan semangatnya dan menjadi motivator hidup dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Suamiku tercinta Risky Hari Prasetyo, ST yang telah menjadi motivator terbesar dan meluangkan waktu menjadi editor dalam menyelesaikan skripsi ini serta seluruh keluarga besarku yang selalu mendorong dengan doa demi memperlancar penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak Nurhariadi, SH selaku Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan nasihat selama penelitian hingga penyelesaian skripsi.
10. Bapak Suwaji selaku Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto yang telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan kemudahan informasi selama proses melakukan penelitian.
11. Serta terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 14 Juli 2015

Penulis,

Imroatul Mufida

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tinjauan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	12
B. Konsep Evaluasi Program	14
1. Pengertian Evaluasi	14
2. Pengertian Program.....	17
3. Pengertian Evaluasi Program	18
C. Lingkungan Hidup.....	21
1. Definisi Lingkungan Hidup.....	21
2. Jenis-Jenis Lingkungan	22
3. Hubungan Individu dengan Lingkungannya.....	24
4. Permasalahan Lingkungan Hidup	26
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	28
D. <i>Green City</i>	32
1. Definisi <i>Green City</i>	32
2. Konsep <i>Green City</i>	34
3. Pembangunan Kota Hijau Berbasis <i>Green Growth</i>	36
4. Atribut <i>Green City</i>	38
E. <i>Good Environmental Governance</i>	40
1. Definisi <i>Good Governance</i>	40

2. Definisi <i>Good Environmental Governance</i>	42
3. Indikator <i>Good Environmental Governance</i>	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian	47
D. Jenis Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Instrumen Penelitian	50
G. Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

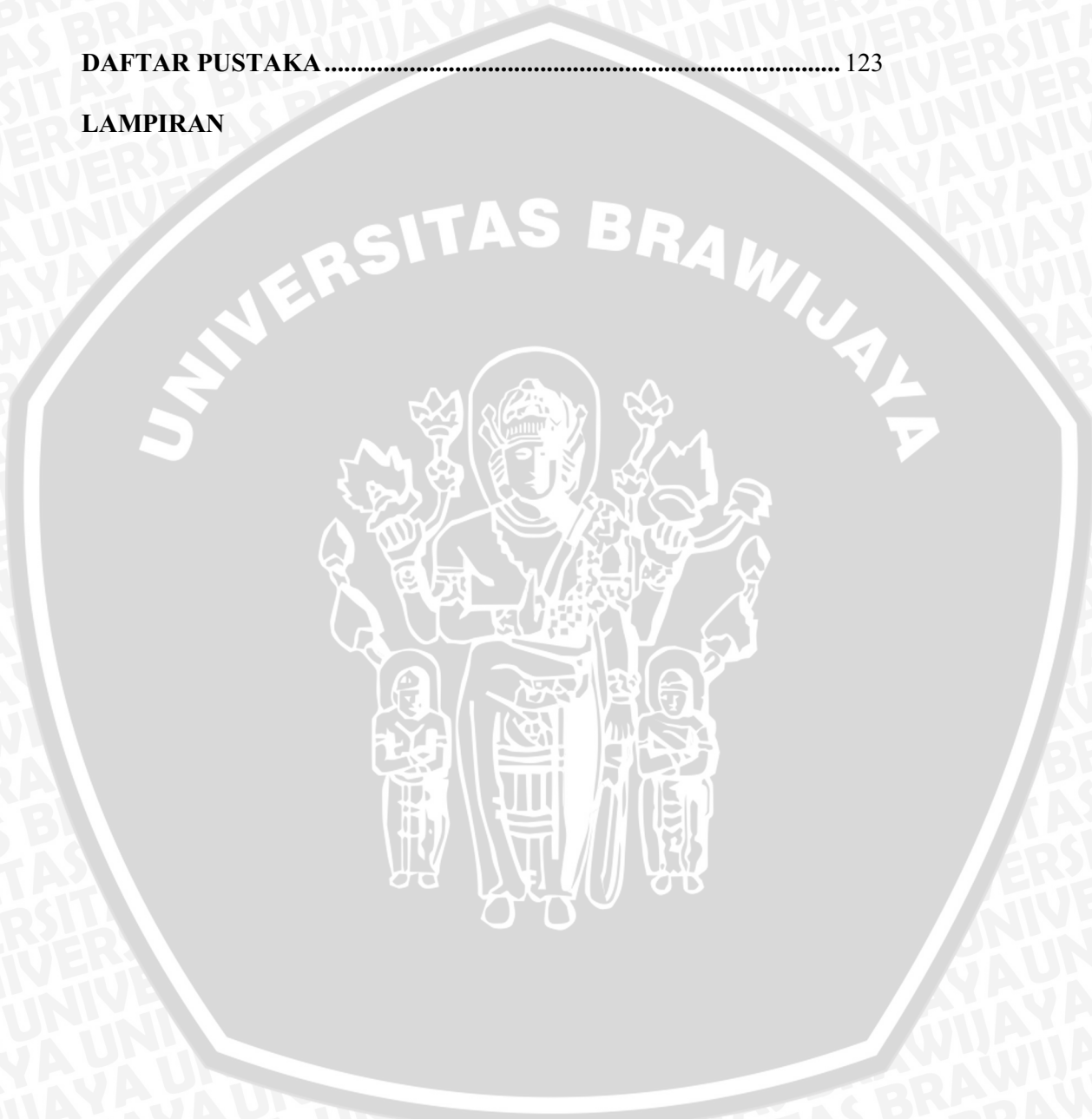
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Profil dan Status Lingkungan Kota Mojokerto	55
a. Keadaan Geografi.....	55
b. Visi dan Misi.....	59
2. Profil Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto	60
a. Motto, Visi dan Misi Organisasi	61
b. Susunan Organisasi	63
c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	64
3. Gambaran Umum Program Berseri (Bersih dan Lestari).....	76
a. Visi dan Misi Program Berseri.....	76
b. Maksud, Tujuan dan Sasaran Program Berseri.....	77
c. Prinsip dan Norma.....	79
B. Penyajian Data Penelitian.....	80
1. Evaluasi <i>Input</i>	80
2. Evaluasi <i>Process</i>	83
a. Strategi Pelaksanaan Program Berseri	83
b. Kriteria Penilaian Program Berseri	91
3. Evaluasi <i>Output</i>	99
4. Evaluasi <i>Outcome</i>	102
C. Analisis Data	105
1. Evaluasi <i>Input</i>	105
2. Evaluasi <i>Process</i>	109
a. Stategi Pelaksanaan Program Berseri.....	109
b. Kriteria Penilaian Program Berseri	111
3. Evaluasi <i>Output</i>	113
4. Evaluasi <i>Outcome</i>	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 118
B. Saran 120

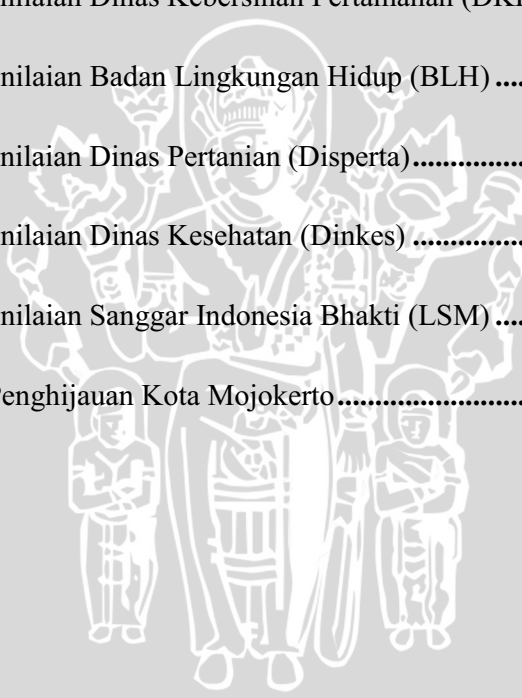
DAFTAR PUSTAKA 123

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Atribut Kota Hijau menurut UNUEA	39
Tabel 4.1	Penanganan Sampah Kota Mojokerto.....	82
Tabel 4.2	Susunan Keanggotaan Panitia Lomba Berseri Tahun 2015.....	90
Tabel 4.3	Bobot Penilaian Program Berseri.....	93
Tabel 4.4	<i>Passing Grade</i> Penilaian Program Berseri.....	94
Tabel 4.5	Lembar Penilaian Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP)	96
Tabel 4.6	Lembar Penilaian Badan Lingkungan Hidup (BLH)	96
Tabel 4.7	Lembar Penilaian Dinas Pertanian (Disperta).....	96
Tabel 4.8	Lembar Penilaian Dinas Kesehatan (Dinkes)	97
Tabel 4.9	Lembar Penilaian Sanggar Indonesia Bhakti (LSM)	97
Tabel 4.10	Kegiatan Penghijauan Kota Mojokerto.....	107



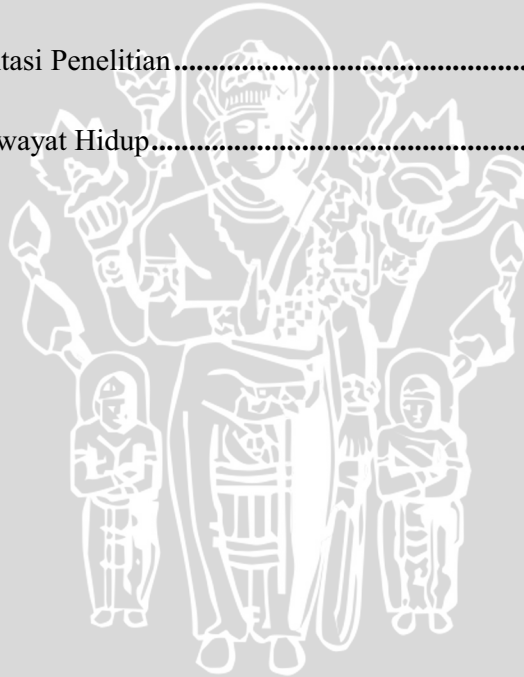
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase Kegiatan Manusia yang Dapat Merusak Lingkungan	3
Gambar 2.1 Kota Hijau berbasis <i>Green Growth</i>	37
Gambar 3.1 Analisis Data Menurut Miles dan Hubberman.....	54
Gambar 4.1 Peta Kota Mojokerto	55
Gambar 4.2 Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.....	63
Gambar 4.3 Tingkatan Proses Seleksi Program Berseri	86
Gambar 4.4 Matriks Hasil Penelitian	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Profil Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.....	126
Lampiran 2 Buku Panduan Program Berseri	138
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Riset.....	152
Lampiran 4 Keputusan Pengguna Anggaran Panitia Lomba Berseri.....	154
Lampiran 5 Form Lembar Penilaian	160
Lampiran 6 Pedoman Wawancara	164
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	171
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup.....	178



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup di daerah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup harus didukung atas kerjasama yang erat antar lembaga/instansi pemerintah, kultur maupun kependudukan masyarakat. Adanya berbagai permasalahan tentang lingkungan, membuat pemerintah giat menerapkan program yang berbasis penyelamatan lingkungan hidup. Pemerintah di Indonesia juga membuat beberapa program berbasis lingkungan yang bertujuan sebagai langkah awal atau upaya untuk menyelamatkan lingkungan hidup sedini mungkin. Hal inilah yang menjadi landasan dan tolak ukur untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Undang-undang mengenai Lingkungan Hidup dibahas di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 3 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berisi, *pertama*, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. *Kedua*, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. *Ketiga*, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelangsungan ekosistem. *Keempat*, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. *Kelima*, mencapai keserasiaan, keselarasan,

dan keseimbangan lingkungan hidup. *Keenam*, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. *Ketujuh*, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Kedelapan*, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. *Kesembilan*, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan *keseperuluh* adalah untuk mengantisipasi isu lingkungan global.

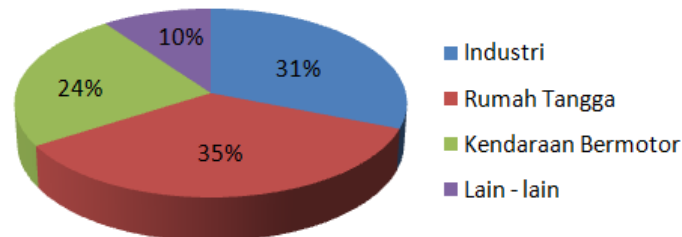
Pasal 65 poin IV UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam hal ini, pemerintah Kota Mojokerto juga diharapkan mampu untuk turut serta mengambil peran dalam pengelolaan lingkungan. Tidak hanya pemerintah yang wajib dan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan serta menjaga kualitas lingkungan namun semua elemen masyarakat. Maka dengan adanya UU tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup membuat suatu program yang berbasis lingkungan pada pelestarian lingkungan hidup.

Penyelamatan Lingkungan terhadap ancaman kerusakan dan kehancuran adalah akibat dari pembangunan berkelanjutan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan yang merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama. Ada beberapa permasalahan kondisi lingkungan seperti halnya: pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan karena berbagai aktivitas dilakukan oleh manusia tanpa menghiraukan adanya kelestarian lingkungan. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan

lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri.

Kegiatan masyarakat yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dapat mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada grafik dibawah ini.

Gambar 1.1 Presentase kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan.



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup 2009

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga masih merupakan sumber dominan yang dapat merusak keseimbangan lingkungan. Sebesar 35% dari seluruh limbah yang terdapat di Indonesia merupakan hasil dari kegiatan rumah tangga. Dengan demikian limbah rumah tangga masih merupakan sebuah ancaman besar bagi keseimbangan lingkungan hidup. Rumah tangga yang menghasilkan limbah tersebut umumnya berada di wilayah perkotaan (Wardani, 2009). Dalam kurun waktu 9 tahun pada tahun 1990-1999 terjadi pertumbuhan pesat perkotaan yang mencapai 4,4% per tahun. Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling luas perkotaannya, yaitu mencapai 65% dengan jumlah penduduk perkotaan mencapai 78 juta jiwa (URDI dalam Suyanto, 2005). Pertumbuhan yang terlampaui cepat ini tentunya mengakibatkan timbulnya berbagai macam masalah. Masalah yang muncul antara lain masalah sampah rumah tangga dan penyempitan lahan hijau.

Menurut Gustiantoro (2008), dari sebuah rumah tangga perkotaan dihasilkan sekitar 0,6 kg sampah setiap hari nya. Dengan jumlah sebesar ini, maka akan sangat menyusahkan apabila sampah rumah tangga tidak diurus dengan benar. Sampah merupakan salah satu masalah kompleks di negara-negara berkembang, khususnya di perkotaan. Sampah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga akan semakin menumpuk seiring dengan meningkatnya penambahan penduduk disetiap harinya.

Eksplotasi besar-besaran terhadap sumber daya alam juga dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan, apalagi didukung pertumbuhan penduduk yang bertambah pesat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingginya tingkat kerusakan alam pun akan meningkatkan resiko bencana alam. Kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah dari manusia. (Alamendah.org : 2014). Dari beberapa pemaparan masalah lingkungan hidup diatas, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan Hidup (PP 27/2012) sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).

Permasalahan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga menjadikan terbatasnya lahan. Problem terbatasnya lahan mengakibatkan lahan hijau semakin sedikit. Dengan semakin menyempitnya lahan hijau, maka daya absorpsi tanaman terhadap gas buang kendaraan bermotor, pembakaran

sampah dan efek yang dihasilkan oleh rumah kaca semakin kecil. Hal ini mengakibatkan kualitas rata-rata udara di perkotaan semakin hari semakin buruk. Oleh karena itu dengan berbagai macam masalah lingkungan ini, perwujudan lingkungan perkotaan yang sehat, hijau dan bersih semakin sulit.

Strategi yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto agar permasalahan lingkungan tidak menyebar dan semakin parah salah satunya melalui Program peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup atau ramah lingkungan (Berseri). Secara umum, “program” dapat diartikan sebagai “rencana”. Dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Program “Berseri” (Bersih dan Lestari) adalah salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini merupakan model pemberdayaan masyarakat dan aparat desa/kelurahan agar mau dan mampu menumbuh kembangkan potensi desa/kelurahan yang berperilaku ramah lingkungan. Program ini juga sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan di bidang lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat desa/kelurahan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang bersih, sehat, lestari dan asri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan insentif (rangsangan) dan desentif (pemberdayaan), yaitu pembinaan, fasilitasi dan pembentukan kader lingkungan dengan pendamping/pendekatan secara intensif. Sesuai dengan amanat

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12

Ayat 1 menyebutkan :

“Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.

Hal ini berarti diperlukan peran serta masyarakat dalam usaha menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, lestari dan asri.

Program “Berseri” diharapkan dapat mempercepat pencapaian Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur sesuai dengan RPJMD 2009-2014 (Peraturan Gubernur) Nomor 38 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*) serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Hijau. Melalui program “Berseri” ini diharapkan dapat mewujudkan desa/kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri. Disamping itu seluruh upaya yang telah dilaksanakan masyarakat perlu diinventarisasi dan terdata dengan baik agar dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian target pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan kapasitas adaptasi mulai lokal hingga nasional. Pemerintah Kota Mojokerto juga berperan aktif di dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup di lingkungan masyarakat karena dari situlah pemeliharaan lingkungan dimulai, yaitu ditanamkan dalam diri seluruh masyarakat Kota Mojokerto dari berbagai kalangan.

Untuk mendukung Program Berseri di Kota Mojokerto tentang pengembangan pendidikan lingkungan hidup, perlu adanya evaluasi didalam pelaksanaan Program Berseri di Kota Mojokerto. Hal ini bertujuan agar program

tersebut dapat terlaksana secara optimal, efisien, dan lebih baik didalam pelaksanaan kegiatannya. Menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2004), Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan ini didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standart tertentu yang telah dibakukan.

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Program Berseri di Kota Mojokerto, kendala internal maupun eksternal. Salah satunya adalah Pemerintah kurang dalam partisipasi penanaman pohon dan pengadaan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan Kota Mojokerto semakin panas dengan seiring bertambahnya polusi kendaraan bermotor. Banyaknya pencemaran limbah hasil kegiatan rumah tangga dan industri, banjir, pembangunan-pembangunan perkotaan dan permasalahan lingkungan lainnya yang dapat memperparah kondisi lingkungan di masa yang akan datang. Dengan adanya kendala dalam proses kegiatan program tersebut, pelaksanaan Program Berseri kurang dapat berjalan secara optimal. (Sumber Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto) Apabila dirasakan terjadi penyimpangan dengan berbagai permasalahan atau isu lingkungan seperti halnya permasalahan banjir, polusi, kebakaran hutan, limbah hasil produksi rumah tangga, limbah rumah sakit serta limbah industri, maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu untuk penyempurnaan serta mampu mengevaluasi kegiatan Program Kota Berseri. Dengan harapan dapat menjadi pedoman masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan

sehat dan hijau. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat judul **“Evaluasi Program “Berseri” Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan *Green City*” (Studi di Kota Mojokerto).**

B. Rumusan masalah

Pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat menjawab tentang permasalahan lingkungan hidup yang ada termasuk dalam hal ini adalah masalah pengelolaan dan kelestarian lingkungan di Mojokerto yang kini mulai diacuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian yang di jelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Evaluasi Program “Berseri” sebagai upaya untuk mewujudkan *Green City* di Kota Mojokerto ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan di atas, maka kajian ini ditunjukkan untuk :

Untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi Program “Berseri” sebagai upaya untuk mewujudkan *Green City* di Kota Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai bahan kajian dalam studi Ilmu Administrasi Publik dalam bidang pembangunan berwawasan lingkungan.
- b. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dan belajar menganalisis permasalahan yang muncul di masyarakat.

- c. Sebagai kontribusi referensi dan sumbangan informasi komprehensif bagi peneliti yang berkaitan dengan program kegiatan pengelolaan berbasis atau peduli dengan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Kota Mojokerto termasuk instansi terkait didalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Dapat mendorong seluruh elemen masyarakat serta jajaran pemerintahan untuk dapat lebih berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang merupakan rangkaian antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan masalah-masalah lingkungan karena kurangnya strategi program yang telah diadakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan dan koordinir program kegiatan berbasis lingkungan.

Bab ini terbagi dalam sub - sub bab, yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau apa yang digunakan

dalam penelitian, yaitu teori yang berkaitan dengan Administrasi Publik, Konsep Program, Evaluasi Kebijakan Publik, Lingkungan Hidup, *Green City*, serta *Good Environmental Governance*.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, fokus penelitian, lokasi penelitian atau situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan metode analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang di dalamnya menguraikan dan membahas gambaran umum lokasi penelitian yaitu, gambaran umum Kota Mojokerto dan Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto yang menyangkut permasalahan tentang bagaimana Implementasi Program Berseri di Kota Mojokerto serta mengevaluasi program tersebut untuk mewujudkan *Green City*.

Bab V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman hasil penelitian secara garis besar mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat di Kota Mojokerto dalam pelaksanaan Program “Berseri”, sedangkan saran merupakan masukan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dalam pelaksanaan Kebijakan Program Kota Berseri

sebagai upaya perwujudan *Green City* di Mojokerto untuk menjadikan Kota Mojokerto Bersih dan Sehat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Secara etimologis konsep administrasi yang dalam bahasa Inggrisnya *Administration*, dalam sebuah kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English* (1994), disebutkan bahwa *to administer* diartikan *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan). Pada zaman Romawi, tugas dari seorang pemilik harta kekayaan untuk mengurus semua harta kekayaan berikut pegawainya. Tugas tersebut apabila dikelompokkan secara fungsional meliputi tugas *administrare* (menyelenggarakan tata usaha untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan) dan tugas *administrator* (memimpin dan mengendalikan personel). Tinjauan secara etimologis dan historis ini tampaknya sepadan dengan makna administrasi dalam arti luas.

Inventarisasi yang dilakukan oleh The Liang Gie (1972) ternyata dari Indonesia saja paling tidak terdapat 29 pendapat yang menyatakan bahwa administrasi merupakan proses (administrasi dalam arti luas), 15 pendapat yang menyatakan administrasi sama dengan tata usaha, dan ada beberapa yang menyatakan bahwa administrasi merupakan administrasi Negara atau pemerintahan. Sebenarnya, disamping 3 (tiga) klasifikasi tersebut masih ada satu kategori lagi, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa administrasi sama dengan manajemen.

Administrasi maupun manajemen merupakan suatu kegiatan. Walaupun keduanya merupakan suatu kegiatan namun keduanya berbeda. Perbedaan

pertama terletak pada tingkatannya dalam organisasi, dimana administrasi berbeda dalam tingkat perumusan kebijaksanaan. Perbedaan kedua terletak pada keluasan ruang lingkupnya. Manajemen merupakan salah satu sarana atau unsur dari administrasi, yang menurut Siagian (1977), disebutkan sebagai unsur dinamis dari administrasi.

Proses atau kegiatan administrasi oleh Siagian (1977) diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie (1978) mengartikan administrasi sebagai segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan unsur administrasi meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, tata hubungan atau informasi, tata usaha, kepegawaian, keuangan, pembekalan dan Humas/Perwakilan.

Penjabaran mengenai definisi administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi mempunyai arti suatu kegiatan kerjasama dari kelompok pemerintah yang dilakukan secara berencana dengan mengoptimalkan sumber daya guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Didalam administrasi publik mengatur berbagai hal, salah satunya adalah program pemerintah. karena didalam program kebijakan akan dilaksanakan oleh administrasi publik yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik.

Fokus utama program pemerintah dalam negara modern adalah administrasi publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun bentuk jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung

jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Suatu program pemerintah yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik sebagai cara untuk meningkatkan kehidupan suatu masyarakat dengan keterbatasan kemampuan sumber daya publik dan lembaga sesuai dengan anggaran serta kemampuan teknis suatu program kebijakan. Dalam kajian teori program membutuhkan adanya kegiatan administrasi publik yang berjalan dengan baik dengan adanya campur tangan antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai.

B. Konsep Evaluasi Program

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen yang dimana meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosakata dengan bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu "*evaluation*" yang berarti penilaian dan penaksiran (Arikunto dan Jabar 2008:27). Sedangkan menurut (Yunanda, 2010:65) pengertian istilah "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan". Evaluasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "*evaluation*" yang diserap dalam pembendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan

sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif.

Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount of value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan (Arikunto, 2010:18).

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat dalam (Arikunto dan Jabar, 2008:3) bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh (Griffin dalam Tilaar & Nugroho, 2008:69) menyatakan :

“Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil dengan kriteria, penilaian (*assessment*) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.

Lebih lanjut menurut (Sudjana dalam Dimiyati dan Mudjiono, 2006:191), “dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu”. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkan dengan kriteria. Dengan demikian, evaluasi tidak serta merta melalui proses mengukur kemudian melakukan proses penilaian tetapi dapat dilakukan dengan melakukan penilaian langsung. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan (Crawford dalam Dimiyati dan Mudjiono, 2006:191) mengartikan bahwa “penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui atau sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang telah dicapai oleh suatu program tersebut. Ada dua konsep keberhasilan yang terdapat di dalam suatu program, yaitu efektifitas dan efisiensi dari program tersebut. (Echols dan Shadily, 2000:76) memaparkan bahwa “efektifitas merupakan perbandingan antara *output* dan *input* nya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan *input* untuk menghasilkan *output* suatu proses”.

2. Pengertian Program

Pengertian program menurut berbagai tokoh :

- a. Menurut Hogwood dan Gunn, program adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan atau legitimasi, pengorganisasian dan pengarahan atau penyediaan sumber-sumber yang diperlukan (Abdul Wahab, 2008: 17).
- b. Program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas (Tjokroamidjoyo, 1990:195-196).
- c. Pada dasarnya, kebijakan dan program sulit dibedakan. Perbedaan antara kebijakan dan program dinyatakan secara tidak langsung bahwa implementasi kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program dan tergantung pada hasilnya. Selain itu program desain sedemikian rupa sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan kebijakan lebih luas (Ekowati, 2009:26).
- d. Menurut (Anonim : 2013) bahwa program merupakan bentuk operasional dari kebijakan. Dimana suatu program harus disusun secara jelas dan jika masih bersifat umum, program tersebut harus diterjemahkan terlebih dahulu secara operasional menjadi sebuah proyek. Sebuah program dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa program merupakan bagian dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah demi kepentingan bersama. Dalam suatu program pemerintah terdapat beberapa program yang dibuat untuk menangani adanya permasalahan-permasalahan publik antara lain yaitu permasalahan lingkungan. Adanya permasalahan lingkungan yang kerap menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti halnya permasalahan sampah, banjir, pemanasan global akibat rumah kaca dll. Hal ini menyebabkan pemerintah lebih giat untuk membuat dan melaksanakan adanya kebijakan publik dengan adanya evaluasi kebijakan publik sebagai tolak ukur untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kebijakan tersebut.

3. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu yang sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan. (Tyler, 1950 dalam Arikunto, 2010:38) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan dari program sudah dapat terealisasi. Sedangkan (Cronbach dan Stufflebeam dalam Arikunto, 2010:78) evaluasi program adalah upaya untuk menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. (Arikunto dan Jabar, 2008:14) evaluasi program adalah proses

penetapan secara sistematis dengan nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi program dapat menunjukkan pencapaian kinerja suatu program pemerintah selama masa implementasi program. Evaluasi program setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis program tersebut. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan adalah dengan melihat sejauh mana kesesuaian antara program dan kegiatannya. Bagi instansi pemerintah, evaluasi yang dilakukan harus merujuk pada indikator kinerja yang telah ditetapkan baik *input*, *proses*, *output*, *outcome*, dan *impact*.

Suatu evaluasi program diperlukan suatu kerangka evaluasi. Kerangka evaluasi mengatur variabel evaluasi menjadi tiga variabel yaitu *input* program, *proses* dan *output* program.

1) *Input* program

Variabel *input* memasukkan sub-sub variabel yang merefleksikan definisi dan menjelaskan masalah awal, faktor-faktor luar program dan beberapa isu dalam implementasi. Variabel-variabel melingkupi semua hal yang mungkin mempengaruhi penyampaian atau pelayanan program dan efektifitas program dalam implementasinya. Variabel *input* dibagi menjadi dua sub variabel yaitu karakteristik klien dan karakteristik program. Karakteristik klien diklasifikasikan kepada tiga kategori yaitu karakteristik personal, karakteristik permasalahan dan

sumber daya yang tersedia untuk klien. Sedangkan karakteristik program berisi tentang penjelasan program dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyampaian program. Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2010:127), evaluasi *input* (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan.

2) *Process* program

Variabel *process* mengoperasikan elemen-elemen dari teori program seperti proses berjalannya program dan isu-isu yang terjadi dalam implementasi program. Variabel *process* terdiri dari proses dalam penyampaian program agar mendapatkan hasil yang diinginkan kemudian merepresentasikan implementasi aktual. Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2010:127), evaluasi proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*).

3) *Output* program

Output merefleksikan pencapaian hasil yang diinginkan dari data dan teori program. *Output* menjelaskan tentang hasil akhir dari program tersebut. Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2010:127), evaluasi *output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik.

4) *Outcome Program*

Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2010:127)

Evaluasi *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan.

C. Lingkungan Hidup

1. Definisi Lingkungan Hidup

Supardi (2003:2) mengemukakan lingkungan juga disebut lingkungan hidup yang berarti jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati. Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari lingkungan hidup tidak sesempit yang kita kira. Lingkungan hidup disini berarti segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia yang sifatnya mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009, tentang Ketentuan Pokok Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan beberapa konsep/ batasan lingkungan hidup, yaitu :

- a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;

- b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- c. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup tersebut sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

2. Jenis-jenis Lingkungan

Menurut Sukmana (2003: 21-23) lingkungan dapat dibedakan kedalam dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik (lingkungan sosial), dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Lingkungan

Lingkungan fisik adalah lingkungan yang berupa alam. Misalnya keadaan tanah, keadaan musim, dan sebagainya. Lingkungan alam yang berbeda akan

memberi pengaruh yang berbeda pula kepada individu, Lingkungan fisik dapat dibedakan menjadi lingkungan fisik alami dan lingkungan fisik buatan.

1) Lingkungan fisik alami

Lingkungan ini merupakan segala sesuatu yang berbeda di luar manusia sebagai ciptaan Tuhan, bukan ciptaan atau buatan manusia. Lingkungan fisik alami seperti; gunung, laut, sungai, hutan, panas, matahari, dan sebagainya.

2) Lingkungan fisik buatan

Lingkungan fisik buatan adalah segala sesuatu yang berbeda di luar diri manusia sebagai hasil ciptaan atau buatan manusia, misalnya lingkungan rumah susun, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan dan sebagainya. Benda-benda yang terdapat dalam lingkungan buatan adalah sengaja dibentuk oleh manusia untuk menimbulkan situasi dan kondisi tertentu (misalnya lingkungan perumahan yang nyaman, lingkungan pendidikan yang kondusif, dsb).

b. Lingkungan Non Fisik (Lingkungan Sosial)

Lingkungan Non Fisik (lingkungan sosial) adalah lingkungan masyarakat dalam suatu komunitas tertentu di mana di antara individu dalam masyarakat tersebut terjadi interaksi. Lingkungan sosial akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku manusia. Lingkungan sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1) Lingkungan Sosial Primer

Lingkungan sosial primer adalah di mana terdapat hubungan yang sangat erat antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, anggota yang satu mengenal anggota lainnya. Karena di dalam lingkungan sosial primer sudah saling

mengenal dan memiliki hubungan yang erat, maka lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku individu (misalnya: lingkungan keluarga, kelompok agama, kelompok bermain, kelompok belajar dsb).

2) Lingkungan Sosial Sekunder

Lingkungan sosial sekunder adalah lingkungan sosial yang hubungan antara anggotanya tidak begitu erat (longgar) dan tidak saling mengenal dengan baik (misalnya: partai politik, kelompok profesi, lingkungan keluhuran, dsb).

3. Hubungan Individu dengan Lingkungannya

Menurut Woodworth, seperti yang dikutip oleh Sukmana (2003: 23-24), bahwa pada dasarnya terdapat empat jenis hubungan antara individu dan lingkungannya, yaitu :

- a. Individu dapat bertentangan dengan lingkungannya;
- b. Individu dapat menggunakan lingkungannya;
- c. Individu dapat berpartisipasi (ikut serta) dengan lingkungannya,
- d. Individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Keempat jenis hubungan individu dengan lingkungan tersebut dijelaskan oleh Sardjoe, seperti dikutip oleh Sukmana (2003: 24-25) sebagai berikut:

1) Individu menentang lingkungan

Untuk menjaga kelestarian atau kelangsungan hidupnya, individu dengan sangat terpaksa harus menentang atau melawan lingkungan yang mungkin dapat mengganggu bahkan dapat membahayakan hidupnya. Individu akan mempertahankan dari berbagai ancaman dan gangguan lingkungan. lebih jauh lagi individu akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa merubah lingkungan sesuai

kepentingan atau kehendaknya agar dirinya mencapai kebahagiaan, kenyamanan dan ketentraman dalam hidupnya.

2) Individu memanfaatkan lingkungan

Di samping individu menentang lingkungannya, individu juga dapat memanfaatkan lingkungannya. Hal ini dapat terjadi karena lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang positif seperti bermacam-macam makanan, minuman, kayu, dan sebagainya. Individu dapat mengambil manfaat dari benda-benda yang berada di sekitar lingkungan tempat individu berada.

3) Individu berpartisipasi (ikut serta) dengan lingkungan

Lingkungan tidak selamanya bersifat statis, namun juga bisa bersifat dinamis dalam suatu proses yang berubah-ubah. Dengan kata lain, lingkungan melalui suatu proses tertentu dapat dirubah atau dibentuk oleh manusia. Individu bisa ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungannya.

4) Individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya

Dalam hubungan ini individu kadang-kadang harus mengubah lingkungannya untuk kepentingan dirinya sendiri atau merubah dirinya sendiri sesuai tuntutan lingkungan tempat individu berada. Bentuk penyesuaian yang pertama disebut *auto plastis* (*auto = sendiri, plastis = dibentuk*) dan bentuk yang kedua disebut *alloplastis* (*allo = yang lain*). Jadi penyesuaian diri dapat bersifat pasif apabila kegiatan itu ditentukan oleh lingkungan dan dapat bersifat aktif apabila lingkunganlah yang dipengaruhi.

Dari kesimpulan di atas dapat di simpulkan bahwa lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia termasuk semua benda, daya,

keadaan dan perilaku yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan yang menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki dua jenis, yaitu : lingkungan fisik dan alami dan lingkungan fisik buatan.

4. Permasalahan Lingkungan Hidup

Mengkaji permasalahan lingkungan hidup sepanjang sejarah hidup manusia, maka dapatlah ditarik benang merah yang saling terkait antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Supardi (2003: 144) menyatakan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia meliputi :

1.) Kepadatan penduduk dan kemelaratan.

Apabila kita perhatikan terjadinya kepadatan penduduk di Indonesia, ditandai oleh beberapa karakteristik :

- a) Laju pertumbuhan penduduk yang besar dan cepat
- b) Penyebaran penduduk yang tidak merata
- c) Komposisi penduduk menurut umur
- d) Arus urbanisasi yang tinggi

2.) Pencemaran lingkungan hidup oleh proses pembangunan.

Hal lain yang juga menjadi permasalahan lingkungan hidup adalah polusi.

Menurut Supardi (2003: 28) polusi adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan terganggunya kesehatan dan ketenangan hidup makhluk hidup (termasuk manusia). Polusi

tersebut terdiri dari polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik industry, polusi suara, polusi radiasi, serta polusi air dan polusi tanah akibat detergen, zat kimia dari pabrik, pupuk, dsb.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah dinyatakan dalam berbagai kemauan politik (*goodwill*) pemerintah berupa berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Tetapi karena adanya keterbatasan sumber dana dan hambatan sosial-politik, kultural, dan sumber daya lainnya, maka pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat marginal. Faktor yang mempengaruhi marginalisasi pengelolaan lingkungan hidup adalah kerumitan masalah lingkungan dan penegak hukumnya.

Faktor pertama, berupa kerumitan masalah lingkungan di Indonesia dicirikan oleh jumlah penduduk yang tinggi, dengan penyebaran yang tidak merata. Adanya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan, membuat sebagian besar penduduk sulit memahami konsep pelestarian lingkungan hidup. Faktor kedua, disebabkan karena kurangnya koordinasi dan integrasi pengelolaan lingkungan hidup, tujuan dan sasaran program pembangunan nasional, baik antara daerah, dunia usaha maupun masyarakat luas. Faktor ketiga, adalah terbatasnya mandat kelembagaan. Apabila masalah pengelolaan lingkungan hidup belum diinternalisasikan disemua bidang, maka masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akan terus timbul. Untuk mengatasinya, masalah mandat lembaga lingkungan hidup perlu dipertegas dengan kewenangan penuh dari pemerintah yang didukung alokasi dan SDM yang memadai serta struktur organisasi yang solid.

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, diperlukan adanya strategi dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Pasal 3 UU No.32 tahun 2009 menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup tersebut dilaksanakan dengan azas tanggung jawab negara, azas berkelanjutan dan azas manfaat demi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup tersebut menurut Supardi (2003: 171) meliputi :

a. Pengelolaan sumber daya alam.

Meliputi beberapa upaya yang dilakukan secara terpadu dan bertahap, seperti : kegiatan pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan.

b. Pengelolaan lahan.

Pengelolaan lahan disini termasuk pengelolaan lahan pertanian, pengelolaan tanah untuk pemukiman maupun industry. Strategi pengelolaan lahan tersebut meliputi :

- 1) Memperoleh hasil atau produksi maksimum dari setiap unit lahan,
- 2) Memilih tata cara pengelolaan lahan yang member keuntungan maksimum,

- 3) Menekan sekecil mungkin ketidakmanfaatan kondisi lahan potensial sehingga dapat meningkatkan hasil maksimum,
- 4) Mencegah menurunnya potensi lahan potensial.

c. Pengelolaan Hutan.

Menggunakan pola pengelolaan *agroforestry*, meliputi kegiatan :

- 1) Meningkatkan produktifitas lahan hutan secara keseluruhan antara produktivitas hutan dengan produktivitas bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
- 2) Mengatasi sempitnya lahan pertanian.
- 3) Pemerataan penduduk ke daerah pinggiran hutan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

d. Pengelolaan air.

Pengelolaan air meliputi strategi sebagai berikut :

- 1) Melindungi perairan agar terjaga kebersihannya sehingga dapat menjaga kelangsungan flora dengan menjaga perakaran tanaman dari gangguan fisik maupun kimiawi.
- 2) Mengusahakan cahaya matahari dapat menembus dasar perairan, sehingga proses fotosintesis dapat berjalan dengan lancar.
- 3) Menjaga agar fauna mangsa dan produsen selalu seimbang dengan mempertahankan rantai makanan.
- 4) Mempergunakan sumber daya air seefisien mungkin.

e. Pengelolaan tanah.

Usaha untuk mencegah pencemaran tanah terdiri meliputi :

- 1) Untuk menangani sampah plastik, maka harus dibakar dulu sebelum dibuang.
- 2) Limbah yang mengandung bahan radioaktif hendaknya dibiarkan terlebih dahulu dalam waktu lama sebelum dibuang.
- 3) Sampah radioaktif yang berbentuk padat harus dibungkus dengan bahan dari pb untuk menahan sinar radioaktif, lalu dimasukkan dalam bola antikarat sebelum dibuang.
- 4) Pembuangan sampah berbahaya dilakukan ke dasar laut pulau karang kosong, atau ke dalam sumur yang dalam dan jauh dari pemukiman penduduk.

f. Pengelolaan udara.

- 1) Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemari lingkungan.
- 2) Melakukan penyaringan asap sebelum dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan.
- 3) Penurunan suhu sebelum gas dibuang ke udara bebas.
- 4) Membangun cerobong asap yang cukup tinggi.
- 5) Menghemat bahan bakar dan pemakaian angkutan pribadi.
- 6) Memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi.

g. Pengelolaan sumber daya manusia

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan selain dengan menghilangkan atau memperkecil resiko penularan, masyarakat dapat diberikan sekedar ganti rugi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting, agar manusia dapat menerapkan prinsip dan konsep pokok ekologi di dalam lingkungan hidup.

Lingkungan seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia untuk tercapainya keselarasan hidup manusia dengan lingkungannya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara baik dengan adanya pembinaan pada kelestarian lingkungan hidup, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan akan datang serta terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan lingkungan yang dapat menyebabkan adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Lingkungan hidup perlu adanya pengertian didalam konsep Kota Hijau (*Green City*)

Suatu lingkungan yang sehat, indah, bersih, asri dan baik didalam penataan kotanya maka selalu berkaitan dengan konsep Kota Hijau (*Green City*). *Green City* dapat terwujud jika masyarakat yang tinggal di dalamnya melakukan penghematan (minimalisasi) pemanfaatan energi dan air pada lingkungan. Selain itu juga melakukan minimalisasi buangan penyebab panas, serta melakukan

pengecahan pencemaran air dan udara agar tidak merusak kelestarian pada lingkungan hidup.

D. Green City

1. Definisi Green City

Konsep *Green City* atau kota hijau muncul pertama kali dalam pertemuan PBB yang dihadiri lebih dari 100 walikota dan gubernur di San Fransisco, Amerika Serikat, pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2005. Pertemuan tersebut, diantaranya melahirkan kesepakatan bersama mewujudkan pengembangan kota dengan konsep 'kota hijau'. Kota hijau merupakan kota yang ramah lingkungan, dalam hal pengefektifan dan mengefisiensikan sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan lingkungan, dan mampu mensinergikan lingkungan alami dan lingkungan buatan, yang berdasarkan perencanaan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi).

Menurut Wildsmith (2009), *green city* (kota hijau) juga dapat disebut *sustainable city* (kota yang berkelanjutan) atau *eco-city* (kota berbasis ekologi), yaitu kota yang dalam melaksanakan pembangunan didesain dengan mempertimbangkan lingkungan sehingga fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan. *Green city* dapat terwujud jika masyarakat yang tinggal di dalamnya melakukan penghematan (minimalisasi) pemanfaatan energi dan air. Selain itu juga melakukan minimalisasi buangan penyebab panas, serta melakukan pencegahan pencemaran air dan udara. Selain elemen-elemen tersebut Wildsmith

(2009) juga menambahkan elemen sosial dan budaya. Sehingga *green city* merupakan kota yang melakukan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi sehingga tercipta keseimbangan diantara manusia dan alam.

Mori dan Christodoulou (2011), mengartikan kota hijau sebagai kota berkelanjutan. Yang dimaksud dengan kota berkelanjutan adalah sebuah kota yang dalam melakukan pembangunan berasaskan keadilan antara generasi saat ini dengan generasi yang akan datang. Pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Seperti halnya Wildsmith (2009), Mori dan Christodoulou (2011) juga mensyaratkan keseimbangan biofisik, sosial dan ekonomi yang berkeselimbangan dalam pelaksanaan pembangunan kota berkelanjutan.

Roseland (1997) mendefinisikan *green city* sebagai *eco-city*, yaitu kota yang berbasis ekologi dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Merevisi penataan penggunaan lahan agar menjadi lebih memperhatikan kebutuhan akan ruang terbuka hijau dan kenyamanan di pusat-pusat permukiman dan area dekat transportasi,
2. Perlu memperhatikan kebutuhan transportasi ramah lingkungan,
3. Merehabilitasi lingkungan perkotaan yang rusak (sungai, pantai, lahan basah),
4. Mendukung kegiatan penghijauan, pertanian masyarakat lokal,
5. Sosialisasi daur ulang limbah, teknologi inovatif tepat guna,

6. Menciptakan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan pada wanita dan orang cacat untuk berperan serta menikmati pembangunan,
7. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekologi yaitu dengan menurunkan limbah dan polusi, serta menggunakan bahan baku yang tidak berbahaya bagi lingkungan,
8. Mensosialisasikan penghematan pemanfaatan sumberdaya alam,
9. Meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan melalui kegiatan pendidikan lingkungan.

2. Konsep *Green City*

Adapun mengenai konsep kota hijau adalah perlunya pemerintah memanfaatkan energi matahari, udara dan air untuk mewujudkan *green building* dan *green businnes* pada proyek-proyek restorasi lingkungan kota, pertamanan kota dan penghijauan kota. Secara individu penduduk kota diharapkan juga memiliki kebiasaan menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan berbahan bakar non fosil. Menurut Michael Lindfield and Florian Steinberg (*Green City*, 2012), konsep *Green City* antara lain :

- a. Strategi pengembangan tata ruang dan teknologi kota hijau
- b. Strategi energi untuk kota hijau
- c. Transportasi untuk kota hijau
- d. Pengelolaan air untuk masa depan kota hijau
- e. Pengelolaan limbah kota hijau

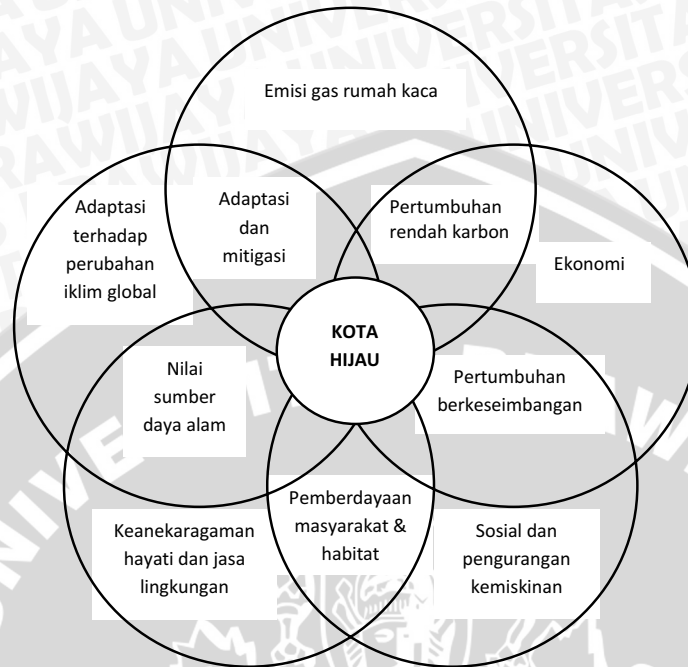
Kota Hijau merupakan metafora dari Kota Berkelanjutan atau Kota Ekologis yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Kota Hijau dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 2) Kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan, serta meminimalisir buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air.
- 3) Kota yang mengutamakan keseimbangan ekosistem hayati, dengan lingkungan terbangun sehingga tercipta kenyamanan bagi penduduk kota yang tinggal didalamnya maupun bagi para pengunjung kota.
- 4) Kota yang dibangun dengan menjaga dan memupuk aset-aset kota-wilayah, seperti aset manusia dan warga yang terorganisasi, lingkungan terbangun, keunikan, dan kehidupan budaya, kreativitas dan intelektual, karunia sumber daya alam, serta lingkungan dan kualitas prasarana kota.

3. Pembangunan Kota Hijau Berbasis *Green Growth*

Salah satu cara untuk mewujudkan kota hijau adalah dengan melakukan pembangunan berkelanjutan yang saat ini dikenal dengan pembangunan berbasis *green growth*. *World Wide Fund for Nature* dan *Pricewaterhouse Coopers* (2011), mendefinisikan *green growth* sebagai sebuah konsep pembangunan yang dilaksanakan dengan mengupayakan keseimbangan ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan hidup. Konsep pembangunan berbasis *green growth* menurut *World Wide Fund for Nature* (WWF) dan *Price Waterhouse Coopers* (PWC), dilaksanakan berdasar pada lima pilar penting berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Perbaikan kondisi sosial
- c. Konservasi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan
- d. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global
- e. Penurunan emisi gas rumah kaca.



Gambar 2.1 Kota Hijau berbasis *Green Growth*

Sumber : *World Wide Fun* (WWF) dan *Pricewaterhouse Coopers* (PWC : 2011).

Pembangunan Kota Hijau berbasis *Green Growth* erat kaitannya dengan elemen-elemen pendukung yang lain seperti yang tertera pada gambar 2.1 diatas. Sektor ekonomi sangat penting dalam menggerakkan pembangunan perkotaan. Ekonomi yang sehat akan meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya harus ditingkatkan. Selain sektor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat, yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya memberikan harga (*value*) tinggi pada sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada.

Sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Keanekaragaman hayati vegetasi ruang terbuka hijau mempunyai jasa lingkungan

melalui perannya dalam mengabsorpsi dan mengadsorpsi berbagai polutan udara, memperbaiki iklim mikro perkotaan, meningkatkan estetika lingkungan, mengurangi kebisingan (Dahlan 2004). Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya alam dan jasa lingkungan serta perbaikan habitat di perkotaan. Agar sebuah kota dapat melakukan pembangunan berkelanjutan, maka selain melakukan perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, juga harus meningkatkan kemampuan adaptasi kota tersebut terhadap perubahan iklim global. Penurunan emisi gas rumah kaca harus dimasukkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota berbasis karbon rendah.

4. Atribut *Green City*

Beberapa literatur yang dapat digunakan untuk menentukan atribut dari Kota Hijau, diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Platto ada 5 atribut dari Kota Hijau :

- a. Kepekaan dan kepedulian masyarakat
- b. Beradaptasi terhadap karakteristik bio-geofisik kawasan
- c. Lingkungan yang sehat, bebas dari pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan
- d. Efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dan ruang
- e. Memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan

Kurokawa menjelaskan 5 atribut terkait dengan Kota Hijau, yaitu :

1. Menciptakan suatu jejaring Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota/wilayah

2. Menghindari/mengendalikan *urban sprawl* (ekspansi penduduk kota beserta aktivitasnya ke kawasan pinggiran yang mengakibatkan peralihan fungsi lahan dari pertanian ke perkotaan)
3. Pengembangan usaha untuk mengurangi sampah dan limbah serta pengembangan proses daur ulang (*reduce, reuse, recycle*)
4. Pengembangan sumber energi alternatif (misalnya: biomas, matahari, angin, ombak)
5. Pengembangan sistem transportasi berkelanjutan (misalnya: pembangunan fasilitas pedestrian dan jalur sepeda, dsb)

Tabel 2.1 Atribut Kota Hijau menurut UNUEA

Atribut Kota Hijau menurut United Nations Urban Environmental Accords (UNUEA)		
a.	Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi Energi • Energi Terbarukan • Perubahan Iklim
b.	Pengurangan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Limbah • Peningkatan Tanggung Jawab Produsen • Tanggung Jawab Konsumen
c.	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi Umum • Mobil Bersih • Pengurangan Kemacetan
d.	Urban desain	<ul style="list-style-type: none"> • Green Building • Perencanaan Kota • Green Jobs
e.	Urban Nature	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Terbuka Hijau • Restorasi Habitat • Konservasi Cagar Alam
f.	Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan Bahan Beracun • Udara Bersih
g.	Air	<ul style="list-style-type: none"> • Akses Air Bersih • Konservasi Sumber Air • Pengurangan Limbah

Sumber : United Nations Urban Environmental Accords (UNUEA), 2011

Green city merupakan frase yang sering digunakan dalam mengangkat isu ekologis ke dalam konsep perencanaan kota yang berkelanjutan dan perwujudan *green city* merupakan tantangan ke depan dalam pembangunan perekonomian yang berkelanjutan (Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam *keynote speech Green Cities*).

E. *Good Environmental Governance*

1. Definisi *Good Governance*

Good governance diistilahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Islamy, 2003:68). *Good governance* adalah merupakan dasar, syarat dan landasan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dikatakan baik, sebab *good governance* mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Menurut Santosa yang dikutip oleh Akadun (2009), sebuah *governance* dikatakan baik (*good*) apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, menurut Keraf yang dikutip oleh Akadun (2009) mengartikan *good governance* sebagai adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan baik.

Dilihat lebih jauh bahwa perangkat kelembagaan itu mencakup adanya birokrasi yang bersih dan efisien, adanya *legislative* yang aspiratif dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat serta menjadi kontrol yang baik dan konstruktif bagi birokrasi pemerintah, adanya sistem penegakan hukum yang dapat di percaya termasuk di dalamnya aparat penegak hukum yang mempunyai integritas yang

baik, serta adanya masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan warga serta mengontrol lembaga pemerintah. Termasuk juga di dalamnya adalah adanya distribusi kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol secara konstruktif.

Kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai-nilai yang menunjang keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan keinginan rakyat dalam pencapaian tujuan yang di harapkan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. (Akaduan, 2009: 150).

Menurut Manalu (2010:3), dalam *Jurnal pendayagunaan E-government untuk mendukung pemerintahan yang baik (Good Governance) pada institusi pemerintah daerah*.

“good governance is good governance. There are three elements involved in governance, namely governance, business and society. All three relations must be in a position parallel to and control each other to avoid the domination or exploitation by one component to another component. If one component is higher than other component, there will be a dominant power over the two other component”.

Bahkan *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik. Ada tiga komponen yang terlibat di dalam *governance*, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling control untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari komponen yang lain, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa *good governance* atau pemerintahan yang baik merupakan dasar, syarat dan landasan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang baik sesuai dengan prinsip atau norma didalam suatu pemerintahan dengan menunjang kepentingan rakyat dengan adanya pembangunan-pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan untuk pencapaian suatu tujuan yang diharapkan. Didalam *Good Environmental Governance* membutuhkan suatu *Good Governance* (pemerintahan yang baik) untuk suatu acuan prosedur alam mengelola lingkungan dengan baik sebagai penunjang keberhasilan suatu negara atau faktor pendukung didalam suatu organisasi.

2. Definisi *Good Environmental Governance*

Menurut Anwar (2009:4) *Good Environmental Governance* adalah organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan baik. Disini faktor internal yang di gunakan untuk menghitung dan menilai modal, keuntungan, perencanaan, pelaksanaan dan kinerja pembangunan ekonomi dengan baik. *Good Environmental Governance* mencakup organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan baik dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, untuk membentuk *Good Environmental Governance* dapat diperkuat oleh Jeffery dalam *Journal Of South Pacific* (2005:2)

“The concept of environmental governance encompasses the relationship and interaction among governance and non-governance structures, procedures and conventions , where power and responsibility are exercised in making environmental development”.

Bahkan konsep tata lingkungan meliputi hubungan dan interaksi antara pemerintah dan non-struktur pemerintah, prosedur dan kovensi, dimana kekuasaan dan tanggung jawab itu dilakukan dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disampaikan bahwa *Good Environmental Governance* pada Badan Lingkungan Hidup adalah salah satu instansi pemerintah yang mengelola lingkungan secara baik, memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang melestarikan lingkungan dan kesejahteraan rakyat dengan adanya kebijakan lingkungan yang dibuat dengan munculnya suatu produk pemerintah yang di terapkan melalui program-program berbasis peduli pada kelestarian lingkungan, sehingga dapat mewujudkan *Good Environmental Governance* dengan baik dan optimal. Dengan adanya upaya untuk mewujudkan *Good Environmental Governance* melihat dari lingkungan di indonesia yang sedikit demi sedikit tertata dan bersih dari sampah-sampah hasil kegiatan masyarakatnya yang kali ini jauh pada keadaan lingkungan Kota Mojokerto sebelumnya, agar mendapatkan produktifitas dan kebersihan lingkungan hijau yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakat dengan lebih menjaga kelestarian lingkungan. Dalam *Good Environmental Governance* membutuhkan *Indikator Good Environmental Governance* sebagai kunci keberhasilan didalam prosedur suatu organisasi pemerintahan untuk mengelola lingkungan dengan baik.

3. Indikator *Good Environmental Governance*

Indikator *Good Environmental Governance* dalam mewujudkan organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup secara baik adalah Lingkungan. Lingkungan adalah salah satu faktor terpenting yang menunjang keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dalam persaingan. Pada umumnya, kegagalan dalam tugas atau usaha disebabkan oleh kegagalan didalam memahami dan mengidentifikasi lingkungan secara benar dimana mereka bersaing. Manajemen harus memandang perusahaan atau suatu organisasi sebagai perpaduan antara dua kekuatan yaitu lingkungan eksternal suatu perusahaan atau organisasi dan lingkungan internal suatu perusahaan atau organisasi. Semakin mudah lingkungan berubah, maka dampaknya terhadap manusia, struktur organisasi, maupun perumusan dan pelaksanaan harus akan semakin besar.

Pengertian lingkungan menurut Wahyudi (1996: 47), lingkungan adalah “Tempat perusahaan atau organisasi berada dimana untuk membuat tujuan, sasaran, dan strategi yang akan diambil, diperlukan suatu analisis yang mendalam terhadapnya”.

Menurut Supriyanto (1998: 9) lingkungan adalah “Pola semua kondisi atau faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi atau menuntun kearah kesempatan atau ancaman-ancaman pada kehidupan dan pengembangan perusahaan atau organisasi”.

Berdasarkan definisi pakar diatas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor terpenting yang menunjang keberhasilan

suatu badan organisasi atau suatu perusahaan tersebut guna untuk tercapainya suatu tujuan yang diharapkan oleh suatu badan organisasi atau perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat. Didalam *Good Environmental Governance* membutuhkan adanya suatu inovasi gagasan baru sebagai penunjang keberhasilan suatu organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan di dalam perbaikan lingkungan suatu pemerintahan yang baik dari sebelumnya.

Good Environmental Governance merupakan suatu lembaga organisasi atau birokrasi pemerintahan yang mengatur atau mengelola lingkungan secara baik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam *Good Environmental Governance* perlu adanya campur tangan antara pemerintah dan masyarakat publik bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan agar lingkungan tidak rusak dan tercemar yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia, makhluk hidup serta semua elemen didalam lingkungan. Didalam *Good Environmental Governance* perlu adanya pemerintahan yang baik yang dapat mengatur tata pemerintahan dan lingkungan secara baik demi tujuan yang ingin dicapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian terdapat cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu secara sistematis atau yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian sangat penting dalam keberhasilan proses menganalisa, pengumpulan data dan interpretasi data. Empat kunci menurut Sugiyono (2012) yang perlu diperhatikan dalam sebuah penelitian, yaitu : cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengevaluasi permasalahan bagaimana implementasi program “Berseri” di Kota Mojokerto dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2007) berpendapat bahwa deskriptif merupakan laporan yang mempunyai isi berupa kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data-data yang digunakan merupakan berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya. Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar dan data yang dikumpulkan pada umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada penghayatan atau berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku masalah dalam situasi tertentu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan dengan maksud agar dapat menentukan batasan-batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Sehingga objek yang akan diteliti tidak terlalu majemuk dan terlalu luas. Maka peneliti dapat mengkaji dan mengetahui lebih dalam dan pasti mengenai data yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2005) mengenai penelitian kualitatif, mempunyai gejala yang bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat di pisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasar variable penelitian tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti.

Adapun fokus penelitian ini adalah Evaluasi Program “Berseri” di Kota Mojokerto, yang meliputi :

- a. *Input* : Permasalahan yang mendorong dilaksanakannya Program Berseri
- b. *Process* : Proses implementasi Program Berseri
- c. *Output* : Pencapaian hasil dari Program Berseri
- d. *Outcome* : Hasil dari program yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Mojokerto

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka lokasi ini dilakukan di Kota Mojokerto, dan penelitian ini dilakukan di Badan Lingkungan Hidup di Kota Mojokerto. Alasan peneliti mengambil penelitian mengenai implementasi program Mojokerto Kota Berseri yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kota Mojokerto merupakan kota yang mendapatkan penghargaan Adipura pada tahun 2011 dikarenakan kota yang peduli akan kelestarian lingkungan hidup oleh pemerintah pusat.
2. Kota Mojokerto merupakan kota yang sedang menjalankan adanya perbaikan pembangunan berkelanjutan tentang lingkungan hidup untuk mencapai kota Mojokerto sebagai kota *green city*.

D. Jenis Data

Data yang berdasarkan jenis pengambilannya dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh berasal dari laporan yang dicatat dan diamati secara langsung oleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Benny Sugiarto dan Bapak Wiji (Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto), observasi visual dan alat lainnya oleh orang yang melakukan penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang diolah atau data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber yang ada guna mendukung data primer, yang meliputi :

- a. Gambaran Program Berseri di Kota Mojokerto.
- b. Buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang sesuai dengan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini juga terdapat teknik pengumpulan data dan dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara yaitu kepada Bapak Suwaji, Bapak Benny dan Bapak Edi selaku informan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, BS (40), BY (45) selaku informan dari Kelurahan Surodinawan dan jawaban-jawaban informan dicatat dan direkam. Hasil dari wawancara merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis oleh peneliti.

2. Observasi

Observasi atau survey dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini tidak hanya di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, namun juga observasi terhadap beberapa kelurahan yaitu di Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Prajurit Kulon. Tujuan dari observasi ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan sejauh mana permasalahan lingkungan yang ada di Kota Mojokerto

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan meneliti dan memanfaatkan catatan-catatan yang ada di kelurahan tersebut yang berhubungan langsung dengan program Mojokerto kota berseri. Teknik dokumentasi dapat berupa arsip dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebagai alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud saran atau benda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti Sendiri

Merupakan metode yang dipakai dalam penelitian kualitatif yang pengumpulan data lebih tergantung pada diri sendiri sebagai instrument Utama dengan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati fenomena dalam penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Serangkaian pertanyaan yang akan dilontarkan kepada responden yang mana hal ini digunakan sebagai bentuk petunjuk pada saat melakukan wawancara.

3. Catatan Lapangan

Catatan ini dibuat oleh peneliti dengan cara mengadakan pengamatan atau wawancara. Catatan ini hasil dari penelitian yang didengar, dilihat dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

G. Analisis Data

Kata Analysis berasal dari bahasa Greek, terdiri dari kata “*ana*” dan “*lysis*” *ana* artinya atas (*above*), *lysis* artinya memecahkan atau menghancurkan (Kasiram, 2010:353). Analisis data adalah pengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data agar mudah dibaca. Kemudian secara deskriptif dengan disesuaikan pada jenis penelitian, data diolah dan disajikan untuk menunjukkan fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan (Nasir,1999:419).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Hubberman dan Saldana (2013) dimana dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu Kondensasi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Hubberman (2013) tahapan untuk menganalisis data pada metode kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-up field notes, interview transcripts, documents, and other empirical materials. Pada tahap ini, peneliti melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Kondensasi data yang telah dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data meliputi gambaran umum, mengadakan wawancara Pemerintah Kota Mojokerto khususnya Bagian

Lingkungan Hidup dan Kelurahan yang menerapkan Program Berseri. Secara umum, peneliti tidak menemui hambatan besar dalam proses mendapatkan data melalui wawancara baik terhadap pegawai Kantor Lingkungan Hidup maupun kader di beberapa kelurahan. Data primer yang diungkapkan oleh informan khususnya kader di beberapa kelurahan relatif kurang, oleh karena itu peneliti lebih banyak mengolah data dari penelitian secara visual.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. *Generically, a display is an organized, compressed assembly of information that allows conclusion drawing and action.* Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, skema dan lain-lain.

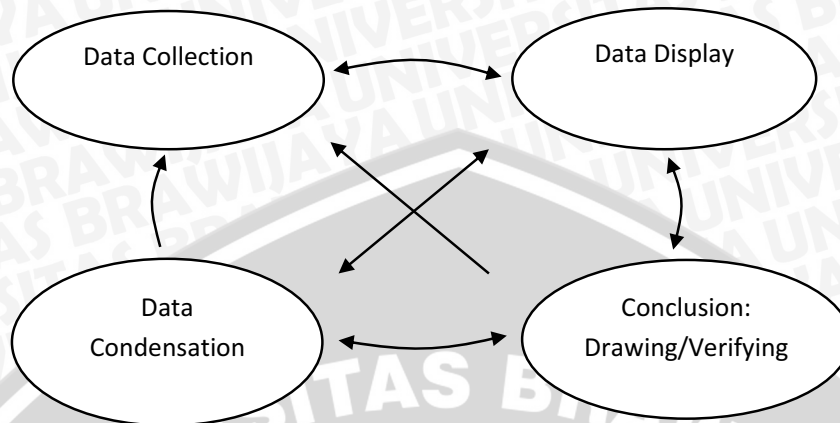
Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah terkait keuntungan, konflik serta agenda-agenda ke depan guna memperoleh hubungan simbiosis mutualisme. Hasil penelitian yang lebih didominasi oleh data primer membuat peneliti menemui kesulitan dalam menampilkan data. Data primer merupakan sumber utama dalam penelitian kualitatif, namun data sekunder akan menguatkan uraian-uraian atau pendapat-pendapat yang disampaikan oleh informan. Selain itu, merancang sebuah hubungan simbiosis mutualisme haruslah memperhatikan

setiap detail dari setiap data primer dan informan hal tersebut membuat peneliti sangat berhati-hati dalam menampilkan data dan menganalisisnya.

3. Pengambilan Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Apabila tahapan reduksi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil keputusan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data dari awal pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap pendekatan yang dilakukan. Dalam analisis data kualitatif model interaktif yang digunakan peneliti merupakan upaya terus-menerus yang mencakup tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul-menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari lapangan (Miles, Huberman dan Saldana 2013:14). Penarikan kesimpulan akan memadatkan pembahasan yang sangat luas tersebut menjadi pokok bahasan yang lebih singkat dan sederhana tanpa menghilangkan esensi atau arti penting dalam penelitian ini.

Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan secara interaktif ketiga komponen tersebut, yang dapat disajikan dengan gambar di bawah ini :



Gambar 3.1 Analisis Data Menurut Miles dan Huberman.
Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2013:14)

Kegiatan analisis data dilakukan secara berurutan dan saling berhubungan sehingga diperoleh data yang dapat memperkaya dan menambah informasi guna memantapkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif, karena penulis tidak menggunakan data statistik maupun menguji sebuah teori. Dalam hal ini analisis data digunakan dalam menganalisis Program Berseri Pemerintah Kota Mojokerto baik dari keuntungan dan kelebihan baik dari segi pemerintah serta dari segi masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan Status Lingkungan Kota Mojokerto

a. Keadaan Geografi

Kota Mojokerto terbagi menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Prajurit Kulon memiliki 8 kelurahan dan Kecamatan Magersari memiliki 10 kecamatan. Jumlah kelurahan terdiri dari 18 (delapan belas) kelurahan. Dengan luas seluruh wilayah adalah 16,48 Km², dan pada posisinya terletak pada 7° 27" 0,16 sampai 7° 29" 37" LS dan 112° 27" 24" BT dengan kondisi permukaan tanah agak miring ke timur dan utara antara 0 - 3% serta dengan ketinggian rata-rata ± 22 m diatas permukaan laut.



Gambar 4.1 Peta Kota Mojokerto

Sumber : Sistem informasi Pemerintah Kota Mojokerto, 2015

Sedangkan batas-batas wilayah administrasi Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1.) Sebelah Selatan : Kec. Sooko dan Kec. Puri Kab. Mojokerto
- 2.) Sebelah Timur : Kec. Mojoanyar dan Kec. Puri Kab. Mojokerto
- 3.) Sebelah Utara : Sungai Brantas
- 4.) Sebelah Barat : Kec. Sooko Kab. Mojokerto

Secara fisik Kota Mojokerto memiliki luas wilayah 11.0646 Ha, merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur dan Indonesia yang memiliki satuan wilayah ataupun luas wilayah terkecil, dengan wilayah administrasi hanya terbagi 2 Kecamatan yakni, Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari, 18 kelurahan, 656 Rukun Tetangga (RT), 176 Rukun Warga (RW) dari 72 dusun/Lingkungan. Kalau dilihat dari besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto yang memiliki luas yang sangat kecil dimana akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat tinggi, yaitu 6.877 penduduk per kilometer persegi (Km^2) di tahun 2005 dan sebesar 6.931 penduduk per Km^2 di tahun 2015 dan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi adalah kelurahan Mentikan, yaitu sebesar 25.011 jiwa per Km^2 , disusul oleh kelurahan Sentanan sebesar 21.957 jiwa per Km^2 , selanjutnya Kelurahan Kauman sebesar 21.316 jiwa per Km^2 . (Sumber data: Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto)

Kota Mojokerto memiliki temperatur udara maksimum 36,23% yang terjadi pada bulan Nopember dan minimum sebesar 35,7% yang terjadi pada bulan Juni. Sedangkan kelembaban udara pada bulan Mei mengalami tahap paling rendah sebesar 95%, sedangkan bulan-bulan lainnya berkisar antara 37%. Pada

tahun 2014 kecepatan angin berkisar antara 3 – 4 knot. Topologi di wilayah Kota Mojokerto meliputi dataran rendah dan sungai-sungai. Daerah dataran rendah di Kota Mojokerto adalah sungai berantas yang membentang sepanjang 47,25 Km. Sungai Brantas adalah satu-satunya sungai yang terpanjang di Jawa Timur yang berhulu di Kota Malang kemudian terbelah menjadi dua sungai kecil di Kota Mojokerto, yaitu sungai Porong yang menuju ke Kota Sidoarjo dan sungai Kalimas yang menuju ke Kota Surabaya dengan membentuk sebuah letak yaitu terbentuknya Kota Surabaya. Secara Geologi/Lapisan batuan yang terdapat di Kota Mojokerto sebagian besar merupakan seri batuan alluvium, Plistosen Fasles Sedimendan Alluvium Fasles Gunung Api. Jenis alluvium mendominasi sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto seluas 902,16 Ha, Plistosen Fasies Sedimen seluas 222,353 Ha terdapat di Kelurahan Gunung Gedangan dan Kedudung, Alluvium Fasies Gunung Api seluas 393,79 Ha meliputi Kelurahan Surodinawan, Miji, Prajurit Kulon, Brantas, Mentikan, Kauman, Pulorejo, Jagalan, Santanan, Purwotengan dan Magersari.

Terdapat 2 (dua) jenis tanah di Kota Mojokerto yaitu Grumoso kelabu tua, Asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekuningan. Jenis tanah Asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekuningan terdapat di Kelurahan Mentikan, Kauman, Pulorejo, dan seluruh wilayah di Kecamatan Magersari seluas 617,75 Ha. Sedangkan jenis tanah Grumoso cukup mendominasi jenis tanah di Kota Mojokerto, luas wilayah memiliki jenis tanah tersebut adalah 1.028,55 Ha terdapat di Kelurahan Meri, Gunung Gedangan, Kedudung, Balongsari, Jagalan, Santanan dan seluruh wilayah di Kecamatan Prajurit Kulon.

Kualitas udara di Kota Mojokerto secara umum masih relatif memenuhi syarat sebagai udara ambient, namun di beberapa titik pengamatan terutama di wilayah perkotaan menunjukkan adanya peningkatan polutan udara seperti gas CO, NO₂, HC dan partikulat. Meningkatnya gas pencemar udara seiring dengan terus bertambahnya usaha dan atau kegiatan serta jumlah kendaraan bermotor yang pada dasarnya juga sebagai sumber pencemar. Seperti halnya mutu udara, kualitas air badan air juga mengalami hal yang sama, terutama di wilayah Kota Mojokerto mutu air badan air terus mengalami penurunan. Kualitas air badan air diprediksikan akan terus mengalami ancaman pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk serta bertambahnya usaha atau kegiatan. Jumlah penduduk Kota Mojokerto ± 150.000 jiwa merupakan pelaku pencemar, yang hakekatnya juga selaku pemanfaat sumber daya air.

Selain faktor penduduk, peningkatan jumlah usaha atau kegiatan industri, pelayanan kesehatan, pelayanan jasa termasuk sektor pariwisata juga merupakan sumber potensial sebagai penghasil bahan pencemar. Banyak kegiatan usaha skala kecil menengah, informal dan rumah tangga menyebabkan timbulnya berbagai pencemaran atau kerusakan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara memadai. Jumlah usaha kecil menengah dan informal yang ada di Kota Mojokerto cukup banyak yang belum dilengkapi dengan berbagai izin yang di persyaratkan, sehingga banyak yang belum terinventarisir sebagai sumber pencemar.

b. Visi dan Misi

Kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui system perencanaan daerah yang baik yang bertujuan selain meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, juga ditujukan bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pembangunan daerah terencana dengan baik. RPJMD Kota Mojokerto tahun 2015-2020 merupakan bagian dari upaya pengelolaan sumber daya daerah untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Mojokerto yang terintegrasi dengan rencana pembangunan di atasnya. Selain itu juga merupakan wadah bagi aspirasi kebutuhan masyarakat dan rumusan perwujudan cita-cita pembangunan daerah untuk jangka lima tahun dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan dengan strategi dan arah kebijakan umum pada kerangka program pembangunan daerah sesuai visi misi kepala daerah.

Visi Kota Mojokerto sampai dengan tahun 2020 adalah : Terwujudnya Kota Mojokerto yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral. Untuk itu misi yang akan ditempuh dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan *clean and good governance*.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan.
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

- 6) Meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan.
- 7) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif, professional dan berdaya saing tinggi.
- 8) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dan tata ruang.
- 9) Meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kesalehan sosial.
- 10) Menunjang tinggi nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan *gender*.
- 11) Memantapkan stabilitas keamanan, politik dan pemerintahan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut menjadi sebuah program kedepan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan berbagai sektor pembangunan di Kota Mojokerto, dan tentunya dengan seluruh dukungan masyarakat dan *stakeholder* untuk tetap mengawal dan berusaha menjadikan kota Mojokerto menjadi lebih baik dan jaya di masa depan. Selanjutnya dirumuskan beberapa agenda pembangunan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Meningkatkan pengembangan ekonomi.
- 4) Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan tata ruang.

2. Profil Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto

Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang lingkungan hidup dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto sudah memperoleh beberapa penghargaan baik di tingkat propinsi maupun tingkat nasional yaitu :

- 1) Penghargaan Adipura Tingkat Nasional sejak tahun 2009/2010
- 2) Penghargaan Adiwiyata tingkat Propinsi dan tingkat Nasional
- 3) Juara 2 lomba budaya kerja tingkat Propinsi

Dan saat ini target prestasi yang diharapkan adalah tercapainya Kota Mojokerto sebagai kota berpredikat Adipura Kencana.

a. Visi dan Misi Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto bersama jajaran telah menyiapkan visi dan misi untuk mencapai tujuannya.

1. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadikan milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan di Badan Lingkungan Hidup. Visi Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :

“Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan”

Visi tersebut diatas memberikan pengertian bahwa pembangunan di segala bidang tetap dilaksanakan dalam rangka peningkatan perekonomian

nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi harus tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi, yaitu :

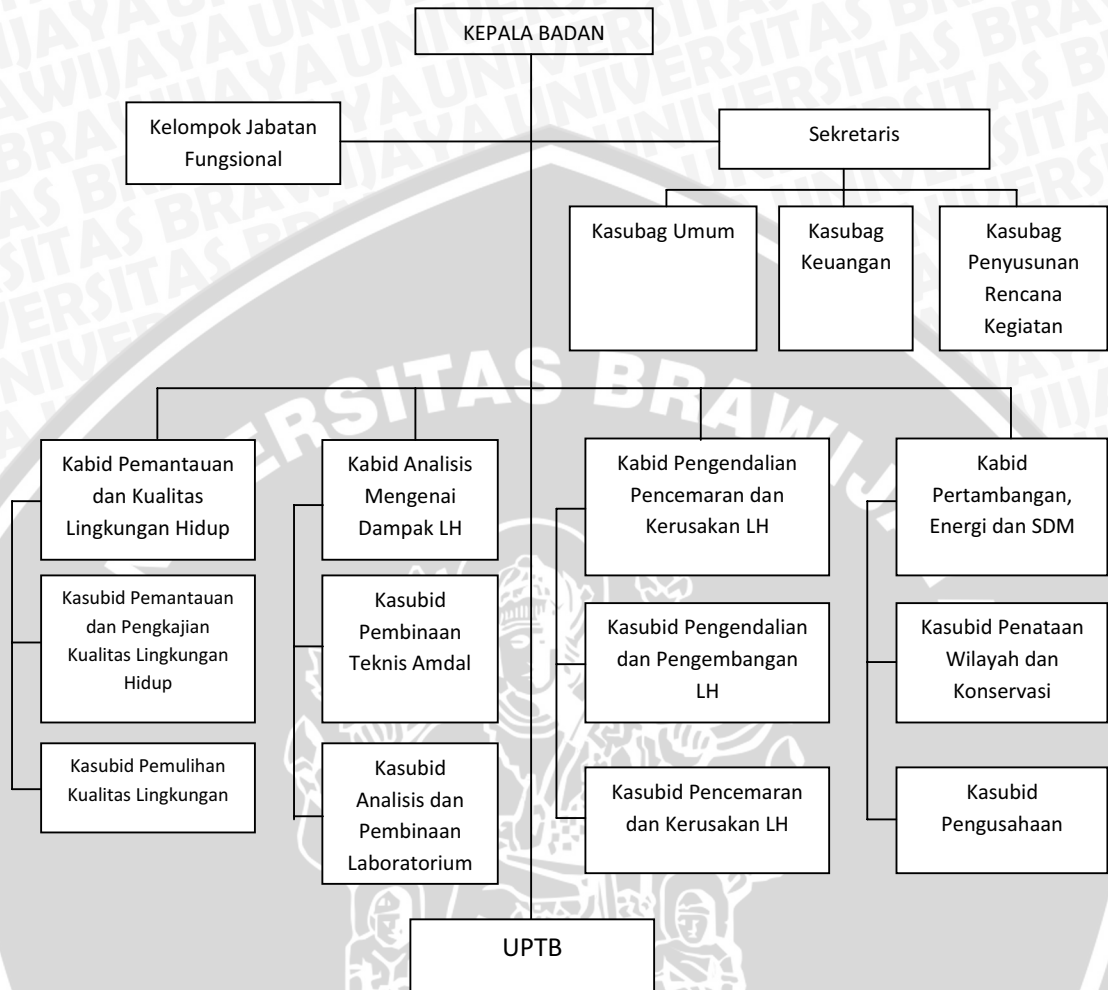
- a. Meningkatkan kualitas penyusunan rencana Program Badan Lingkungan dalam pengelolaan pengendalian dampak, penyusunan informasi lingkungan dan pengelolaan pertambangan dan energi, meningkatkan pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga serta meningkatkan pelaksanaan proses administrasi penegak peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan pertambangan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- c. Meningkatkan pengembangan kelembagaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d. Meningkatkan pembinaan teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, UKL dan UPL dan pengkajian serta pembinaan laboratorium.
- e. Meningkatkan upaya penataan wilayah dan konservasi, pengusahaannya serta pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dan energi.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat.
3. Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup.
4. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan.





Gambar 4.2 Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
 Sumber : Profil Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto

c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Lingkungan Hidup sebagaimana Perda Nomor 12 Tahun 2008 mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mojokerto. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut:

1. **Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto**, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Lingkungan Hidup.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup meliputi urusan umum, keuangan dan menyusun rencana kegiatan.

Sekretariat terdiri dari :

d. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pengelolaan surat menyurat dan tata kearsipan serta tugas-tugas keprotokolan.
- 2) Melakukan urusan rumah tangga.
- 3) Melakukan tata usaha kepegawaian.
- 4) Mengelola administrasi tentang kedudukan, hak dan kewajiban pegawai, peningkatan karier pegawai serta kesejahteraan pegawai.
- 5) Menyiapkan data dalam rangka menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan.
- 6) Melakukan tata usaha pemeliharaan perlengkapan dan peralatan.
- 7) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat.

e. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan.
- 2) Melaksanakan pengelolaan keuangan, gaji pegawai serta pertanggungjawabannya.
- 3) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretariat.

f. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
- 2) Melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan pertimbangan.
- 3) Melakukan pemeliharaan dan pengarsipan dokumen proses administrasi penataan lingkungan hidup.
- 4) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program di Badan Lingkungan Hidup guna pengendalian dampak lingkungan.
- 5) Melakukan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta menyusun informasi lingkungan.
- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup, yang mempunyai tugas Badan Lingkungan Hidup yang meliputi pemantauan dan pengkajian kualitas lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan.

Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemantauan dan Pengkajian Kualitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara ambient dan emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.
- 2) Melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan perkotaan dan kualitas air pada sumber air.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada usaha/kegiatan dan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya.
- 4) Melaksanakan pengkajian kualitas udara, air pada sumber air dan SDA lainnya.
- 5) Melaksanakan penetapan kelas air pada sumber air dan upaya pentaatan persyaratan yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup.

b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan, mempunyai tugas:

- 1) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan teknis program pemulihan kualitas lingkungan.
- 2) Melaksanakan pengkajian batasan-batasan dan kondisi lingkungan hidup yang dikategorikan sebagai kondisi yang memerlukan tindakan pemulihan kualitas lingkungan serta merancang tindakan yang diperlukan.
- 3) Melaksanakan inovasi pengembangan metode pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi pemulihan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan penanggung jawab usaha/kegiatan dan masyarakat.
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi pemulihan kualitas udara ambient perkotaan dengan program langit biru dan penataan ruang terbuka hijau.
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi SDA dengan keanekaragaman hayati.
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat.
- 8) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup.

4. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup yang meliputi pembinaan teknis AMDAL, dan analisa serta pembinaan Laboratorium

a. Sub Bidang Pembinaan Teknis Amdal, mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis AMDAL serta UKL dan UPL.
- 2) Melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan pelaksanaan proses dan peraturan AMDAL serta UKL dan UPL.
- 3) Melakukan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Melakukan pemberian rekomendasi UKL dan UPL
- 5) Melakukan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan kegiatan, baik yang wajib maupun yang tidak wajib dilengkapi AMDAL.
- 6) Melakukan koordinasi pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
- 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi ijin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas, rekomendasi ijin

lokasi pengolaan limbah B3 dan rekomendasi ijin penyimpanan sememntara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.

- 8) Melakukan koordinasi pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, pelaksanaan sistem tanggap darurat, serta penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3.
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 10) Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 11) Melaksanakan pemberian perijinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- 12) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 13) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

b. Sub Bidang Analisis dan Pembinaan Laboratorium,

mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan laboratorium, penelitian kualitas lingkungan hidup, rekayasa

kemampuan hayati lingkungan, pengembangan pemeriksaan dan analisis contoh uji.

- 2) Melakukan penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 3) Mengembangkan dan mengelola laboratorium serta memberikan layanan jasa.
- 4) Melakukan pengawasan kualitas metodologi pengujian dan hasil uji laboratorium serta melakukan pengujian contoh uji air, air limbah, udara dan kualitas lingkungan.
- 5) Memelihara dan merawat peralatan serta pengadaan bahan laboratorium.
- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup yang meliputi pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup serta pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi :

a. Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Lingkungan

Hidup, mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan kebijaksanaan teknis pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup.
- 2) Melakukan pengkajian dan koordinasi dibidang pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup.
- 3) Melakukan pemantauan dan analisis kegiatan pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup.
- 4) Melakukan bimbingan teknis dibidang pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup.
- 5) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pemberian perijinan dibidang pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan, pengelolaan dan/atau pembuangan limbah.
- 6) Mengawasi dan mengendalikan perijinan dibidang pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan dan pembuangan limbah.
- 7) Melaksanakan pemberian ijin lingkungan, ijin pembuangan limbah cair dan ijin gangguan.
- 8) Melakukan pembinaan dan koordinasi perijinan pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan, pengolahan dan pembuangan limbah.
- 9) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

b. Sub Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Melaksanakan kebijaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Melakukan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Menyusun laporan tentang pengawasan dan pengendalian tentang kerusakan lingkungan.
- 5) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

6. Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral,

melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup meliputi penataan wilayah dan konservasi serta pengusaha.

a. Sub Bidang Penataan Wilayah dan Konservasi, mempunyai

tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis sebagai dasar penataan dan konservasi lokasi pertambangan, energi dan sumber daya mineral.
- 2) Mengadakan inventarisasi dan pendataan wilayah pertambangan, energi, sumber daya mineral, panas bumi, migas dan air tanah.
- 3) Penetapan wilayah potensi dan wilayah konservasi terhadap pertambangan, energi, sumber daya mineral, panas bumi, migas dan air tanah.
- 4) Pengelolaan data dan informasi pertambangan, energi, sumber daya mineral, panas bumi, migas, air tanah serta pengusaha dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan.
- 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan ijin dan penertiban ijin pertambangan, energi, sumber daya mineral, panas bumi, migas, air tanah, kelistrikan dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

b. Sub Bidang Pengusaha, mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis sebagai dasar kegiatan pertambangan, energi dan sumber daya mineral.
- 2) Pemberian rekomendasi teknis untuk ijin pengeboran, ijin pengendalian dan ijin pengambilan air bawah tanah.

- 3) Melakukan pembinaan, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang terhadap usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral.
- 4) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral.

7. UPT Laboratorium Lingkungan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas membantu Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengujian laboratorium lingkungan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. UPT Laboratorium Lingkungan terdiri atas Kepala, sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional :

a. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja.
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran.
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- 5) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT laboratorium lingkungan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3. **Gambaran Umum Program Berseri (Bersih dan Lestari)**

Program “Berseri” adalah program untuk mewujudkan Desa/Kelurahan ramah lingkungan di Jawa Timur, program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa/Kelurahan agar mau dan mampu menumbuhkembangkan potensi Desa/Kelurahan yang berperilaku ramah lingkungan serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan di bidang lingkungan hidup, sehingga dapat terwujud dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang bersih, sehat, lestari dan asri.

a. **Visi dan Misi Program Berseri**

Visi dilaksanakannya Program Berseri di Kota Mojokerto adalah untuk **“Terwujudnya Lingkungan Desa/Kelurahan yang Bersih dan Lestari”**

Misi yang dilaksanakan guna mewujudkan visi Program Berseri adalah :

- 1) Membangun masyarakat yang peduli, berbudaya bersih dan cinta lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri dengan memperhatikan kearifan lokal.
- 3) Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 4) Mewujudkan Program Jawa Timur menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*)

b. Maksud, Tujuan dan Sasaran Program Berseri

Maksud dari dilaksanakannya Program Berseri adalah untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun masyarakat Desa/Kelurahan agar melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis dan berwawasan lingkungan sehingga terbentuk Desa/Kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri.

Tujuan dari pelaksanaan Program Berseri adalah :

- 1) Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa/Kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya, sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, lestari dan asri.
- 2) Untuk memandirikan masyarakat Desa/Kelurahan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan menggunakan dan mengakses sumber daya alam secara arif dan bijaksana.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan akses informasi kepada masyarakat Desa/Kelurahan, sehingga masyarakat dengan sadar dan secara langsung ikut berpartisipasi dalam penanganan masalah lingkungan di wilayahnya.
- 4) Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal, sosial dan budayanya serta membangkitkan peran aktif masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan yang bersih dan lestari (ramah lingkungan).

- 5) Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal.
- 6) Mewujudkan Mojokerto menuju Kota Hijau (*Green City*) melalui Desa/Kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri.

Sasaran Program Berseri ini dilakukan penilaian terhadap Desa/Kelurahan mencakup lokasi/titik pantau yang meliputi aspek :

- 1) Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam

Program Berseri dapat disimpulkan bahwa program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan sebuah kota yang peduli dan sadar akan lingkungan di sekitarnya. Menginspirasi masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun Desa/Kelurahan dan meningkatkan taraf hidup mereka dengan mengakses dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Salah satu hal yang paling mendasar adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa/Kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya sehingga dapat terwujud lingkungan yang bersih, sehat, lestari dan asri.

Dalam suatu Program Pemerintah diperlukan peran serta dari lembaga pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk lebih menjaga kelestarian lingkungan demi lingkungan yang indah, bersih, sehat, asri serta lestari untuk kenyamanan semua elemen masyarakat. Dalam suatu program pemerintah perlu adanya evaluasi kebijakan publik untuk menjadikan program (kebijakan publik)

yang sudah dilaksanakan menjadi lebih baik dan lebih efektif dari sebelumnya.

Untuk menentukan keberhasilan suatu program pemerintah perlu adanya evaluasi untuk menunjang suatu keberhasilan suatu program (kebijakan publik) untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

c. Prinsip dan Norma

Prinsip yang diusung dalam pelaksanaan Program Berseri di Kota Mojokerto adalah :

- 1) **Partisipatif** : Komunitas Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan Lingkungan Desa/Kelurahan yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran.
- 2) **Berkelanjutan** : Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.
- 3) **Berbasis Masyarakat** : menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan kebijakan utama, penanggung jawab dan pengelola lingkungan.

Program dan kegiatan yang dikembangkan harus berdasarkan norma-norma dan berkehidupan yang meliputi antara lain :

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas** : pelaksanaan kegiatan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan seluruh lapisan masyarakat dan perilaku terkait berhak untuk mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya

- 2) **Berbasis Nilai** : penyelenggaraan kegiatan dilakukan berlandaskan pada nilai-nilai, antara lain : **Kerja Keras, Kebersamaan/Gotong Royong, Tanpa Pamrih, Kejujuran dan Keadilan.**

B. Penyajian Data Penelitian

1. Evaluasi Input

Program Berseri adalah salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang lingkungan hidup yang didorong untuk menciptakan pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Program ini juga merupakan himbuan warga masyarakat Kota Mojokerto untuk mewujudkan Desa/Kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri. Program Berseri yang dilaksanakan di Kota Mojokerto sebelumnya dilaksanakan di Kota Surabaya pada tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim, Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*) serta Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) 2009-2014.

Sebelum pengimplementasian Program Berseri, Pemerintah Kota Mojokerto melakukan beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. Acara Sosialisasi Program Berseri dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2015 bertempat di Hotel Raden Wijaya Mojokerto yang diikuti 60 orang RT, RW, Tim Penggerak PKK Kelurahan dan Pengurus Bank Sampah yang dibuka oleh Bapak Nurhariadi, SH selaku kepala kantor menyampaikan bahwa :

“Tujuan Sosialisasi Program Berseri adalah untuk mewujudkan paradigma bersih dan sehat dalam kehidupan perorangan, keluarga, masyarakat melalui budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat. Meningkatkan kesadaran dan akses informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dengan sadar dan secara langsung ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dari adanya permasalahan lingkungan di wilayahnya. Memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya alam secara arif dan bijaksana”.

Dari pernyataan diatas Program Berseri dilaksanakan untuk mewujudkan sebuah kota yang peduli dan sadar akan lingkungan di sekitarnya, meningkatkan kapasitas pemerintah Desa/Kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya. Yang paling penting dari dilaksanakannya Program Berseri adalah untuk menanamkan pengertian bahwa pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan merupakan suatu keharusan yang patut dilakukan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangi permasalahan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Apabila menurut Suwaji, S.Sos (Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto) yang disampaikan pada pembukaan sosialisasi Program Berseri menyampaikan bahwa :

“Maksud dan tujuan Sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta memberdayakan masyarakat agar turut serta mengurangi permasalahan lingkungan dan mampu menumbuhkan kembangkan potensi yang ada, sehingga semua lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mewujudkan kampung Berseri (bersih dan lestari).”

Ada beberapa permasalahan lingkungan yang muncul di Kota Mojokerto yang kemudian mempelopori dilaksanakannya Program Berseri. Seperti yang

disampaikan oleh Bapak Edi pada tanggal 01 Juni 2015 yang bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup, mengungkapkan bahwa :

“Ada beberapa permasalahan lingkungan yang ada di Kota Mojokerto yaitu banyak ditemukan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, banyaknya sampah liar yang mengotori keindahan kota, kurangnya penanaman pohon yang tampak dari kondisi kota yang gersang, terjadi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah serta kurangnya kepedulian dari masyarakat. Dari beberapa permasalahan tersebut, Kota Mojokerto butuh suatu program yang dapat mengurangi permasalahan lingkungan.”

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Program Berseri dilaksanakan dengan adanya beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi. Salah satunya adalah permasalahan sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial serta fasilitas lainnya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Apabila masalah sampah tidak ditanggulangi dengan baik, maka penumpukan sampah tidak terhindarkan. Dengan permasalahan seperti ini, diperlukan juga suatu program yang dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih memanfaatkan sampah dengan baik sebelum sampah dibuang Tempat Penampungan Sementara. Hal ini merupakan salah satu dorongan dari masyarakat untuk melaksanakan Program Berseri agar masyarakat lebih peduli terhadap sumber daya alam yang ada.

Tabel 4.1 Penanganan Sampah Kota Mojokerto

No	Penanganan Sampah	Volume (m ³ /hari)	Prosentase
1	Diangkut petugas ke TPA	338,55	89,9
2	Diolah menjadi kompos	4	1,18
3	Tidak terangkut	34,45	10,18

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto 2014

Program Berseri merupakan model pemberdayaan masyarakat agar turut serta dan mampu menumbuh kembangkan potensi lingkungan sehingga semua lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mewujudkan kampung yang bersih dan lestari. Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan Insentif (rangsangan) dan Desentif (pemberdayaan), yaitu dengan dilakukannya pemberdayaan, fasilitasi dan pendampingan secara intensif.

2. Evaluasi *Process*

a. Strategi Pelaksanaan Program Berseri

Program Berseri mempunyai beberapa strategi dalam pelaksanaannya yaitu Upaya Bersih dan Lestari, Ekonomi Hijau/*Green Economy*, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Upaya Bersih lingkungan diharapkan dapat menumbuhkan budaya (perilaku) masyarakat untuk mencintai lingkungan.

Tindakan ini juga mewujudkan perilaku sehat antara lain melalui :

- 1) Bersih dari sampah.
- 2) Bebas dari pembakaran sampah.
- 3) Sarana pemilahan dan pengelolaan sampah.

- 4) Pengembangan program manajemen sampah (*Reuse, Reduce, Recycle, Sosial Bank Sampah*)
- 5) Drainase dan sanitasi yang dikelola dengan baik.
- 6) Pengelolaan limbah cair domestik sebelum dibuang ke media lingkungan.
- 7) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
- 8) Penghijauan, keteduhan jalan dan fasilitas umum yang terpelihara.
- 9) Pelestarian kawasan sekitar danau, waduk, dan mata air.
- 10) Pelestarian dan pengembangan tanaman langka dan tanaman obat-obatan.

Upaya lestari dapat diartikan melestarikan budaya bersih yang sudah diterapkan dalam Program Berseri seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwaji pada tanggal 27 April 2015 yang bertempat di Kantor Lingkungan Hidup, bahwa :

“Upaya lestari itu harus didasari dengan adanya komitmen bersama seluruh warga masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan, peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pemberdayaan kader atau kelompok pecinta lingkungan, aksi provokasi lingkungan atau slogan-slogan untuk memotivasi kepedulian lingkungan, adanya sanksi kepada pihak yang merusak lingkungan, tidak merambah atau merusak hutan, pembibitan dan penanaman tanaman penghijauan dan penebar setra pembuatan Perdes, komitmen warga, mempertahankan kearifan lokal dibidang lingkungan hidup.”

Strategi ekonomi hijau atau *Green Economy*, yaitu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk generasi masa kini dan yang akan datang melalui pola dan aktivitas kegiatan ekonomi melalui :

- 1) Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan (Biogas, PLTA, PLTM/Solar sel).

- 2) Efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam.
- 3) Budidaya tanaman produktif dengan pupuk dan pestisida organik.
- 4) Budidaya ternak, ikan dengan pakan organik atau bahan baku limbah.
- 5) Pengembangan kemitraan dan jejaring pemasaran.
- 6) Meningkatkan partisipasi swasta (seperti program CSR).

Dalam strategi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, yaitu dengan cara menerapkan pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwaji pada tanggal 27 April 2015 yang bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto bahwa :

“Pendekatan adaptasi dan mitigasi yang berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan harus memperhatikan pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, penanganan danantisipasi kenaikan air laut, abrasi, erosi akibat angin dan gelombang tinggi, penggunaan energi baru, yang telah di perbaharui dan konservasi energi, pengelolaan budi daya pertanian.”

Mekanisme pelaksanaan Program Berseri ini adalah melalui proses sosialisasi yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur kepada Kantor/Dinas Lingkungan Hidup di Kota Mojokerto. Materi sosialisasi adalah Buku Panduan Umum dan Petunjuk Teknis Program Berseri. Dalam buku panduan juga dinformasikan bahwa siklus pengembangan Program Berseri adalah dengan melakukan Inisiasi, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi.

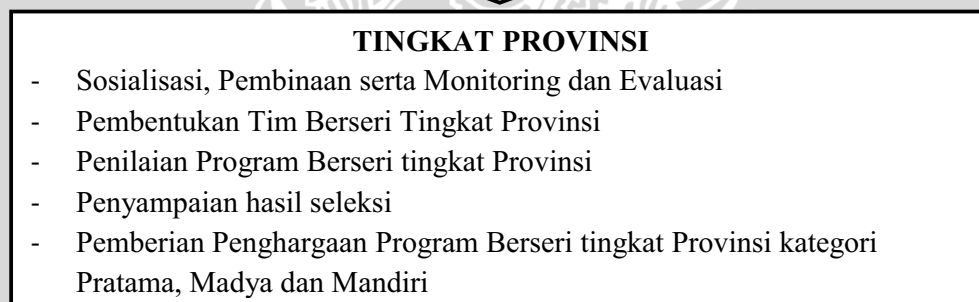
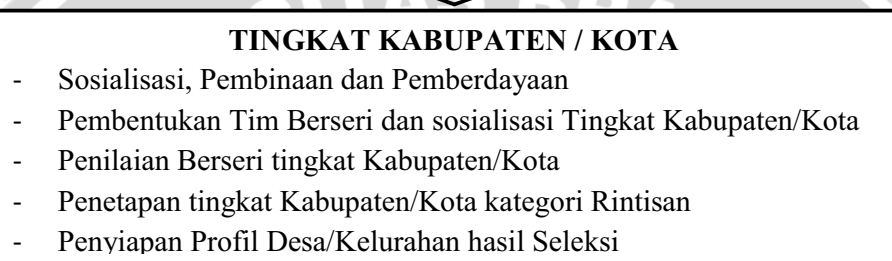
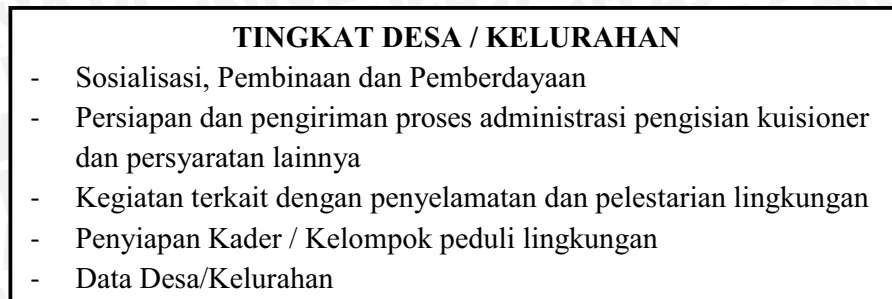
Kantor/Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto mensosialisasikan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa tentang Program Berseri. Desa atau Kota mengikuti Program Berseri dengan mengisi profil Desa/Kelurahan yang sudah disediakan di setiap Kantor/Dinas Lingkungan Hidup. Profil Desa/Kelurahan

selanjutnya dikirim oleh Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan seleksi.

Proses seleksi dalam mewujudkan Desa/Kelurahan yang bersih dan lestari dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan mekanisme :

- 1) Menilai portofolio profil Desa/Kelurahan.
 - a. Menilai fisik Desa/Kelurahan dan kebersamaan warga dengan cara Tim Badan Lingkungan Hidup Provinsi datang ke lokasi Desa/Kelurahan.





Gambar 4.3 Tingkatan Proses Seleksi Program Berseri

Program Berseri yang dirancang Pemerintah sejatinya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri. Banyak faktor yang mendukung berjalannya Program Berseri di Kota Mojokerto. Salah satunya dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank JATIM, Bank BNI dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sanggar Indonesia Bhakti. Faktor pendorong perusahaan dan LSM melakukan program CSR seperti diungkapkan oleh Bapak Suwaji pada tanggal 29

April 2015 yang bertempat di Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, antara lain :

“Faktor internal perusahaan mengadakan program CSR adalah perusahaan menyadari jika dirinya termasuk dalam kelompok sosial yang berkecimpung di suatu tempat tertentu dan berkaitan dengan kelompok sosial lainnya. Perusahaan mempunyai niatan untuk mendorong karyawan supaya dapat hidup lebih disiplin, mengembangkan kemampuan untuk kemajuan perusahaan serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Faktor eksternalnya adalah perusahaan ingin menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar perusahaan dalam hal ini masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi perusahaan maupun masyarakat secara luas yang dalam hal ini diartikan masyarakat yang lokasinya jauh dari perusahaan. Ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup”

Berdasarkan pernyataan tersebut, Program Berseri memiliki dukungan tidak hanya dari pemerintah Kota Mojokerto melainkan dari perusahaan dan LSM yang ada di sekitar Kota Mojokerto. Namun selama pelaksanaan program tersebut ternyata masih memiliki beberapa hambatan baik dari faktor *internal* maupun faktor *eksternal*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Suwaji pada tanggal 29 April 2015 dalam wawancara yang bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa :

“Banyak hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan Program Berseri baik dari dalam maupun dari luar instansi pemerintahan. Hambatan internal implementasi adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan program berseri yang ditunjukkan dengan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Biaya dari pemerintah yang minimum. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi hambatan program ini adalah kurangnya media sarana prasarana yang dimiliki masyarakat seperti kurangnya bank sampah. Perilaku dan budaya masyarakat yang susah untuk disesuaikan. Sumber daya manusia yang kurang akan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekitar.”

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif untuk mensukseskan Program

Berseri di Kota Mojokerto. Program tersebut tidak akan berjalan secara optimal apabila pemerintah dan masyarakat tidak memiliki rasa kepedulian yang cukup terhadap kelestarian lingkungan. Sehingga perlu adanya komunikasi lebih dari pemerintah terhadap masyarakat begitupun sebaliknya agar program tersebut dapat berjalan sesuai Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur untuk menuju Provinsi Hijau.

Hal utama yang dilakukan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih ialah dengan menekankan masyarakat untuk membuang sampah rumah tangga agar tidak menjadi sia-sia. Program Berseri sudah dilaksanakan di Kota Mojokerto sejak awal tahun 2013. Kelurahan yang dipilih oleh Badan Lingkungan Hidup adalah kelurahan yang memenuhi kriteria dalam penilaian Program Berseri.

Kelurahan yang menerapkan Program Berseri antara lain :

- 1) Kelurahan Surodinawan dengan jumlah 230 kepala keluarga
- 2) Kelurahan Kranggan dengan jumlah 282 kepala keluarga
- 3) Kelurahan Pulorejo dengan jumlah 382 kepala keluarga
- 4) Kelurahan Balongsari dengan jumlah 184 kepala keluarga
- 5) Kelurahan Kedundung dengan jumlah 241 kepala keluarga
- 6) Kelurahan Gunung Gedangan dengan jumlah 150 kepala keluarga
- 7) Kelurahan Prajurit Kulon dengan jumlah 150 kepala keluarga
- 8) Kelurahan Kauman dengan jumlah 324 kepala keluarga
- 9) Kelurahan Miji dengan jumlah 200 kepala keluarga
- 10) Kelurahan Wates dengan jumlah 524 kepala keluarga
- 11) Kelurahan Meri dengan jumlah 140 kepala keluarga

Perhatian dan kepedulian sebagian besar masyarakat terhadap masalah lingkungan selama ini belum seperti yang diharapkan. Disamping itu sinergi antara pemerintah, dunia usaha sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai sasaran belum berlangsung sebagaimana mestinya. Maka dari itu diperlukan upaya terobosan yang memiliki daya ungkit dan diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanganan masalah lingkungan. Sosialisasi Program Berseri (Bersih dan Lestari) merupakan salah satu strategi untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat menuju Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri. Program ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian Kota Mojokerto sebagai kota hijau (*green city*).

Untuk pembentukan panitia lomba Berseri itu sendiri, didasarkan pada Keputusan Penggunaan Anggaran nomor : 188.45/23/417.408/2015 tentang Panitia Lomba Berseri bahwa Program Berseri adalah salah satu program Pemerintah Kota Mojokerto di bidang lingkungan hidup dalam rangka mendorong terciptanya wawasan dan kesadaran bagi warga masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga terwujud kelurahan yang Bersih, Sehat, Asri dan Lestari serta melaksanakan terhadap lingkungan yang memenuhi syarat sebagai kampung berseri.

Tabel 4.2 Susunan Keanggotaan Panitia Lomba Berseri

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
2	Ketua	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
3	Sekretaris	Kasi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
4	Anggota	4 (empat) orang staff pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto

Sumber : Keputusan Penggunaan Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto, 2015

Peran Pemerintah Kota Mojokerto dalam menunjang suksesnya Program Berseri cukup banyak. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Suwaji dalam wawancara pada tanggal 27 April 2015 yang bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto bahwa :

“Peran pemerintah dalam Program Berseri adalah dengan adanya kerja bakti masal oleh masyarakat dan Pemerintah di Desa/Kelurahan, adanya kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) terintegrasi yang dipandu oleh SKPD dan Walikota, adanya pelatihan-pelatihan pengelolaan sampah dan daur ulang, workshop bank sampah, diadakannya lomba bank sampah, dengan diadakannya lomba PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan pembangunan di bidang lingkungan.”

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah berperan aktif dalam pelaksanaan Program Berseri. Sebelum program tersebut diimplementasikan, pemerintah sudah melakukan kiat-kiat awal agar setiap masyarakat Kota Mojokerto memiliki pandangan yang luas tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan harapan dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi peduli terhadap lingkungan.

b. Kriteria Penilaian Program Berseri

Kriteria penilaian sering juga dikenal dengan kata tolak ukur atau standar penilaian. Dari kata tersebut dapat dipahami bahwa kriteria, tolak ukur atau standar penilaian, adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria penilaian ini digunakan untuk bagaimana menentukan peringkat-peringkat kondisi sesuatu atau selisih-selisih nilai agar data yang diperoleh dapat dipahami oleh orang lain dan bermakna dalam mengambil keputusan dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut. Kriteria penilaian Program Berseri dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu :

1) Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Titik pantau kriteria ini adalah pada pembentukan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, program kerja kader dalam bidang lingkungan, aksi advokasi dan provokasi lingkungan dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kelembagaan (*capacity building*), pembiasaan perilaku berbudaya lingkungan dan sanksi yang diberikan serta penghargaan/prestasi yang diperoleh Desa/Kelurahan.

2) Pengelolaan Lingkungan Hidup

Titik pantau dalam kriteria ini adalah upaya pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan sampah, kegiatan daur ulang sampah, proses pengolahan dan pemanfaatan sampah dalam membuat kompos, pembiasaan perilaku berbudaya lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan sanitasi, upaya mengurangi pencemaran udara misal dengan tidak

membakar sampah, kemitraan dengan pihak luar (pemerintah, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, swasta) dalam pengelolaan sampah, pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

3) Pengelolaan Sumber Daya Alam

Titik pantau kriteria ini adalah upaya pengelolaan sumber daya alam, keterlibatan masyarakat dalam ikut menjaga dan melestarikan sumber daya alam, upaya penghematan sumber daya alam peraturan tertulis dan tidak tertulis tentang penyelamatan sumber daya alam, upaya ketanggap segera tentang penyelamatan sumber daya alam, upaya penyelamatan sumber daya alam di Desa/Kelurahan, pemakaian teknologi ramah lingkungan dalam upaya penyelamatan sumber daya alam.

Pengolahan sampah dan kriteria kelembagaan serta partisipasi masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dan merupakan satu korelasi positif. Pengolahan sampah diberikan pembobotan nilai sebesar 30%. Hal ini dikarenakan bahwa isu penanganan sampah telah diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana dalam pengelolaannya Desa/Kelurahan harus bisa menuju ke *zero waste* (bebas sampah) dan kunci utama dari keberhasilan pengelolaan tersebut ada pada tingkat partisipasi masyarakat yang dalam hal ini diberikan pembobotan 40% sebagai pilar penting dari *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Sedangkan dalam penilaian criteria pengelolaan sumber daya alam memiliki bobot 20%.

Tabel 4.3 Bobot Penilaian Program Berseri

	KRITERIA	BOBOT
1	Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	40%
2	Pengelolaan Lingkungan Hidup	30%
3	Pengelolaan Sumber Daya Alam	20%
4	Presentasi	10%

Sumber : Buku panduan Program Berseri BLH Jawa Timur, 2013

Penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan tujuan agar program lingkungan dapat menjadi suatu pembudayaan tidak hanya pada tingkat kepedulian dan wawasan. Penilaian Program Berseri ini menggunakan sistem *passing grade* / batasan penilaian.

Tahapan penilaian dilakukan secara dua tahap yaitu penilaian pada tingkat Kabupaten/Kota dan penilaian pada tingkat Provinsi. Penilaian pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh tim penilai Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Pelaksanaan penilaian dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan penilaian administrasi, apabila persyaratan administrasi terpenuhi dilakukan penilaian tahap kedua terkait aspek teknis. Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan rintisan tingkat Kabupaten/Kota dapat diusulkan ke Provinsi untuk diseleksi tingkat Provinsi menjadi Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari).

Penilaian di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh tim penilai Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Pelaksanaan penilaian dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan penilaian administrasi, apabila persyaratan administrasi terpenuhi maka dilakukan penilaian tahap kedua terkait aspek teknis.

Hasil tim Provinsi disampaikan kepada Gubernur dan tembusan disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi dan Desa/Kelurahan yang dinilai.

Penghargaan Berseri dibagi menjadi tiga kategori, Pratama, Madya dan Mandiri. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kelapa Desa/Kelurahan yang sudah memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan. Penghargaan yang diperoleh berupa : Thropy Gubernur Jawa Timur, Pembinaan dan Fasilitas barang stimulan bagi pengembangan program berseri tahap selanjutnya.

Bagi rintisan Berseri diberikan kepada Kepala Desa/Kelurahan oleh Bupati/Walikota dan memenuhi kriteria penilaian sesuai *passing grade* pembinaan diberikan yang diberikan kepada Kabupaten dan Kota. Hasil akhir penilaian (fisik dan non fisik) didasarkan *passing grade* prosentase nilai maksimal yang sudah ditetapkan yakni sebagai berikut :

Tabel 4.4 *Passing Grade* Penilaian Program Berseri

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	<i>PASSING GRADE</i> (%)
1	BERSERI TINGKAT MANDIRI	≥ 80
2	BERSERI TINGKAT MADYA	$70 \leq x < 80$
3	BERSERI TINGKAT PRATAMA	$60 \leq x < 70$
4	RINTISAN KABUPATEN/KOTA	< 60

Sumber : Buku panduan Program Berseri BLH Jawa Timur, 2013

Disamping berdasarkan hasil penilaian dengan *passing grade*, penentuan kategori penghargaan dengan mempertimbangkan tingkat penyebaran RW yang terlibat dalam kegiatan Desa/Kelurahan Berseri masing-masing Desa/Kelurahan yaitu:

- 1) Mandiri : minimal 4 RW atau semua RW bila jumlah RW kurang dari 4
- 2) Madya : minimal 3 RW atau 50% dari jumlah RW bila kurang dari 4
- 3) Pratama : minimal 2 RW (dalam satu RW bisa hanya satu RT yang dinilai)

Penilaian Program Berseri juga dilakukan secara fisik dengan melakukan peninjauan langsung ke kelurahan yang sudah menerapkan program tersebut. Penilaian dilakukan oleh panitia lomba Berseri pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. Selama peninjauan dilakukan beberapa kriteria penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) dengan bobot kebersihan 30%, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan bobot penghijauan 25%, Dinas Pertanian (Disperta) dengan bobot penghijauan 15%, Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan bobot kesehatan 15% dan Sanggar Indonesia Bhakti (LSM) dengan bobot habit 15%.

Setiap aspek pada penilaian Program Berseri juga dipengaruhi oleh beberapa kriteria yang memiliki bobot nilai tersendiri. Bobot nilai digunakan untuk menentukan tingkat prosentase nilai untuk setiap aspek nya. kriteria untuk setiap aspeknya meliputi :

Tabel 4.5 Lembar Penilaian Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP)

No	Keterangan	Kategori	Kriteria	Bobot Nilai	Nilai
1	Kebersihan Lingkungan (Penumpukan sampah liar)	Kurang	Berserakan dan bertumpuk	31-50	
		Sedang	Bertumpuk di tempat tertentu	51-65	
		Baik	Tidak ada sampah dan sudah terpilah	66-80	
2	Usaha mengurangi sampah	Kurang	Belum ada pemilahan sampah	31-50	
		Sedang	Sedikit sampah dan kurang terolah	51-65	
		Baik	Ada pemilahan sampah	66-80	
3	Kegiatan Lingkungan	Kurang	Tidak pernah dilakukan	31-50	
		Sedang	Dilakukan dan tentatif	51-65	
		Baik	Dilakukan rutin dan terjadwal	66-80	
4	Administrasi	Kurang	Tidak ada sama sekali	31-50	
		Sedang	Ada tapi tidak lengkap	51-65	
		Baik	Ada dan lengkap	66-80	
Jumlah Nilai					
Total Prosentase (30%)					

Tabel 4.6 Lembar Penilaian Badan Lingkungan Hidup (BLH)

No	Keterangan	Kategori	Kriteria	Bobot Nilai	Nilai
1	Penhijauan (Fisik Lingkungan)	Kurang	< 40% dari luas wilayah	31-50	
		Sedang	41% - 60% dari luas wilayah	51-65	
		Baik	> 61% dari luas wilayah	66-80	
2	Pemanfaatan Lahan	Kurang	Belum dimanfaatkan	31-50	
		Sedang	Dimanfaatkan tapi belum optimal	51-65	
		Baik	Dimanfaatkan dan sudah optimal	66-80	
3	Penataan Tanaman	Kurang	Tidak tertata	31-50	
		Sedang	Tertata tapi kurang terawat	51-65	
		Baik	Tertata dan terawat	66-80	
4	Administrasi	Kurang	Tidak ada sama sekali	31-50	
		Sedang	Ada tapi tidak lengkap	51-65	
		Baik	Ada dan lengkap	66-80	
Jumlah Nilai					
Total Prosentase (25%)					

Tabel 4.7 Lembar Penilaian Dinas Pertanian (Disperta)

No	Keterangan	Kategori	Kriteria	Bobot Nilai	Nilai
1	Program Urban Farming	Kurang	Tidak ada upaya sama sekali	31-50	
		Sedang	Ada upaya tetapi kurang mendukung	51-65	
		Baik	Ada upaya dari masyarakat	66-80	
2	Pemanfaatan Tanaman	Kurang	Tidak dimanfaatkan	31-50	
		Sedang	Kurang dimanfaatkan	51-65	
		Baik	Berjalan dan bermanfaat	66-80	
3	Keaneekaragaman Tanaman	Kurang	Ada < dari 2 jenis dan jumlah tanaman	31-50	
		Sedang	Ada > dari 3 jenis dan jumlah tanaman	51-65	
		Baik	Ada tertata dan terawat > dari 3 jenis	66-80	
4	Administrasi	Kurang	Tidak ada sama sekali	31-50	
		Sedang	Ada tapi tidak lengkap	51-65	
		Baik	Ada dan lengkap	66-80	
Jumlah Nilai					
Total Prosentase (15%)					

Tabel 4.8 Lembar Penilaian Dinas Kesehatan (Dinkes)

No	Keterangan	Kategori	Kriteria	Bobot Nilai	Nilai
1	Angka Bebas Jentik	Kurang	ABJ 50%	31-50	
		Sedang	ABJ 70%	51-65	
		Baik	ABJ 100%	66-80	
2	Pemahaman Kader Tentang PSN - DB - 3M	Kurang	Tidak paham	31-50	
		Sedang	Paham tetapi tidak dilakukan	51-65	
		Baik	Paham dan sudah dilakukan	66-80	
3	Akses Jamban Sehat	Kurang	Belum ada akses	31-50	
		Sedang	Sudah ada akses sebagian	51-65	
		Baik	Akses ada di setiap rumah	66-80	
4	Administrasi	Kurang	Tidak ada sama sekali	31-50	
		Sedang	Ada tapi tidak lengkap	51-65	
		Baik	Ada dan lengkap	66-80	
Jumlah Nilai					
Total Prosentase (15%)					

Tabel 4.9 Lembar Penilaian Sanggar Indonesia Bhakti (LSM)

No	Keterangan	Kategori	Kriteria	Bobot Nilai	Nilai
1	Kebiasaan warga terhadap sampah	Kurang	Membuang sampah sembarangan	31-50	
		Sedang	Membuang sampah ke bak sampah	51-65	
		Baik	Memilah sampah	66-80	
2	Partisipasi warga	Kurang	Warga tidak peduli	31-50	
		Sedang	50% dari jumlah warga	51-65	
		Baik	> 50% dari jumlah KK	66-80	
3	Pembiasaan warga terhadap lingkungan	Kurang	Warga tidak paham sama sekali	31-50	
		Sedang	Paham tetapi tidak melakukan	51-65	
		Baik	Paham dan dilakukan	66-80	
4	Administrasi	Kurang	Tidak ada sama sekali	31-50	
		Sedang	Ada tapi tidak lengkap	51-65	
		Baik	Ada dan lengkap	66-80	
Jumlah Nilai					
Total Prosentase (15%)					

Sumber : Buku panduan Program Berseri Badan Lingkungan Hidup Jatim, 2013

Keberhasilan Program Berseri diharapkan dapat memberikan efek yang lebih luas seperti terciptanya perluasan lapangan kerja, meningkatkan peran aktif para kader dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menuju Desa/Kelurahan yang Bersih, Sehat, Asri dan Lestari serta kapasitas masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pengembangan Program Berseri

memerlukan Tim Lintas Sektoral dan komponen masyarakat/LSM/Akademisi untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi. Mengingat akan permasalahan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor lain, serta adanya keterbatasan sumberdaya, maka untuk memajukan Program Berseri perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak.

3. Evaluasi *Output*

Evaluasi *output* adalah penilaian terhadap *output-output* yang dihasilkan dari Program Berseri. *Output* yang dihasilkan dari Program Berseri ini dapat berupa produk, jasa dan partisipasi masyarakat terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto. *Output* merefleksikan pencapaian hasil yang diinginkan dari data dan teori program.

Hubungan individu dengan lingkungannya menurut Woodworth yang dikutip oleh Sukmana (2003 : 23-24) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat dua dari empat jenis hubungan antara individu dan lingkungannya, yaitu individu dapat menggunakan lingkungannya dan individu dapat berpartisipasi dengan lingkungannya dapat dibuktikan oleh beberapa pernyataan berikut. Diungkapkan oleh Bapak Suwaji dalam wawancara pada tanggal 29 April 2015 yang bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto mengenai *Output* yang dihasilkan pasca Program Berseri dilaksanakan adalah sebagai berikut :

“Banyak perubahan yang terjadi selama berlangsungnya Program Berseri ini. Sebelum ada program ini, masyarakat kurang peduli/acuh pada lingkungan hidup. Banyaknya tumpukan sampah liar yang ada di lingkungan masyarakat. Belum terdapat bank sampah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup. Banyaknya wabah/sarang nyamuk. Banyaknya wabah penyakit. Namun, setelah berjalannya Program Berseri ini masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan hidup, Desa/Kelurahan yang bersih dan asri dari

sampah liar. Adanya bank sampah yang disediakan oleh pemerintah. Masyarakat lebih mengetahui banyak wawasan mengenai lingkungan hidup dengan diadakannya workshop dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Berkurangnya wabah/sarang nyamuk dengan diadakannya pelatihan kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) serta masyarakat sehat dan tentram.”

Dari pernyataan diatas, dampak dari Program Berseri cukup berarti.

Perubahan yang terjadi dari masyarakat yang sejak awal tidak peduli dengan lingkungan, mulai sedikit demi sedikit peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Banyak sampah liar yang sudah terkumpul dengan baik dengan adanya program bank sampah yang direkomendasikan oleh pemerintah. Masyarakat juga sudah memiliki pengetahuan lebih mengenai program 3R (*Reuse, Reduce* dan *Recycle*) serta berkurangnya wabah/sarang nyamuk dengan diadakan pelatihan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk.

Beberapa kelurahan di Kota Mojokerto sudah difasilitasi dengan bank sampah oleh pemerintah meskipun pembagiannya masih belum merata. Bank sampah didirikan sebagai wadah untuk membina, melatih, mendampingi, memberikan edukasi sekaligus membeli dan memasarkan hasil kegiatan pengelolaan sampah dari masyarakat di kelurahan tersebut. Dalam rangka pengurangan sampah di TPA serta untuk menunjang ekonomi kerakyatan, masyarakat Kota Mojokerto memanfaatkan sampah melalui program 3R serta mengubah perilaku masyarakat menuju lingkungan Kota Mojokerto yang bersih, asri dan lestari.

Bank sampah bertugas untuk melakukan pemilahan sampah plastik, kertas, logam maupun botol kaca. Pemilahan sampah tersebut merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Bank sampah masyarakat Kota Mojokerto. Bank sampah melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh sampah. Misalnya sampah yang masih bisa diolah kembali menjadi sebuah kerajinan akan disimpan terlebih dahulu. Sedangkan sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini juga diungkapkan oleh BY dalam wawancara pada tanggal 02 Juni 2015 bertempat di Kelurahan Surodinawan, ia menyatakan :

“Inovasi pemilahan sampah dilakukan itu oleh bank sampah Kota Mojokerto. Upaya ini merupakan terobosan yang sangat bagus dalam pengolahan sampah di Kota Mojokerto. Pemilahan sampah itu sekarang jadi sering dilakukan oleh masyarakat sini, tidak seperti dulu yang asal buang sampah sembarangan.”

Berdasarkan pernyataan diatas, Program Berseri sudah sedikit banyak membawa perubahan terhadap kebiasaan masyarakat khususnya di Kelurahan Surodinawan yang sudah melakukan pemilahan sampah. Tidak hanya dibedakan sampah basah dan kering saja, tetapi sudah mulai ada pengelompokan sampah dari jenisnya masing-masing. Pemilahan sampah pertama dilakukan oleh rumah tangga, sampah dibedakan menjadi sampah busuk (organik), sampah anorganik yang layak dijual dan tidak layak dijual serta sampah residu. Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kompos, yang baik digunakan untuk penghijauan lingkungan. Sedangkan sampah anorganik yang telah dipilah oleh masyarakat dapat langsung dijadikan kerajinan tangan.

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari impelentasi Program Berseri, baik untuk masyarakat dan lembaga pemerintahan, antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengorganisasi, merencanakan, mengelola dan menjaga kesinambungan program Desa/Kelurahan yang ramah lingkungan.
- b. Penguatan kapasitas lembaga pemerintahan Desa/Kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya.
- c. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa/Kelurahan tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan yang baik dan sehat.
- e. Meningkatkan kesadaran dan akses informasi kepada masyarakat Desa/Kelurahan, sehingga masyarakat dengan kesadaran sendiri ikut berpartisipasi dalam penanganan masalah lingkungan di wilayahnya.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan untuk mengungkit potensi lokal sebagai produk khas desa yang bernilai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan (ramah lingkungan).

4. Evaluasi Outcome

Setelah Program Berseri diimplementasikan di beberapa kelurahan di Kota Mojokerto dapat dilihat apakah Program Berseri dapat mengurangi permasalahan lingkungan hidup yang ada termasuk dalam hal ini adalah masalah pengelolaan

dan kelestarian lingkungan di Kota Mojokerto yang mulai diacuhkan oleh masyarakat? Sudah disampaikan sebelumnya bahwa Program Berseri adalah sebagai salah satu program dari Pemerintah Kota Mojokerto yang diharapkan mampu mengurangi permasalahan lingkungan.

Program Berseri juga juga membawa manfaat positif di dalam lingkungan masyarakat. Ada beberapa kelurahan di Kota Mojokerto yang menciptakan hasil karya dari pengolahan sampah menjadi barang kerajinan. Seperti yang diungkapkan oleh BY pada tanggal 02 Juni 2015 bertempat di kelurahan surodinawan antara lain :

“Sebenarnya banyak hasil pengolahan sampah yang tidak bermanfaat menjadi beberapa barang yang kita gunakan sehari-hari. Itu salah satu contohnya lampu yang dibuat dari sendok plastik dan botol aqua yang biasanya tidak digunakan lagi. Kemudian dari plastik bungkus sisa makanan bisa dijadikan karpet dan yang paling banyak itu bunga-bunga yang terbuat dari plastik. Ya dengan sedikit kreatifitas dan kemauan bisa jadi barang-barang seperti itu.”

Dari pernyataan diatas, didapatkan inovasi lain yang muncul dari masyarakat adalah dengan mendaur ulang sampah anorganik yang masih layak digunakan menjadi produk kerajinan. Bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto terhadap pengrajin produk daur ulang sampah adalah dengan memberikan pelatihan kepada kelompok binaan untuk mendaur ulang sampah anorganik yang masih layak menjadi produk baru. Pemerintah dan masyarakat setiap kelurahan Kota Mojokerto bersama-sama melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk mengolah limbah, memanfaatkan limbah, gerakan menanam dan merawat serta membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jenis sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan daur

ulang adalah kertas, kain perca, *Styrofoam* dan berbagai jenis plastik. Produk hasil daur ulang berupa lampu, bunga plastik, karpet, tempat pensil, kantong belanja, macam-macam tas dan tempat sampah.

Kegiatan lain yang dirasakan secara langsung di kelurahan Prajurit Kulon adalah pemanfaatan sampah anorganik menjadi tempat bunga sebagai penghias lingkungan disekitarnya. Setiap pendatang yang datang ke kampung tersebut pasti bisa merasakan manfaat positif dari Program Berseri yang dilaksanakan di kelurahan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh BS pada tanggal 02 Juni 2015 yang bertempat di kelurahan Prajurit Kulon,

“Dengan adanya Program Berseri, kampung ini jadi makin bersih dari sampah, itu yang tampak dari luar. Kalau lebih diperhatikan di sekitar kampung ini, banyak sampah-sampah yang dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sebagai pot-pot bunga dan digantung di dinding-dinding disamping gang kesini tadi. Selain bersih juga jadi lebih bagus kan.”

Dari pernyataan diatas, sampah selain sangat bermanfaat juga bisa memperindah taman dengan sedikit kreatifitas dari tangan-tangan terampil masyarakat. Beberapa manfaat inilah yang dirasa secara langsung dan membawa hal positif ke masyarakat akan pentingnya peduli akan kelestarian lingkungan.

Selain dilakukan daur ulang terhadap sampah anorganik, juga dilakukan inovasi pembuatan kompos yang dari sampah organik. Bentuk dukungan pemerintah dalam pembuatan kompos ini adalah dengan diadakannya pembinaan dan pelatihan pembuatan kompos yang diberikan kepada kader lingkungan. Pengelolaan sampah menjadi kompos, menjadikan sampah menjadi barang yang bernilai. Dengan adanya kompos organik ini membantu petani dalam memenuhi

kebutuhan akan pupuk, selain itu adanya tren dimasyarakat yang menggunakan produk organik semakin memberikan nilai tambah bagi kompos organik.

C. Analisis Data

1. Evaluasi Input

Program Berseri (Bersih dan Lestari) merupakan sebuah program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Mojokerto yang diambil dari Peraturan Gubernur Jawa Timur. Program Berseri dimulai di sejak awal tahun 2013 dan diaplikasikan ke beberapa Desa/Kelurahan di Kota Mojokerto. Program tersebut merupakan wadah bagi aspirasi kebutuhan masyarakat dan rumusan perwujudan cita-cita pembangunan daerah untuk jangka lima tahun dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan dengan strategi dan arah kebijakan umum pada kerangka program pembangunan daerah.

Program Berseri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Supardi (2003: 171), pengelolaan lingkungan hidup meliputi pengelolaan sumber daya alam dengan beberapa upaya yang dilakukan secara terpadu dan bertahan yaitu melakukan kegiatan pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan. Dari beberapa pernyataan diatas, Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan Program Berseri di beberapa kelurahan dengan harapan nantinya akan dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan.

Sesuai dengan teori pengertian program, menurut Abdul Wahab (2008: 17), Program adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan atau legitimasi, pengorganisasian dan pengarahan atau penyediaan sumber-sumber yang diperlukan. Pengimplementasian Program Berseri di Kota Mojokerto selama ini sudah cukup efektif, namun masih terkesan terlalu terpusat hanya pada beberapa Desa/Kelurahan yang sudah menerapkan program tersebut. Sehingga masih perlu adanya sosialisasi dan partisipasi lebih mengenai Program Berseri di Kota Mojokerto, agar sifat peduli terhadap lingkungan juga dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto. Apabila masyarakat sudah lebih mulai peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak menutup kemungkinan bahwa Kota Mojokerto sebagai salah satu kota yang berperan aktif menuju *Green City*.

Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto pernah melakukan kegiatan penghijauan kota dengan menanam ± 9.600 bibit pohon pada tahun 2010, ± 2.400 bibit pohon pada tahun 2011, dan ± 500 bibit pohon pada tahun 2012. Pemerintah Kota Mojokerto juga mengikutsertakan masyarakat dalam usaha meningkatkan kawasan hijau seperti halnya penanaman pohon tersebut. Hal ini sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah yaitu Program Berseri yang berorientasi kepada lingkungan sekitar.

Tabel 4.10 Kegiatan Penghijauan Kota Mojokerto

No	Tahun	Jumlah Penanaman Bibit Pohon
1	2010	± 9.600 bibit pohon
2	2011	± 2.400 bibit pohon
3	2012	± 500 bibit pohon

Sumber : Sistem informasi Pemerintah Kota Mojokerto, 2015

Program Berseri harus sesuai dengan klarifikasi pemerintah dalam perancangan program serta perlu adanya sebuah evaluasi agar berjalannya program tersebut menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan terjemahan dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, menurut Arikunto (2010:18) evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan. Mengacu pendapat dari Arikunto diatas, Program Berseri harus dilaksanakan dengan menggunakan beberapa strategi seperti pemanfaatan bank sampah, dilakukan pemilahan sampah dan pemanfaatan sampah anorganik yang dapat dimanfaatkan. Apabila program tersebut bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Mojokerto, maka tidak menutup kemungkinan visi Kota Mojokerto dapat diwujudkan. Semestinya Program Berseri bisa diimplementasikan oleh seluruh kelurahan yang ada agar seluruh masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam di Kota Mojokerto harus dikelola secara berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Program konservasi sumber daya alam bertujuan untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Program lain pemerintah selain Program Berseri yang berkaitan

dengan permasalahan tersebut diantaranya adalah Program Menuju Indonesia Hijau. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia pada tanggal 12 Juni 2014, Kementerian Lingkungan Hidup mencanangkan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) yang bertujuan untuk melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah kota dalam penataan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Melalui Program MIH pemerintah kota didorong untuk meningkatkan konservasi lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkungan melalui sistem insentif dan disinsentif dan membuka peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Indikator dari program ini adalah tersedianya pedoman pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan, sistem penilaian dan kriteria, pedoman pemantauan dan evaluasi. Indikator lain dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pemantauan dan verifikasi lapangan untuk pemetaan kondisi permasalahan lingkungan dan pembinaan dalam perumusan kebijakan/program sesuai kebutuhan setempat. Indikator yang tidak kalah penting bagi kegiatan ini adalah penilaian kinerja dalam pelaksanaan konservasi, penanggulangan dan pemilihan kerusakan lingkungan.

Untuk merealisasikan program lain ini, berbagai upaya yang mengarah terwujudnya Indonesia Hijau telah dilakukan, di antaranya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Mengembangkan penerapan pengelolaan lingkungan melalui pengembangan lokasi dan bantuan teknis bagi penerapan program di daerah, bertumpu pada komitmen dan kerja

sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mendorong diterapkannya secara konsisten prinsip, metodologi dan prosedur pengelolaan lingkungan secara terpadu dan ketataprajaan lingkungan yang baik (*good environmental governance*) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya serta pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pencapaian tujuan ekologis, ekonomis dan sosial. Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan program aksi di tingkat nasional dan daerah di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

2. Evaluasi *Process*

a. Strategi Pelaksanaan Program Berseri

Selama peneliti melakukan penelitian di lapangan, hanya ada 11 dari 18 kelurahan yang mengimplementasikan Program Berseri. Dari 11 kelurahan tersebut, sudah 80% kelurahan mengimplementasikan program tersebut dengan cukup baik. Sudah tampak perbedaan tingkah laku masyarakat mengenai kepedulian terhadap lingkungan sebelum dan sesudah diadakannya Program Berseri. Namun, juga masih ada kelurahan yang dianggap belum sepenuhnya peduli terhadap permasalahan lingkungan. Mereka hanya beranggapan bahwa masalah lingkungan adalah tugas dari pemerintah untuk menanggulangnya. Hal seperti inilah yang dianggap sebagai salah satu penghambat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di Kota Mojokerto.

Dengan menerapkan Program Berseri di Kota Mojokerto, pemerintah siap mengentas permasalahan lingkungan yang selama ini terjadi yaitu kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungan sekitar. Menurut Arikunto (2010:38)

mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan dari program sudah dapat terealisasi. Pemerintah Kota Mojokerto telah melaksanakan Program Berseri di beberapa kelurahan yang memenuhi kriteria dalam pelaksanaannya. Jika mengacu pada pendapat Arikunto (2010:38), Pemerintah Kota Mojokerto sudah melakukan proses dalam melaksanakan kebijakan yang diambil dari Peraturan Gubernur Jawa Timur dan tujuan dari program tersebut sudah tepat pada sasaran. Hal ini tercermin dari masyarakat yang sudah mewujudkan beberapa perilaku sehat seperti lingkungan yang bersih dari sampah, bebas dari pembakaran sampah, sarana pemilahan dan pengelolaan sampah, pengembangan program manajemen sampah (*Reuse, Reduce, Recycle*, Sosial Bank Sampah), drainase dan sanitasi yang dikelola dengan baik, pengelolaan limbah cair domestik sebelum dibuang ke media lingkungan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, penghijauan, keteduhan jalan dan fasilitas umum yang terpelihara, pelestarian dan pengembangan tanaman langkahan dan tanaman obat-obatan.

Sebagaimana dikutip oleh Wildsmith (2009), *green city* (kota hijau) juga dapat disebut *sustainable city* (kota yang berkelanjutan) atau *eco-city* (kota berbasis ekologi), yaitu kota yang dalam melaksanakan pembangunan didesain dengan mempertimbangkan lingkungan sehingga fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan. Mengacu pendapat dari Wildsmith diatas, dengan pelaksanaan Program Berseri ini tampak masyarakat lebih memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka seperti pemanfaatan tanah lapang menjadi salah satu lahan hijau, pemanfaatan sampah dengan melakukan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Pemanfaatan sampah yang tampak adalah dengan adanya sosialisasi tentang pemanfaatan sampah anorganik yang masih bisa diolah kembali menjadi kerajinan tangan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan masih banyak dijumpai beberapa kendala dalam pengimplementasian Program Berseri. Yang pertama, Program Berseri masih belum diberlakukan di seluruh kelurahan sehingga menyebabkan sosialisasi terhadap permasalahan yang ada di Kota Mojokerto masih belum menyeluruh dan seluruh masyarakat belum memiliki kepedulian tentang permasalahan lingkungan. Yang kedua adalah biaya dari pemerintah untuk Program Berseri yang minim Sehingga masyarakat tidak dapat melaksanakan program sesuai dengan ekpektasi pemerintah. Yang ketiga adalah kurangnya media sarana prasarana yang dimiliki masyarakat seperti minimnya bank sampah yang mengakibatkan sampah akan menumpuk di TPA dengan 10% sampah yang tidak terangkut setiap harinya. Yang keempat adalah sumber daya manusia yang minim akan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal ini merupakan masalah yang paling mendasar karena merupakan kebiasaan untuk melakukan kegiatan yang peduli terhadap lingkungan. Apabila kebiasaan ini tidak dilakukan setiap hari, maka bisa dipastikan Program Berseri tidak akan berjalan dengan optimal.

b. Kriteria Penilaian Program Berseri

Kriteria penilaian dalam Program Berseri merupakan tolak ukur apakah program tersebut sudah dilaksanakan sesuai Kebijakan Pemerintah atau jauh dari harapan pemerintah. Terdapat tiga faktor penting dalam kriteria penilaian Program

Berseri yaitu, kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Peneliti merasa bahwa dalam faktor kelembagaan dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting karena kelembagaan dan partisipasi masyarakat adalah wadah diadakannya Program Berseri serta pemilihan kader di setiap kelurahan yang bertanggung jawab atas suksesnya program tersebut. Kader yang bertanggung jawab pada setiap kelurahan hanya diikuti oleh beberapa orang saja seperti kepala kelurahan, kepala RW dan RT setempat. Peneliti berharap kader yang ditunjuk oleh pemerintah adalah dari kalangan masyarakat umum agar semua lapisan masyarakat mempunyai andil dalam Program Berseri.

Pengelolaan lingkungan hidup juga termasuk dalam kriteria penilaian Program Berseri. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pengelolaan lingkungan di beberapa kelurahan yang sudah menerapkan Program Berseri sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan pemerintah tentang penanggulangan masalah lingkungan. Salah satu contohnya pada Kelurahan Surodinawan, masyarakat setempat sudah merasakan hasil dari program tersebut seperti sudah tersedianya fasilitas pengolaan sampah, kegiatan daur ulang sampah anorganik, proses pemanfaatan sampah dalam pembuatan kompos, pemilahan sampah anorganik yang masih bisa dimanfaatkan serta perilaku berbudaya lingkungan yang sudah terlihat di kelurahan tersebut dengan tidak ditemukannya lagi sampah liar di lingkungan sekitar.

Proses penilaian Program Berseri sendiri sudah melibatkan beberapa instansi dalam pelaksanaan penilaiannya seperti dari Dinas Kebersihan dan

Pertamanan (DKP), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kesehatan (Dinkes) serta dari Sanggar Indonesia Bhakti (LSM). Peneliti beranggapan bahwa proses penilaian seperti ini sudah optimal karena didapatkan hasil penilaian yang obyektif. Hasil bobot nilai dari setiap Kelurahan merupakan kalkulasi prosentase dari setiap instansi dan LSM yang ditunjuk sebagai juri dalam pelaksanaan Program Berseri. Keberhasilan Program Berseri diharapkan dapat memberikan efek yang lebih luas seperti terciptanya perluasan lapangan kerja, meningkatkan peran aktif para kader dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menuju Desa/Kelurahan yang Bersih, Sehat, Asri dan Lestari serta kapasitas masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

3. Evaluasi Output

Seluruh indikator dalam *input* serta proses dalam Program Berseri menghasilkan keluaran, salah satunya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan hidup dari sebelum diadakannya program tersebut. Sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2010:127), evaluasi *output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik. Mengacu pendapat Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2010:127), hasil yang diharapkan dari Program Berseri telah terlihat. Hasil tersebut antara lain Desa/Kelurahan menjadi lebih bersih dan asri dari sampah liar. Adanya bank sampah yang disediakan oleh pemerintah. Masyarakat lebih mengetahui banyak wawasan mengenai lingkungan hidup dengan diadakannya *workshop* dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan

oleh pemerintah. Berkurangnya wabah/sarang nyamuk dengan diadakannya pelatihan kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk).

Jika dapat diambil kesimpulan, inti masalah utama dari Program Berseri adalah kurangnya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam perilaku peduli terhadap lingkungan. Sehingga dibutuhkan sebuah inovasi dalam menangani masalah lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan instansi lain. Dari permasalahan tersebut diambil sebuah kebijakan dari Pemerintah Kota Mojokerto yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Salah satu output dari Program Berseri yang sangat tampak adalah bank sampah di beberapa kelurahan. Bank sampah digunakan sebagai wadah untuk membina, melatih, memberikan edukasi sekaligus memasarkan dari hasil kegiatan pengelolaan sampah dari masyarakat di kelurahan tersebut. Hal ini akan berdampak pada penanganan sampah yang sudah mulai menumpuk. Dengan adanya bank sampah ini, akan mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Sebelum sampah dibuang, masyarakat juga melakukan program 3R (*Reuse, Reduce and Recycle*). Jadi pemanfaatan sampah akan lebih terorganisir dengan penerapan Program Berseri ini.

Output lain yang tampak dari penerapan Program Berseri adalah masyarakat mulai membedakan jenis sampah yang ada. Tidak hanya dibedakan sampah basah dan kering saja, tetapi sudah mulai jenis sampah organik, anorganik yang masih bisa diolah kembali. Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kompos, yang baik digunakan untuk penghijauan

lingkungan. Sedangkan sampah anorganik yang telah dipilah oleh masyarakat dapat langsung dijadikan kerajinan tangan. Dengan diadakannya Program Berseri di Kota Mojokerto ini semakin meningkatkan kesadaran dan akses informasi kepada masyarakat Desa/Kelurahan, sehingga masyarakat dengan kesadaran sendiri ikut berpartisipasi dalam penanganan masalah lingkungan di wilayahnya. Bukan hanya sekedar tanggung jawab kader yang ditunjuk sebagai panitia, tetapi harapan pemerintah adalah seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto memiliki kesadaran lebih tentang menjaga lingkungan sekitar.

Implementasi Program Berseri selama ini juga menunjang adanya *Good Environmental Governance*. Menurut Anwar (2009:4) *Good Environmental Governance* adalah organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya campur tangan pemerintah dan masyarakat publik yang bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan agar lingkungan tidak rusak dan tercemar sehingga dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia, makhluk hidup serta semua elemen didalam lingkungan. Pemerintah dan masyarakat membentuk kader-kader yang bertanggung jawab dalam mendapatkan produktifitas dan kebersihan lingkungan hijau yang lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat dengan lebih menjaga kelestarian lingkungan

4. Evaluasi Outcome

Implementasi inovasi Program Berseri memberikan pandangan bahwa masalah lingkungan yang terjadi di Kota Mojokerto bisa segera ditanggulangi. Program Berseri merupakan salah satu upaya nyata pemerintah kota dalam

mengurangi masalah sampah serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan di sekitar mereka. Evaluasi *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung. Namun, berdasarkan penelitian di lapangan, kondisi Kota Mojokerto tampaknya masih belum bisa terlepas dari kondisi dimana sampah masih terdapat di sudut-sudut kota khususnya daerah yang masih belum menerapkan Program Berseri. Dengan kata lain, masalah lingkungan masih merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Dengan diadakannya Program Berseri di beberapa kelurahan yang ada di Kota Mojokerto, pemerintah berharap bahwa masalah lingkungan seperti ini bukan merupakan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat sekitar.

Hasil *outcome* yang dirasakan secara langsung di beberapa kelurahan yang sudah menerapkan Program Berseri adalah sudah tampaknya pemilahan sampah yang sebelumnya hanya dipandang semua sampah adalah barang yang tidak berguna. Hal ini didukung dengan kondisi lingkungan di beberapa kelurahan yang sudah terbebas dari sampah liar. Sampah sudah mulai dipilah dari sampah organik, anorganik yang masih bisa dimanfaatkan dan sampah anorganik yang sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Perilaku masyarakat juga banyak mengalami perubahan dengan mulai peduli terhadap lingkungan sekitar sampai menjaga kelestarian lingkungan yang sudah bersih itu.

Di Kelurahan Surodinawan pemilahan sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan kembali sudah berjalan dengan baik. Hal ini tampak dengan adanya bank sampah yang sudah beroperasi di kelurahan tersebut. Selain itu, masyarakat

Surodinawan sudah mulai memanfaatkan sampah anorganik menjadi beberapa kerajinan tangan seperti lampu, taplak meja, karpet, vas bunga, tas, tempat tissue dan hiasan rumah tangga lainnya. Dengan kepedulian masyarakat di kelurahan yang menerapkan Program Berseri, diharapkan masyarakat lebih peduli akan kebersihan lingkungan tidak hanya pada saat penilaian semata tetapi selama pasca dilaksanakannya program.

Sebenarnya masih banyak upaya lain yang diinstruksikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka mengurangi kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan. Salah satunya adalah Program Adiwiyata yang dicanangkan pemerintah di beberapa sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan sejak dini mengenai menjaga kelestarian lingkungan. Kebersihan lingkungan diterapkan sejak dini agar dimasa mendatang, generasi muda sudah mulai peduli terhadap lingkungan. Sayangnya Program Adiwiyata di Kota Mojokerto hanya diaplikasikan di empat sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas saja. Dengan adanya program lain selain Program Adiwiyata dan Program Berseri, Pemerintah Kota Mojokerto mengharapkan kepedulian terhadap lingkungan diajarkan dan dididik diseluruh lapisan masyarakat dari usia muda sampai tua. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terhadap pelaksanaan Program Berseri di Kota Mojokerto, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan *Input* Program Berseri Kota Mojokerto dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim, Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*). Selain itu, Program Berseri dilaksanakan karena dorongan dari masyarakat dengan adanya berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Mojokerto seperti halnya pembuangan sampah tidak pada tempatnya, banyaknya sampah liar yang mengotori keindahan kota, kondisi kota yang panas karena kurangnya penanaman pohon, terjadi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah serta kurangnya kepedulian dari masyarakat dengan masalah terkait. Sehingga dibutuhkan sebuah program yang mampu mengurangi permasalahan lingkungan yang ada, yaitu Program Berseri.
2. Pelaksanaan Program Berseri di Kota Mojokerto sudah cukup efektif dengan beberapa strategi yang dilakukan. Program Berseri juga dilakukan dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan

masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Kota Mojokerto yang Bersih, Asri dan Lestari. Kerja sama pemerintah dan masyarakat ditunjukkan dengan adanya dukungan dari pemerintah dengan diadakannya pelatihan-pelatihan untuk masyarakat dan didukung dengan partisipasi masyarakat yang antusias menjalankan serangkaian program. Namun, selama pelaksanaan program ini masih kurangnya dukungan dari pemerintah seperti belum banyaknya pengadaan bank sampah di setiap kelurahan. Penilaian Program Berseri juga dirasa sudah cukup baik dengan dilakukannya penilaian yang obyektif oleh beberapa instansi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kota Mojokerto.

3. *Output* yang dihasilkan dari Program Berseri sudah tampak dengan bertambahnya wawasan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah yang melakukan sosialisasi lebih serta melakukan pelatihan-pelatihan ke masyarakat Kota Mojokerto. Melalui Program Berseri juga didapatkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar yang bekerja sama demi tercapainya hasil dari program tersebut. Usaha dari pemerintah tidak terlihat sia-sia apabila disambut antusias oleh masyarakat tentang pelaksanaan Program Berseri. Dari kerjasama yang baik ini dipilihlah kader-kader yang bertanggung jawab atas berhasilnya sebuah kelurahan melaksanakan program tersebut.

4. Hasil yang tampak secara langsung dengan adanya Program Berseri adalah dengan adanya pemilahan sampah yang sebelumnya masih belum dilakukan. Dengan adanya pemilahan sampah, masyarakat dapat melakukan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dari pemerintah. Dari program tersebut didapatkan *feedback* berupa kerajinan tangan dari sampah anorganik yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Sudah banyak kerajinan tangan yang dihasilkan dari pemilahan sampah tersebut seperti lampu hias, dompet, tas, karpet, serta kerajinan tangan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk perbaikan kinerja sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Mojokerto seharusnya lebih memperhatikan adanya berbagai permasalahan lingkungan yang ada di Kota Mojokerto, khususnya adanya permasalahan mengenai pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya dan adanya sampah liar yang merusak keindahan Kota Mojokerto, sehingga dengan dilaksanakannya Program Berseri juga dapat menyelesaikan sumber persoalan lingkungan yang ada di Kota Mojokerto agar tujuan dan sasaran dari program sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pelaksanaan Program Berseri di Kota Mojokerto sudah cukup efektif. Hal ini akan lebih baik lagi apabila program tersebut dapat dilaksanakan di

seluruh kelurahan di Kota Mojokerto tanpa pengecualian. Dengan demikian setiap masyarakat Kota Mojokerto akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih akan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Sebaiknya juga, pemerintah harus membuat peraturan bagi masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan dan masih menganggap remeh hal ini harus diberi sanksi apabila telah melanggarnya. Kemudian pemerintah sebaiknya mengadakan panitia khusus untuk pengadaan bank sampah yang selama ini masih belum merata di setiap kelurahan. Selain itu kriteria penilaian Program Berseri sebaiknya dilakukan setiap bulan agar konsistensi dari masyarakat akan kelestarian lingkungan di sekitar mereka akan lebih terjaga. Penilaian program tersebut selain dilakukan oleh pemerintah, instansi lain dan LSM sebaiknya juga diikuti oleh kader-kader dari setiap kelurahan untuk mengetahui letak kekurangan dari setiap kelurahan.

3. Dengan *output* yang dihasilkan saat ini, sebaiknya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah lebih diperbanyak dengan melakukan pelatihan secara bergilir agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengolah sampah yang dihasilkan. Setelah dilakukan pelatihan, sebaiknya *skill* yang diperoleh segera dilaksanakan agar manfaat dari program tersebut lebih dirasa oleh seluruh masyarakat di Kota Mojokerto.
4. Dengan adanya *outcome* yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang berupa pengolahan sampah (anorganik), maka sebaiknya lebih dikembangkan lagi pemanfaatan sampah di setiap kelurahan untuk

meningkatkan pendapatan/kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu optimalisasi pemanfaatan hasil pengolahan sampah yang selama ini sudah dilakukan, baik sampah organik maupun anorganik.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto Suharsimi dan Abdul Jabar Cepi Safrudin. 2008, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan edisi ke 2*. Jakarta : Bumi Aksara
- Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)
- Dimiyati dan Mudjiono. 2006, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Djudju Sudjana. 2006, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung : PT. Rosdakarya
- Gie, The Liang. 1972, *Administrasi Perkantoran Modern, Edisi Keempat*. Yogyakarta : Liberty
- Helmi. 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Sinar Grafika
- Manalu. “*Pendayagunaan E-government untuk Mendukung Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Institusi Pemerintah Daerah*”. (Diunduh pada 20 Februari 2015)
- Pasolong, Harbani. 2008, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Panduan Program “Berseri” mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Hijau
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan Hidup (PP 27/2012)
- Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2014
- Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*)
- Santosa, H.T.I. 2006, *Amdal dan Upaya Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Yustika

- Setiawan. 2003, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University
- Shadily dan Echols. 2000, *Kamus Terjemahan Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta : UI-PRES
- Siagian, Dr. S.P. 1977, "*Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*", cetakan ketiga. Jakarta : Gunung Agung
- Soemartono, Gatot. 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soemarwoto, Otto. 1994, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Bandung : Djambatan
- Soenarko. 2005, *Public Policy*. Surabaya : Unair Press
- Sugandhy, Aca & Rustam Hakim. 2009, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Supardi, Imam. 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung : PT. Alumn
- Supriadi. 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia : Sebuah Pengantar*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2010, *Ilmu Administrasi Publik : Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. 2008, *Kebijakan Pendidikan :Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 65 ayat (1)
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 12 ayat (1)
- Wahab, Solichin Abdul. 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
- Winarno, Joko. 2008, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing
- Yunanda, Ari. 2010, *Evaluasi Program Pendidikan pada Pendidikan Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara

- Eprints. 2011. *Teori Kebijakan Publik*. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id> pada tanggal 02 Maret 2015 pada pukul 14.00 WIB
- Muhammad. 2012. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Diakses dari muhammadong.wordpress.com pada tanggal 07 maret 2015 pukul 19.30 WIB
- Orath. 2012. *Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial*. Diakses dari orathforever.com pada tanggal 07 maret 2015 pada pukul 20.00 WIB
- Septian. 2010. *Pencemaran Lingkungan*. Diakses dari ipb.ac.id pada tanggal 05 maret 2015 pada pukul 19.30 WIB
- Teori Evaluasi Program*. 2011. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id> pada tanggal 02 Maret 2015 pada pukul 14.30 WIB





PROFIL
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2011



BAB I PENDAHULUAN

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 55 B Mojosari Mojokerto mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral (ESDM) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2008,. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mempunyai 42 karyawan/karyawati yang terdiri dari golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak .13 orang, golongan III sebanyak 20 orang, golongan IV sebanyak 8 orang, yang dipimpin oleh Kepala badan yang dibantu oleh 1 sekretaris dan 4 bidang yang meliputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup, Bidang Pertambangan Dan Sumber Daya Mineral, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dan 1 unit teknis yaitu Unit Pelayanan Terpadu Laboratorium Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sudah memperoleh beberapa penghargaan baik di tingkat propinsi maupun tingkat nasional yaitu :

1. Penghargaan Adipura Tingkat Nasional sejak tahun 2009/2010;
2. Penghargaan Adiwiyata tingkat Propinsi dan tingkat nasional
3. Juara 2 lomba budaya kerja tingkat Propinsi;

Dan saat ini target prestasi yang diharapkan adalah tercapainya Kota Mojosari sebagai kota berpredikat Adipura kejcana.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1 Motto, Visi dan Misi Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto bersama-sama jajarannya telah menetapkan visi dan misi untuk mencapai tujuannya.

1. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen mumi tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadikan milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan yang ada di Bdan Lingkungan Hidup. Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tergambarakan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :

" Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan "

Visi tersebut diatas memberikan pengertian sebagai berikut :

Bahwa pembangunan di segala bidang tetap dilaksanakan dalam rangka peningkatan perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi harus tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi, yaitu :

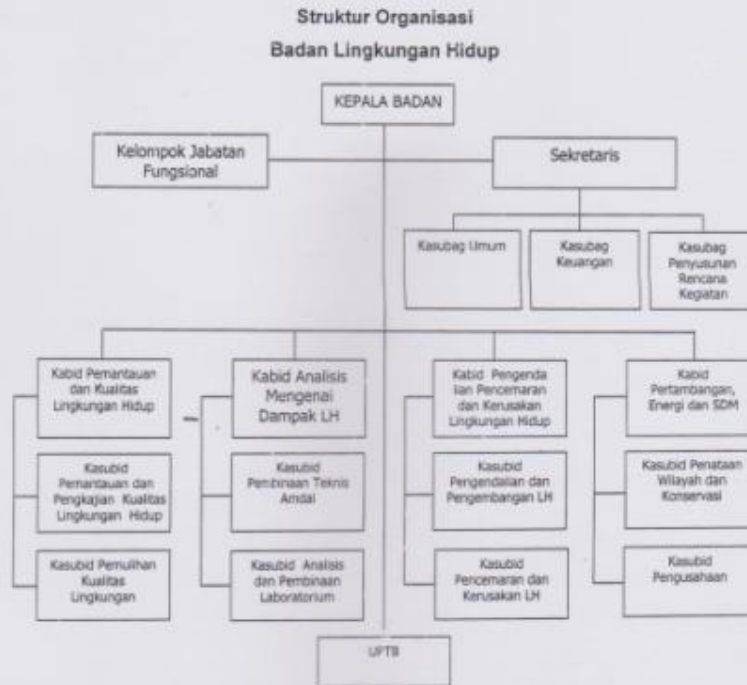
- a. Meningkatkan kualitas penyusunan rencana Program Badan Lingkungan dalam pengelolaan pengendalian dampak, penyusunan informasi lingkungan dan pengelolaan pertambangan dan energi, meningkatkan pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga serta meningkatkan pelaksanaan proses administrasi penegak peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan pertambangan;
- b. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

- c. Meningkatkan pengembangan kelembagaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Meningkatkan pembinaan teknis Amdal, UKL dan UPL dan pengkajian serta pembinaan laboratorium;
- e. Meningkatkan upaya penataan wilayah dan konservasi, pengusahaan serta pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dan energi.

2.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan



2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Lingkungan Hidup sebagaimana Perda Nomor 12 Tahun 2008 mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut :

1. **Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto**, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Lingkungan Hidup.
2. **Sekretariat**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup meliputi urusan umum, keuangan dan penyusunan rencana kegiatan.
Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pengelolaan surat menyurat dan tata kearsipan serta tugas-tugas keprotokolan;
- 2) Melakukan urusan rumah tangga;
- 3) Melakukan tata usaha kepegawaian;
- 4) Mengelola administrasi tentang kedudukan, hak dan kewajiban pegawai, peningkatan karier pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- 5) Menyiapkan data dalam rangka menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan;
- 6) Melakukan tata usaha pemeliharaan perlengkapan dan peralatan;
- 7) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat.

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- 2) Melaksanakan pengelolaan keuangan, gaji pegawai serta pertanggungjawabannya;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretariat.

c. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- 2) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- 3) Melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan pertambangan;
- 4) Melakukan pemeliharaan dan pengarsipan dokumen proses administrasi penataan lingkungan hidup;
- 5) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program di Badan Lingkungan Hidup guna pengendalian dampak lingkungan;
- 6) Melakukan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta menyusun informasi lingkungan;
- 7) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. **Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup**, yang mempunyai tugas Badan Lingkungan Hidup yang meliputi pemantauan dan pengkajian kualitas lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan..

Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemantauan dan Pengkajian Kualitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara ambient dan emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
- 2) Melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan perkotaan dan kualitas air pada sumber air;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada usaha/kegiatan dan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya;
- 4) Melaksanakan pengkajian kualitas udara, air pada sumber air dan SDA lainnya;
- 5) Melaksanakan penetapan kelas air pada sumber air dan upaya pentaatan persyaratan yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup

b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan, mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan teknis program pemulihan kualitas lingkungan;
- 2) Melaksanakan pengkajian batasan-batasan dan kondisi lingkungan hidup yang dikategorikan sebagai kondisi yang memerlukan tindakan pemulihan kualitas lingkungan serta merancang tindakan yang diperlukan;
- 3) Melaksanakan inovasi pengembangan metode pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi pemulihan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan penanggung jawab usaha/kegiatan dan masyarakat;
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi pemulihan kualitas udara ambient perkotaan dengan program langit biru dan penataan ruang terbuka hijau;
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi SDA dengan keanekaragaman hayati;

- 7) Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat;
- 8) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Kualitas Lingkungan Hidup.

4. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup yang meliputi pembinaan teknis AMDAL, dan analisis serta pembinaan Laboratorium

a. Sub Bidang Pembinaan Teknis Amdal, mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis AMDAL serta UKL dan UPL;
- 2) Melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan pelaksanaan proses dan peraturan AMDAL serta UKL dan UPL;
- 3) Melakukan penilaian Amdal bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/kota, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 4) Melakukan pemberian rekomendasi UKL dan UPL;
- 5) Melakukan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan, baik yang wajib maupun yang tidak wajib dilengkapi Amdal;
- 6) Melakukan koordinasi pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
- 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi ijin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas, rekomendasi ijin lokasi pengolahan limbah B3, dan rekomendasi ijin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- 8) Melakukan koordinasi pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, pelaksanaan system tanggap darurat, serta penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);

- 10) Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 11) Melaksanakan pemberian perijinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- 12) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- 13) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

b. Sub Bidang Analisis dan pembinaan Laboratorium, mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan laboratorium, penelitian kualitas lingkungan hidup, rekayasa kemampuan hayati lingkungan, pengembangan pemeriksaan dan analisis contoh uji;
- 2) Melakukan penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 3) Mengembangkan dan mengelola laboratorium serta memberikan layanan jasa;
- 4) Melakukan pengawasan kualitas metodologi pengujian dan hasil uji laboratorium serta melakukan pengujian contoh uji air, air limbah, udara dan kualitas lingkungan;
- 5) Memelihara dan merawat peralatan serta pengadaan bahan laboratorium;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

Hidup, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup yang meliputi pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup serta pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi :

a. Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan kebijaksanaan teknis Pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup;
- 2) Melakukan pengkajian dan koordinasi dibidang Pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup;
- 3) Melakukan pemantauan dan analisis kegiatan pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup;
- 4) Melakukan bimbingan teknis dibidang pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup;
- 5) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pemberian perijinan dibidang pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan, pengelolaan dan/atau pembuangan limbah;
- 6) Mengawasi dan mengendalikan perijinan dibidang pengendalian pengelolaan dampak lingkungan dan pembuangan limbah;
- 7) Melaksanakan pemberian ijin lingkungan, ijin pembuangan limbah cair dan ijin gangguan/HO;
- 8) Melakukan pembinaan dan koordinasi perijinan pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan, pengolahan dan pembuangan limbah;
- 9) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

b. Sub Bidang Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Melaksanakan kebijaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Melakukan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
- 4) Menyusun laporan tentang pengawasan dan pengendalian tentang kerusakan lingkungan;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

6. Bidang Pertambangan, Energy dan Sumber Daya Mineral, melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup meliputi penataan wilayah dan konservasi serta pengusahaan.

Bidang Pertambangan, Energy dan Sumber Daya Mineral meliputi :

a. Sub Bidang Penataan Wilayah dan Konservasi, mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis sebagai dasar penataan dan konservasi lokasi pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- 2) Mengadakan inventarisasi dan pendataan wilayah pertambangan, energi dan sumber daya mineral, panas bumi, migas dan air tanah;
- 3) Penetapan wilayah potensi dan wilayah konservasi terhadap pertambangan, energi dan sumber daya mineral, panas bumi, migas dan air tanah;
- 4) Pengelolaan data dan informasi pertambangan, energi dan sumber daya mineral, panas bumi, migas dan air tanah serta pengusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan;
- 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan ijin dan penertiban ijin pertambangan, energi dan sumber daya mineral, panas bumi, migas, air tanah, kelistrikan dan bahan Bakar Minyak (BBM);
- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral.

b. Sub Bidang Pengusahaan, mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis sebagai dasar kegiatan pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- 2) Pemberian rekomendasi teknis untuk ijin pengeboran, ijin penggalian dan ijin pengambilan air bawah tanah;

- 3) Melakukan pembinaan, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang terhadap usaha pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- 4) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral

7. UPT Laboratorium Lingkungan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengujian laboratorium lingkungan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah.

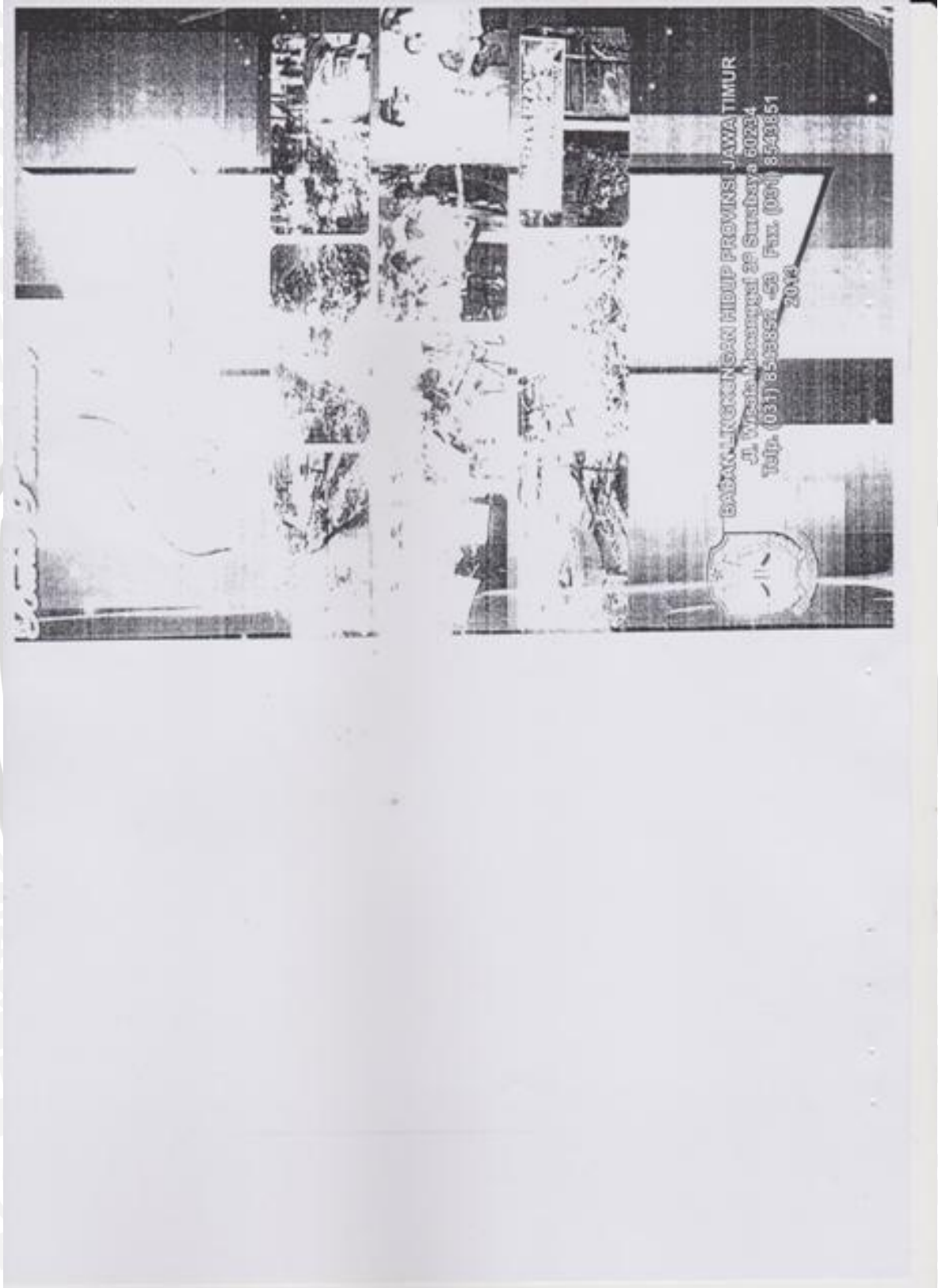
UPT Laboratorium Lingkungan terdiri atas Kepala, sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional :

a. Sub Bagian Tata usaha, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja;
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- 5) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT laboratorium Lingkungan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



BABAK LUTENGGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Wreccas Mangrove 29 Surabaya 60234
Telp. (031) 8548851 - 53 Fax. (031) 8549851
2014



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga penyusunan Buku Panduan Umum Program BERSERI dapat diselesaikan penyusunannya.

Program "BERSERI" (Bersih dan Lestari) merupakan salah satu strategi untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di anju Desa/Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri. Dengan program ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur dan untuk menuju Provinsi Hijau.

Dalam buku ini merupakan edisi kedua dan terdapat beberapa revisi dan penyesuaian terkait dengan kebijakan dan tata cara penilaian.

Dalam buku ini disajikan latar belakang, tujuan, kebijakan dan strategi dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari, juga diampirkan kriteria penilaiannya. Melalui buku ini diharapkan dapat dipakai Pedoman baik oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa / Kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Disadari buku panduan ini masih sangat terbatas baik dalam segi maupun teknis penyajiannya, oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Akhirnya Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang dan semoga buku ini memberikan manfaat kepada kita semua.

Surabaya Desember 2013
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur

(Signature)
NOVA WISAKA, SH
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Pelaksanaan
- I.3. Visi dan Misi
- I.4. Maksud, Tujuan dan Sasaran
- I.5. Prinsip dan Norma
- I.6. Keuntungan Mengikuti Program BERSERI

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- II.1. Kebijakan
- II.2. Strategi

III. MEKANISME PELAKSANAAN

- III.1. Sosialisasi
- III.2. Proses Seleksi
- III.3. Kriteria Penilaian
- III.4. Pembobotan
- III.5. Tahapan Penilaian, Penghargaan

IV. PENUTUP

- Penutup

Lampiran

- a. Kuisioner Program BERSERI
- b. Format Evaluasi Lapangan

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang saat ini telah menjadi isu lingkungan global yang telah menjadikan kekhawatiran bersama sebagai akibat dampak pemanasan global. Hal tersebut ditandai dengan terjadi perubahan pola hujan, kekeringan, longsor, banjir dan sebagainya, hal ini akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian seperti kerusakan sarana prasarana, penurunan produksi pertanian dan sumberdaya lainnya.

Masyarakat miskin sering menanggung beban terbesar dan kerusakan lingkungan karena pertama mata pencaharian sebagian besar kaum miskin terkait langsung dengan mutu dan produktivitas sumber daya alam (air, tanah, hutan, penanaman dll); kedua keluarga miskin memiliki akses rendah dan lebih rentan dari dampak lingkungan karena mereka biasanya hidup di daerah beresiko tinggi di wilayah marginal yang rentan terhadap kekeringan, banjir dan longsor.

Penanganan lingkungan selama ini belum terkoordinasi dengan baik, masih bersifat parsial yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan tidak berkelanjutan. Sedangkan peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal, sehingga untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia

2013 | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

ternyata belum menjadi milik setiap manusia Indonesia khususnya di Jawa Timur karena berbagai hal, untuk itu diperlukan upaya terobosan yang memiliki daya ungkit dalam upaya pelestarian lingkungan dan diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanganan masalah lingkungan.

Selama ini desa/kelurahan belum menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi dan kualitas manusia, padahal desa/kelurahan merupakan titik awal pembentukan kualitas manusia dalam mewujudkan dan terciptanya investasi pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan sebagian besar penduduk di Jawa Timur tinggal di pedesaan, oleh karena itu sudah sewajarnya bila pembangunan desa/kelurahan harus menjadi prioritas utama dalam segera rencana strategi dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pendekatan Desa/Kelurahan dengan melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, dapat sebagai solusi dalam penanganan masalah lingkungan. Mengingat dengan keterlibatan masyarakat sejak dini menumbuhkan proses pembangunan yang partisipatif, dan kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan dari dampak lingkungan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan terkait dengan penanganan masalah

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur | 2013

lingkungan, mengingat di Jawa Timur terdapat 7720 Desa dan 784 Kelurahan maka diperlukan suatu program dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, lestari dan asri.

Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencanangkan Program "BERSERI" (Bersih dan Lestari) pada tanggal 18 Juli 2011 bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

Program "BERSERI" adalah program untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan di Jawa Timur, program ini merupakan model pemberdayaan masyarakat dan aparat desa/kelurahan agar mau dan mampu menumbuhkan potensi desa/kelurahan yang berperilaku ramah lingkungan serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat terwujud desa/kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri serta memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim.

Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan insentif (rangsangan) dan desentif (pembertayaan), yaitu pembinaan, fasilitasi dan pembentukan kader lingkungan dengan pendekatan/pengekatan secara insentif.

2 | Penduan Program "BERSERI" mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan**Penduan Program "BERSERI" mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan | 3**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 65(1) menyebutkan "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia" dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 12(1) menyebutkan "Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan" hal ini berarti diperlukan peran serta masyarakat dalam usaha menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, lestari dan asri.

Program "BERSERI" (Bersih dan Lestari) adalah salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang lingkungan hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat terwujud desa/kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri.

Melalui program ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur sesuai dengan RPJMD 2009-2014 (Peraturan Gubernur no. 36 tahun 2009) menuju Provinsi Hijau / Green Province melalui program

BERSERI untuk mewujudkan desa/kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri. Disamping itu seluruh upaya yang telah dilaksanakan masyarakat perlu diinventarisasi dan tertata dengan baik agar dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan kapasitas adaptasi mulai lokal hingga nasional.

Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 65 ayat (1) menyebutkan "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia"
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 12 ayat (1) menyebutkan "Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan"
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim
- d. Peraturan Gubernur no. 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2014
- e. Peraturan Gubernur No 69 tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province)

3. Visi dan Misi

Visi :

"Terwujudnya Lingkungan Desa/Kelurahan yang Bersih dan Lestari"

Misi

- a. Membangun masyarakat yang peduli, bertbudaya bersih dan cinta lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri dengan memperhatikan kearifan lokal;
- c. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- d. Mewujudkan Program Jawa Timur menuju Provinsi Hijau (Go Green Province)

4. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud

Mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun masyarakat Desa/Kelurahan agar melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis dan berwawasan lingkungan sehingga terbentuk Desa/Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri.

Tujuan :

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa/Kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya, sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, lestari dan asri.

2013 *Radam Lingkungan Hidup Persepsi Jawa Timur*

- b. Memandirikan masyarakat desa/ kelurahan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan menggunakan dan mengakses sumber daya alam secara arif dan bijaksana.
- c. Meningkatkan kesadaran dan akses informasi kepada masyarakat Desa/Kelurahan, sehingga masyarakat dengan sadar dan secara langsung ikut berpartisipasi dalam penanganan masalah lingkungan di wilayahnya;
- d. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal, sosial dan budaya-nya serta membangkitkan peran aktif masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan yang Bersih dan Lestari (ramah lingkungan);
- e. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal;
- f. Mewujudkan Jawa Timur menuju Provinsi Hijau (Green Province) melalui Desa/Kelurahan yang bersih, sehat lestari dan asri.

Sasaran Program

Dalam pelaksanaan program BERSERI dilakukan penilaian terhadap desa/kelurahan mencakup lokasi / titik pantau yang meliputi aspek:

- a. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
- b. Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Pengelolaan Sumber Daya Alam

8. *Panduan Program "BERSERI" menujuJalan Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan***5. Prinsip dan Norma****Prinsip**

- a. **Partisipatif:** Komunitas Masyarakat terlibat dalam pengelolaan Lingkungan desa/kelurahan yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran
- b. **Berkelanjutan:** Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif
- c. **Berbasis masyarakat :** menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan kebijakan utama penanggungjawab kegiatan dan pengelola lingkungan

Norma

Program dan kegiatan yang dikembangkan harus berdasarkan norma-norma dan berkehidupan yang meliputi antara lain:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas :** pelaksanaan kegiatan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan seluruh lapisan masyarakat dan perilaku terkait berhak untuk mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya;
2. **Berbasis Nilai :** penyelenggaraan kegiatan dilakukan berlandaskan pada nilai-nilai, antara lain: **Kerja Keras, Kebersamaan/Gotong royong, Tanpa Pamrih, Kejujuran, dan Keadilan**

Upaya bersih lingkungan dengan menumbuhkan budaya (perilaku) masyarakat untuk mencintai lingkungan. Tindakan ini juga mewujudkan perilaku sehat antara lain melalui:

- 1) bersih dari sampah;
- 2) bebas dari pembakaran sampah;
- 3) sarana pemilahan dan pengolahan sampah
- 4) pengembangan program manajemen sampah (Sosial, Bank Sampah)
- 5) drainase dan sanitasi yang dikelola dengan baik;
- 6) Pengolahan limbah cair domestik sebelum dibuang ke media lingkungan;
- 7) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
- 8) Penghijauan, keleduhan ja'an dan Fasilitas Umum yang terpelihara;
- 9) Pelestarian kawasan sekitar danau, waduk dan mata air;
- 10) Pelestarian dan pengembangan tanaman langka dan tanaman obat;

b. Lestari yaitu:

Melestarikan budaya bersih dan sehat dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen bersama seluruh warga masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan.

- 2) peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 3) pemberdayaan kader / kelompok pecinta lingkungan;
- 4) Aksi provokasi lingkungan/slogan-slogan untuk memotivasi kepedulian lingkungan;
- 5) Adanya sanksi kepada pihak yang merusak lingkungan;
- 6) Tidak merambah / merusak hutan

c. Ekonomi Hijau / Green Economy yaitu :

Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk generasi kini dan yang akan datang melalui pola dan aktifitas kegiatan ekonomi melalui:

- 1) pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan (IPAL, Biogas, PLTA, PLTM/Solar sel, dan lain sebagainya);
- 2) efisiensi penggunaan energy dan sumber daya alam;
- 3) budidaya tanaman produktif dengan pupuk dan pestisida organik;
- 4) budidaya ternak, ikan dengan pakan organik/bahan baku limbah;
- 5) pengembangan kemitraan dan jejaring pemasaran;
- 6) meningkatkan partisipasi swasta (seperti program CSR).

d. **Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, yaitu :**

Menerapkan pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan, melalui:

- 1) Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
- 2) Peningkatan ketahanan pangan;
- 3) Penanganan danantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi atau erosi akibat angin dan gelombang tinggi;
- 4) Penggunaan energy baru, terbarukan dan konservasi energi;
- 5) Pengelolaan budi daya pertanian.

III. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Sosialisasi

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan program BERSERI kepada Kantor/Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten/kota se Jawa Timur. Materi sosialisasi adalah Buku Panduan Umum dan Petunjuk Teknis Program BERSERI. Dalam buku panduan juga diinformasikan bahwa siklus pengembangan program BERSERI sebagai berikut : i) Inisiasi, ii) Sosialisasi, iii) Implementasi, dan iv) Evaluasi.

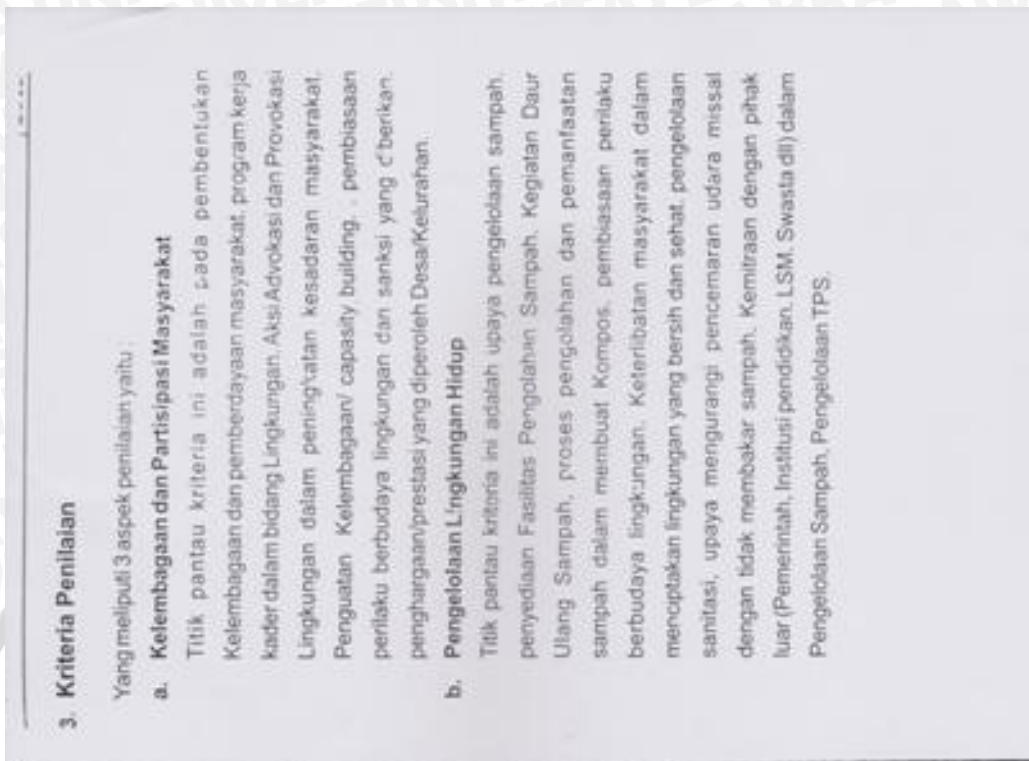
Kantor/Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota mensosialisasikan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa tentang program BERSERI. Desa atau Kota mengikuti program BERSERI dengan mengisi profil desa/kelurahan seperti pada Lampiran 1. Isian profil desa/kelurahan selanjutnya dikirim oleh Kepala Kantor/Dinas/Badan Lingkungan Hidup Kab/Kota kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk diseleksi

Proses seleksi dalam mewujudkan Desa/Kelurahan yang Bersih dan Lestari dilakukan oleh BLH Provinsi Jawa Timur dengan mekanisme :

1. menilai porto folio profil desa/kota
2. menilai fisik desa/kota dan kebersamaan warga dengan cara Tim BLH Provinsi datang ke lokasi desa/kota

2. Proses Seleksi

Proses seleksi dalam mewujudkan Desa/Kelurahan yang Bersih dan Lestari dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :



TINGKAT DESA / KELURAHAN
(Januari s/d Februari)

- Sosialisasi, Pembinaan dan Pemberdayaan
- Persiapan dan penerimaan proses administrasi pengisian kuisioner dan penyusunan Lr-nya
- Kegiatan terkait dgn penyelamatan dan pelestarian lingkungan
- Penyempitan Kader / Koordinator peduli lingkungan
- Data Desa / Kelurahan

TINGKAT KABUPATEN / KOTA
(Januari s/d Maret)

- Sosialisasi, Pembinaan dan Pemberdayaan
- Pembentukan Tim BERSEKUTU dan sosialisasi Tingkat Kabupaten
- Pembinaan BERSEKUTU tingkat Kabupaten
- Penetapan tingkat Kabupaten kategori Bersektu
- Penyempitan Peduli Desa/Kelurahan hasil seleksi

TINGKAT PROVINSI
(Januari s/d Juni)

- Sosialisasi, Pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi
- Pembentukan Tim BERSEKUTU Tingkat Provinsi
- Pembinaan Program BERSEKUTU tingkat Provinsi
- Penyempitan hasil seleksi
- Pembinaan Penghargaan BERSEKUTU tingkat Provinsi kategori Problems, Madya dan Mandiri

16 **Prosedur Program "BERSEKUTU"** merupakan Dua Kelurahan Remah Lingkungan

3. Kriteria Penilaian

Yang meliputi 3 aspek penilaian yaitu :

a. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Titik pantau kriteria ini adalah pada pembentukan Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, program kerja kader dalam bidang Lingkungan, Aksi Advokasi dan Provokasi Lingkungan dalam peningkatan kesadaran masyarakat, Penguatan Kelembagaan/ capacity building, pembiasaan perilaku berbudaya lingkungan dan sanksi yang diberikan, penghargaan/prestasi yang diperoleh Desa/Kelurahan.

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Titik pantau kriteria ini adalah upaya pengelolaan sampah, penyediaan Fasilitas Pengolahan Sampah, Kegiatan Daur Ulang Sampah, proses pengolahan dan pemanfaatan sampah dalam membuat Kompos, pembiasaan perilaku berbudaya lingkungan, Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan sanitasi, upaya mengurangi pencemaran udara misal dengan tidak membakar sampah, Kemitraan dengan pihak luar (Pemerintah, Institusi pendidikan, LSM, Swasta dll) dalam Pengelolaan Sampah, Pengelolaan TPS.

17 **Prosedur Program "BERSEKUTU"** merupakan Dua Kelurahan Remah Lingkungan

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Titik pantau kriteria ini adalah upaya pengelolaan sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat dalam ikut menjaga dan melestarikan sumber daya alam, upaya penghematan sumber daya alam, peraturan tertulis dan tidak tertulis tentang penyelamatan SDA, upaya kelanggap segera tentang darurat lingkungan / bencana, penghargaan dalam upaya penyelamatan sumber daya alam, upaya penyelamatan sumber daya alam di desa/kelurahan, pemakaian teknologi ramah lingkungan dalam upaya penyelamatan sumber daya alam.

4. Pembobotan

Pengolahan Sampah dan Kriteria Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dan merupakan satu korelasi positif. Pengolahan sampah diberikan pembobotan sebesar 30 % hal ini dikarenakan bahwa isu penanganan sampah telah diatur dalam Undang – undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana dalam pengelolannya Desa/Kelurahan harus bisa menuju ke Zero Waste (bebas sampah) dan kunci utama dari keberhasilan pengelolaan tersebut ada pada tingkat partisipasi masyarakat yang dalam hal ini diberikan pembobotan sebesar 40 %

sebagai pilar penting dari sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Sedangkan dalam penilaian kriteria pengelolaan sumber daya alam memiliki bobot yang sama yakni 20 %.

KRITERIA	BOBOT
1. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	40 %
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup	30 %
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam	20 %
4. Presentasi	10 %

Ceterangan Bobot Penilaian

1. Penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan tujuan agar program lingkungan dapat menjadi suatu kebudayaan tidak hanya pada tingkat kepedulian dan wawasan.
2. Penilaian Program BERSERU menggunakan sistem passing grade / batasan penilaian.

5. Tahapan Penilaian

- 1) Pelaksanaan Penilaian di tingkat Kabupaten/Kota
Dilaksanakan oleh tim penilai kabupaten/kota berdasarkan SK bupati/walikota. Pelaksanaan penilaian dibagi dalam

dua tahap, tahap pertama dilakukan penilaian administrasi, apabila persyaratan administrasi terpenuhi dilakukan penilaian tahap kedua terkait aspek teknis. Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Rintisan tingkat kabupaten/kota dapat diusulkan ke Provinsi untuk diseleksi tingkat provinsi menjadi Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari).

2) Pelaksanaan Penilaian di Tingkat Provinsi

dilaksanakan oleh tim penilai provinsi berdasarkan SK Gubernur. Pelaksanaan penilaian dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan penilaian administrasi, apabila persyaratan administrasi terpenuhi dilakukan penilaian tahap kedua terkait aspek teknis. Hasil tim provinsi disampaikan kepada Gubernur, dan tembusan di sampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi dan Desa/Kelurahan yang dinilai.

6. Penghargaan

Penghargaan "BERSERI" kategori Pratama, Madya dan Mandiri diberikan kepada Kepala Desa / Lurah yang sudah memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan penghargaan yang diperoleh berupa : Trophy Gubernur Jawa Timur, Pembinaan, Fasilitas Barang Stimulan bagi pengembangan program "BERSERI" tahap selanjutnya.

Bagi Rintisan "BERSERI" diberikan kepada Kepala Desa / Lurah oleh Bupati/Walikota dan memenuhi kriteria penilaian sesuai passing grade pembinaan diberikan kepada Kabupaten dan Kota.

Hasil akhir penilaian (non fisik dan fisik) didasarkan passing grade prosentase nilai maksimal yang sudah ditetapkan yakni sebagai berikut:

KATEGORI PENGHARGAAN	PASSING GRADE (%)
1. BERSERI TINGKAT MANDIRI	≥ 80
2. BERSERI TINGKAT MADYA	$70 \leq x < 80$
3. BERSERI TINGKAT PRATAMA	$60 \leq x < 70$
4. RIINTISAN KAB / KOTA	< 60

Disamping berdasarkan hasil penilaian dengan passing grade, penentuan kategori penghargaan dengan mempertimbangkan tingkat penyebaran RW yang terlibat dalam kegiatan Desa/Kelurahan Berseri di masing-masing Desa/Kelurahan yaitu:

1. Mandiri : minimal 4 RW atau semua RW bila jumlah RW kurang dari 4
2. Madya : minimal 3 RW atau 50% dari jumlah RW bila kurang dari 4
3. Pratama: minimal 2 RW Keterangan : dalam satu RW bias hanya satu RT yang dinilai

PENUTUP

Keberhasilan Program "BERSERI" (Bersih dan Lestari) diharapkan dapat memberikan multiplier efek yang lebih luas, seperti terciptanya perluasan lapangan kerja, meningkatkan peran aktif para kader dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menuju Desa/Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri serta kapasitas masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pengembangan Program "BERSERI" (Bersih dan Lestari) memerlukan Tim Lintas Sektoral dan komponen masyarakat / LSM / Akademisi untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi. Mengingat permasalahan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor lain, serta adanya keterbatasan sumberdaya, maka untuk memajukan Program "BERSERI" (Bersih dan Lestari) perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak.

Salah satu kunci keberhasilan program adalah keaktifan para kader. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan perlu dikembangkan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan pada kader agar tidak drop-out, kader-kader yang memiliki motivasi harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kreativitasnya.

lampiran 1 : Formulir Evaluasi Administrasi Program "BERSERI"**I. Lembar Pernyataan.**

Mengingat kebenaran data sangat diperlukan dalam penilaian Program BERSERI, bersama ini saya sebagai Kepala Desa / Lurah Menyatakan bahwa format isian untuk Penilaian Program BERSERI ini telah diisi dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan.

.....20.....

Kepala Desa/ Lurah,

Ttd dan Stempel

(.....)



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Hayam Wuruk Nomor 50 Telp. (0321) 328704
MOJOKERTO

REKOMENDASI

Nomor : 072/1999/1417.402/2014

**TENTANG
 REKOMENDASI PENELITIAN**

- Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011
2. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
- Menimbang : Surat Permohonan dari Universitas Brawijaya Malang Nomor : 16084/UN 10.3/PG/2014 Tanggal 24 November 2014 Perihal Ijin Survey

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Memberikan **REKOMENDASI** untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian kepada :

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Nama Peneliti | : Imroatul Muflida |
| b. Alamat Peneliti | : Jl. Menanggal Mojosari Mojokerto |
| c. Nomor Induk KTM/KTP | : 115030107111092 |
| d. Judul/Thema | : Inovasi Program Adiwiyata di Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta sebagai Upaya Perwujudan Green City |
| e. Tujuan Penelitian | : Mengetahui mengidentifikasi, dan menganalisis Strategi Pemerintah dalam mengimplementasikan Inovasi dalam program Adiwiyata. |
| f. Tempat Survey | : 1. Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto |
| g. Lama Survey/Riset/KKN | : 2 (dua) bulan terhitung mulai 24 Desember 2014 s/d 24 Januari 2015 |
| h. Nama Penanggung Jawab | : Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si |
| i. Alamat | : Jl. MT Haryono 163 Malang |

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan mentaati tata tertib sebagaimana terlampir.

Mojokerto, 22 Desember 2014
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MOJOKERTO



Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Walikota Mojokerto (sebagai laporan)
 2. Yang bersangkutan
 3. Arsip



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Hayam Wuruk Nomor 50 Telp. (0321) 328704
MOJOKERTO

TATA - TERTIB PENELITIAN:

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 Jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat, **terkecuali pelajar dan mahasiswa.**
2. Mentaati peraturan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kota Mojokerto
3. Menjaga tata tertib keamanan, kesopanan dan kesusilaan, menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan, menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Tidak di perkenankan mencari data yang tidak ada kaitannya dengan maksud dan tujuan penelitian
6. Setelah berakhir dilakukan survey/ riset diwajibkan :
 1. Melaporkan kepada pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / riset sebelum meninggalkan daerah tempat survey / riset;
 2. Melapokan hasil Melakukan Survey / riset kepada Walikota Mojokerto Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.
7. Apabila batas waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari tidak membuat laporan / resume hasil survey, yang bersangkutan tidak dibuatkan Surat Keterangan selesai survey dan data hasil survey tidak disahkan (dibatalkan)
8. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan seperti tersebut diatas.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



Ir. SRPYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 1980061985081002



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Benteng Pancasila No. 21 B Telp./Fax. (0321) 381505
Mojokerto

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.45/231 /417.408/2015

TENTANG

PANITIA LOMBA BERSERI TAHUN 2015

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. Bahwa Program BERSERI adalah salah satu program Pemerintah Kota Mojokerto di bidang lingkungan hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga terwujud kelurahan yang Bersih, Sehat, Asri dan Lestari serta melaksanakan penilaian terhadap lingkungan yang memenuhi syarat sebagai kampung Berseri
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu membentuk Panitia Lomba BERSERI Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
 9. Peraturan Pokok – Pokok Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daeah ;
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Akutansi Daerah ;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2014 ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 118 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/2 417.111/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Untuk Mununjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Lain dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Lomba BERSERI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dan kepada panitia dimaksud diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- KEDUA** : a. Mempersiapkan dan melaksanakan Lomba Berseri Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab
b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
- Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat
- KETIGA** : dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun
- KEEMPAT** : Anggaran 2015.
- Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal, 29 April 2015

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MOJOKERTO
Selaku Pengguna Anggaran


NURHARIADI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580420 1098503 1 017

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 188.45/2015/417.408/2015
 TANGGAL : 29 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LOMBA BERSERI
 TAHUN 2015

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
2	Ketua	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
3	Sekretaris	Kasi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
4	Anggota	4 (Empat) orang staf pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA MOJOKERTO
 Selaku Pengguna Anggaran



NURHARIADI, SH.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580420 198503 1 017

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 188.45/13/ /417.408/2015
 TANGGAL : 29 April 2015

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PANITIA LOMBA BERSERI TAHUN 2015

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto	Rp. 450.000,-
2	Ketua	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto	Rp. 400.000,-
3	Sekretaris	Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan pada	Rp. 300.000,-
4	Anggota	4 (Empat) orang staf pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto	Rp.1.200.000,-
JUMLAH			Rp. 2.350.000,-

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA MOJOKERTO
 Setaku Pengguna Anggaran



NURHARIADI, SH.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580420 198503 1 017



FORM LEMBAR PENILAIAN
KOTA MOJOKERTO BERSIH, SEHAT, ASRI DAN LESTARI 2015

KATEGORI : PEMULA
 RT / RW : 01 - 05 / II Surodinawan Hari : Sabtu
 Kelurahan : Surodinawan Tgl : 30 Mei 2015
 Kecamatan : Prapurit Kulon Jml KK : 230 KK

I. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kebersihan (30%)

No	Keterangan	Kategori	Kriteria	Bobot Nilai	Nilai
1	Kebersihan Lingkungan (Penumpukan sampah liar)	Kurang	Berserakan dan Bertumpuk	31 - 50	
		Sedang	Bertumpuk di tempat tertentu	51 - 65	
		Baik	Tidak ada sampah dan sudah terpilah	66 - 80	70
2	Usaha mengurangi sampah	Kurang	Belum Ada Pemilahan sampah	31 - 50	
		Sedang	Sedikit sampah dan Kurang Terolah	51 - 65	
		Baik	Ada pemilahan sampah	66 - 80	70
3	Kegiatan Lingkungan	Kurang	Tidak Pernah di lakukan	31 - 50	
		Sedang	Dilakukan dan Tentatif	51 - 65	
		Baik	Dilakukan Rutin dan Terjadwal	66 - 80	70
4	Administrasi	Kurang	Tidak ada sama sekali	31 - 50	
		Sedang	Ada tapi tidak lengkap	51 - 65	55
		Baik	Ada dan lengkap	66 - 80	
				Jumlah Nilai	265
				Total Prosentase (30%)	79,5

Mojokerto, 30 Juni 2015

Febriandani EP
(.....)

Note :

.....

.....

.....

.....



FORM LEMBAR PENILAIAN
KOTA MOJOKERTO BERSIH, SEHAT, ASRI DAN LESTARI 2015

KATEGORI : PEMULA
RT / RW : 3 / panggeruhen Hari : Sabtu
Kelurahan : Kranggan Tgl : 30 Mei 2015
Kecamatan : prajurit kudu Jml KK : 282

II. Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Penghijauan (25%)

No	Keterangan	Kategori	Kriteria	Bobot Nilai	Nilai
1	Penghijauan (Fisik Lingkungan)	Kurang	< 40% dari luas Wilayah	31 - 50	28
		Sedang	41% - 60% dari Luas Wilayah	51 - 65	
		Baik	> 61% dari luas Wilayah	66 - 80	
2	Pemanfaatan Lahan	Kurang	Belum di Manfaatkan	31 - 50	36
		Sedang	Dimanfaatkan tapi Belum Optimal	51 - 65	
		Baik	Dimanfaatkan dan Sudah Optimal	66 - 80	
3	Penataan Tanaman	Kurang	Tidak Tertata	31 - 50	39
		Sedang	Tertata tapi kurang Terawat	51 - 65	
		Baik	Tertata dan Terawat	66 - 80	
4	Administrasi	Kurang	Tidak ada sama sekali	31 - 50	51
		Sedang	Ada tapi tidak lengkap	51 - 65	
		Baik	Ada dan lengkap	66 - 80	
Jumlah Nilai					141
Total Prosentase (25%)					35.25

Mojokerto, 30 Mei 2015
Juri
(Signature)
(*Sumo*)

Note :

.....
.....
.....
.....
.....



FORM LEMBAR PENILAIAN
KOTA MOJOKERTO BERSIH, SEHAT, ASRI DAN LESTARI 2015

KATEGORI : PEMULA
RT / RW : III
Kelurahan : Karanggen / Pangreman
Kecamatan : Prajuritkulen
Hari : Sabtu
Tgl : 30 Mei 2015
Jml KK :

IV. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kesehatan (15%)

No	Keterangan	Kategori	Kriteria	Bobot Nilai	Nilai
1	Angka Bebas Jentik	Kurang	ABJ 50%	31 - 50	
		Sedang	ABJ 70%	51 - 65	
		Baik	ABJ 100%	66 - 80	
2	Pemahaman Kader Tentang PSN - DB - 3M	Kurang	Tidak Paham	31 - 50	
		Sedang	Paham Tetapi Tidak dilakukan	51 - 65	
		Baik	Paham dan Sudah Dilakukan	66 - 80	
3	Akses Jamban Sehat	Kurang	Belum ada akses	31 - 50	
		Sedang	Sudah ada akses sebagian	51 - 65	
		Baik	Akses ada di setiap rumah	66 - 80	
4	Administrasi	Kurang	Tidak ada sama sekali	31 - 50	
		Sedang	Ada tapi tidak lengkap	51 - 65	
		Baik	Ada dan lengkap	66 - 80	
Jumlah Nilai					273
Total Prosentase (15%)					40,95

Mojokerto, 30 Mei 2015
Jun
(Choirul A)

Note :

.....
.....
.....
.....



FORM LEMBAR PENILAIAN
KOTA MOJOKERTO BERSIH, SEHAT, ASRI DAN LESTARI 2015

KATEGORI : PEMULA
RT / RW : 01 /
Kelurahan : Kedunan / Pamotan
Kecamatan : Purwokerto
Hari : Sabtu
Tgl : 30 Mei 2015
Jml KK : 283

V. Sanggar Indonesia Bhakti (LSM) **Habit (15%)**

No	Keterangan	Kategori	Kriteria	Bobot Nilai	Nilai
1	Kebiasaan warga terhadap sampah	Kurang	Membuang sampah sembarangan	31 - 50	35
		Sedang	Membuang sampah ke bak sampah	51 - 65	-
		Baik	Memilah sampah	66 - 80	-
2	Partisipasi warga	Kurang	Warga tidak peduli	31 - 50	35
		Sedang	50% dari jumlah KK	51 - 65	-
		Baik	>50% dari jumlah KK	66 - 80	-
3	Pembiasaan warga terhadap lingkungan	Kurang	Warga Tidak paham sama sekali	31 - 50	37
		Sedang	Paham tetapi tidak melakukan	51 - 65	-
		Baik	Paham dan dilakukan	66 - 80	-
4	Administrasi	Kurang	Tidak ada sama sekali	31 - 50	-
		Sedang	Ada tapi tidak lengkap	51 - 65	50
		Baik	Ada dan lengkap	66 - 80	-
Jumlah Nilai					157
Total Prosentase (15%)					23,55

Mojokerto, 30 Mei 2015
Jud
(Edi Sutopo)

Note :

.....
.....
.....
.....

Pedoman Wawancara

Informan : Bapak Kepala Subag. Benny Sugiarto dan Bapak Waji

1. Bagaimana proses pelaksanaan program “Berseri” di Kota Mojokerto ?
2. Sejak kapan program “Berseri” dilaksanakan di Kota Mojokerto ?
3. Sejauhmana program “Berseri” dilaksanakan di Kota Mojokerto ?
4. Bagaimana peran pemerintah menunjang program “Berseri” di Kota Mojokerto?
5. Bagaimana keadaan Kota Mojokerto sebelum dan sesudah dilaksanakan program “Berseri” ?
6. Apa saja strategi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program “Berseri” di Kota Mojokerto ?
7. Adakah dampak apa yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program “Berseri” di Kota Mojokerto ? Apa saja dampak yang di timbulkan dalam pelaksanaan program tersebut ?
8. Adakah hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan program “Berseri” di Kota Mojokerto ? Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program tersebut ?
9. Adakah kebijakan dari pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan program “Berseri” di Kota Mojokerto ?
10. Apa saja faktor pendukung program “Berseri” di Kota Mojokerto ?
11. Jika ada CSR, apa faktor pendorong sebuah perusahaan mengadakan program CSR?
12. Bagaimana pencapaian hasil dari adanya program “Berseri” di Kota Mojokerto ?

13. Hal-hal apa saja yang belum di capai dalam pelaksanaan program “Berseri” di Kota Mojokerto?

Hasil Wawancara

Informan : Bapak Kepala Subag. Benny Sugiarto dan Bapak Waji

1. Bagaimana proses pelaksanaan program “Berseri” di Kota Mojokerto ?

Pelaksanaan program “Berseri” di Kota Mojokerto sesuai dengan Visi dan Misi dari Peraturan Gubernur.

Visi :

Untuk terwujudnya Lingkungan Desa/Kelurahan yang bersih dan Lestari

Misi :

- Membangun masyarakat yang peduli, berbudaya bersih dan cinta lingkungan hidup.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri dengan memperhatikan kearifan local.
- Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Mewujudkan Program Jawa Timur menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*)

2. Sejak kapan program “Berseri” dilaksanakan di Kota Mojokerto ?

Program “Berseri” di Kota Mojokerto baru dilaksanakan dari awal tahun 2015

3. Sejauhmana program “Berseri” dilaksanakan di Kota Mojokerto ?

Sudah berjalan dengan adanya lomba-lomba antar desa RT dan RW serta di tingkat kelurahan untuk penunjang agar kebersihan lingkungan desa/kelurahan tetap terjaga. Adanya lomba-lomba dalam program “Berseri” dilaksanakan setiap tahunnya.

4. Peran Pemerintah untuk menunjang program “Berseri” di Kota Mojokerto ?

- a. Adanya kerja bakti masal oleh masyarakat dan Pemerintah di desa/kelurahan
- b. Adanya kegiatan PSN terintegrasi (Pemberantasan Sarang Nyamuk) yang dipandu oleh SKPD dan Walikota
- c. Adanya pelatihan-pelatihan pengelolaan sampah dan daur ulang
- d. Workshop bank sampah
- e. Dengan diadakannya lomba bank sampah
- f. Dengan diadakannya lomba PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan pembangunan di bidang lingkungan

5. Keadaan Kota Mojokerto sebelum dan sesudah dilaksanakan program “Berseri”

- a. Sebelum :
 - 1.) Masyarakat kurang peduli/acuh pada lingkungan hidup
 - 2.) Banyaknya tumpukan sampah liar yang ada di lingkungan masyarakat
 - 3.) Belum terdapat bank sampah
 - 4.) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kepedulian pada lingkungan hidup

- 5.) Banyaknya wabah/sarang nyamuk
 - 6.) Banyaknya wabah penyakit
- b. Sesudah :
- 1.) Masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan hidup
 - 2.) Desa/kelurahan yang bersih dan asri dari sampah liar
 - 3.) Adanya bank sampah yang disediakan oleh pemerintah
 - 4.) Masyarakat lebih mengetahui banyak wawasan mengenai lingkungan hidup dengan diadakannya workshop dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah
 - 5.) Berkurangnya wabah/sarang nyamuk dengan diadakannya pelatihan kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)
 - 6.) Masyarakat sehat dan tentram
6. Strategi Pemerintah dalam pelaksanaan program “Berseri” sesuai visi dan misi walikota
- a. Visi : Mewujudkan pembangunan pada Kota
 - b. Misi :
 - 1.) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - 2.) Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram
 - 3.) Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai seperti halnya ; menyediakan bank sampah sebanyak mungkin untuk menjaga kebersihan lingkungan, bantuan pengadaan pot beserta bunga, mengadakan workshop dan pelatihan-pelatihan bank sampah, adanya kegiatan PSN (pemberantasan sarang nyamuk),

adanya lomba PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) dan menyediakan roda tiga untuk membantu pengangkatan dalam proses pelaksanaan program “Bersei”.

7. Dalam proses pelaksanaan program “Bersei” jelas terdapat dampak yang di timbulkan dalam pelaksanaannya, antara lain yaitu ;
 - a. Adanya perubahan perilaku pada lingkungan masyarakat
 - b. Kondisi lingkungan semakin baik dan bersih
 - c. Bebas dari sarang penyakit atau jentik nyamuk
8. Dalam proses pelaksanaan program “Bersei” tentu terdapat adanya hambatan yang dilalui dalam pelaksanaannya, antara lain yaitu ;
 - a. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan program “Bersei”
 - b. Kurangnya faktor media sarana prasarana
 - c. Prilaku/budaya masyarakat yang susah untuk disesuaikan
 - d. Sumber daya manusia
 - e. Biaya dari pemerintah.
9. Kebijakan dari pemerintah Kota Mojokerto tentang program bersei langsung menerapkan kebijakan dari pusat (Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Nasional)
10. Faktor pendukung program “Bersei” di Kota Mojokerto
 - a. Adanya biaya dari pemerintah
 - b. Adanya bantuan dari CSR (*Corporate Social Responsibility*)
 - c. Dukungan dari pemerintah

d. Partisipasi masyarakat.

11. Apa faktor pendorong sebuah perusahaan mengadakan program CSR?

Faktor Internal

- a. Perusahaan menyadari jika dirinya termasuk dalam kelompok sosial yang berkecimpuk di suatu tempat tertentu dan berkaitan dengan kelompok sosial lainnya.
- b. Perusahaan menyadari jika niatan membantu sesama kelompok sosial (manusia) dan menjaga kelestarian lingkungan (Bumi) merupakan suatu tindakan yang mulia dan dianjurkan disetiap agama
- c. Perusahaan mempunyai niatan untuk mendorong karyawan supaya dapat hidup lebih disiplin, mengembangkan kemampuan untuk kemajuan perusahaan serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar.

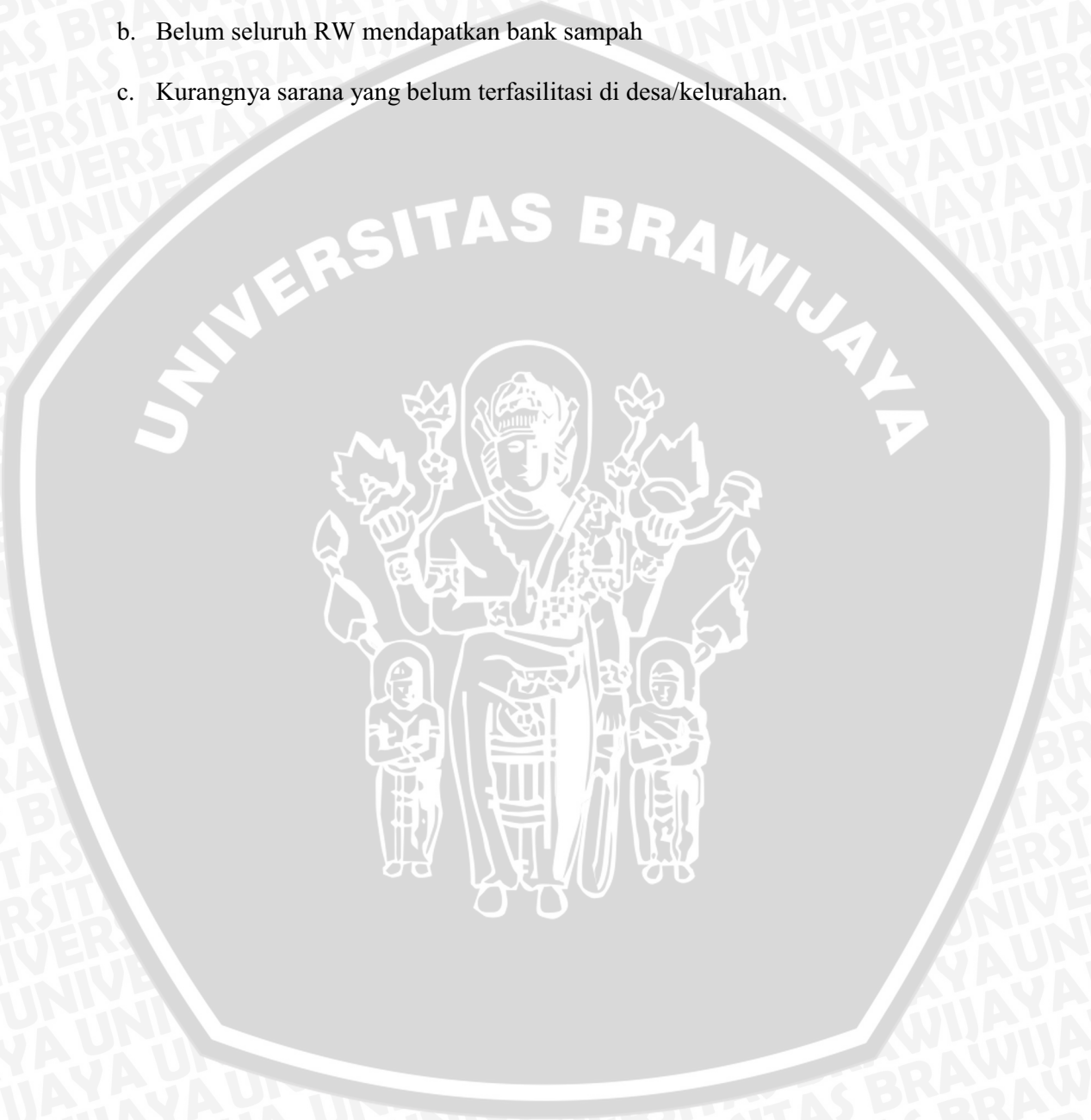
Faktor Eksternal

- a. Perusahaan ingin menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar perusahaan dalam hal ini masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi perusahaan maupun masyarakat secara luas yang dalam hal ini diartikan masyarakat yang lokasinya jauh dari perusahaan
- b. Ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup

12. Pencapaian hasil dari adanya program “Berseri” di Kota Mojokerto sejauh ini cukup baik, dengan adanya partisipasi dan kepedulian dari masyarakat dan pemerintah untuk bekerjasama dalam menjaga lingkungan dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa/kelurahan yang sesuai dalam menerapkan program “Berseri”,

13. Hal-hal yang belum terealisasi/terlaksanakan dalam pelaksanaan program masih banyak, antara lain ;

- a. Masih banyak desa/kelurahan yang belum sesuai menerapkan program “Berseri”
- b. Belum seluruh RW mendapatkan bank sampah
- c. Kurangnya sarana yang belum terfasilitasi di desa/kelurahan.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Kelurahan Surodinawan, salah satu kelurahan yang menerapkan Program Berseri di Kota Mojokerto

Diskusi penilaian Program Berseri di Kelurahan Surodinawan



Diskusi penilaian Program Berseri di Kelurahan Surodinawan





Pemanfaatan sampah sebagai kerajinan tangan

Pemanfaatan sampah plastik yang diubah menjadi karpet dan digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga



Pemanfaatan sampah anorganik yang masih bisa diolah kembali, menjadi kerajinan tangan lampu gantung



Penilaian Program Berseri yang dilakukan di Kelurahan Panggerman Kota Mojokerto

Setelah diberlakukannya Program Berseri, sudah tidak ditemukan lagi sampah-sampah liar





Setelah diberlakukannya Program Berseri, sudah tidak ditemukan lagi sampah-sampah liar dan gang-gang menjadi lebih bersih





Salah satu pemanfaatan botol plastik bekas yang digunakan sebagai pot-pot tanaman sebagai penghias dinding-dinding kampung





Bank Sampah "Sejahtera", salah satu bank sampah yang diadakan oleh pemerintah guna pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPS





Bank Sampah "Putri Ayu", salah satu bank sampah di Kec. Magersari yang masih aktif dan proaktif terhadap Program Berseri

Penilaian Program Berseri dan pemantauan program yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto



Hasil pemanfaatan sampah anorganik yang sudah diolah menjadi kerajinan tangan dan ditampung di Bank Sampah



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Imroatul Mufida dilahirkan di kota Mojokerto pada tanggal 03 Nopember 1992 dari ayah yang bernama H. Mustofa dan ibu bernama Hj. Lilik Sumiati. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Menanggal 2 Mojosari pada tahun 1999 dan lulus pada tahun 2005. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 2 Mojosari dan tamat pada tahun 2008.

Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Mojosari dan lulus pada tahun 2011. Setelah tamat SMU, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Kota Malang pada Tahun 2011. Pada tanggal 1 Juli 2014 sampai 31 Agustus 2014, penulis melaksanakan kegiatan Magang di Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.